

**ANALISIS FRAMING MODEL MURAY EDELMAN PADA  
PEMBERITAAN PEMILIHAN PRESIDEN 2019 DI  
SERAMBINEWS.COM DENGAN REPUBLIKA.CO.ID**

**SKRIPSI**

**Diajukan Oleh**

**RAYYAN SOFYAN**

**NIM. 150401019**

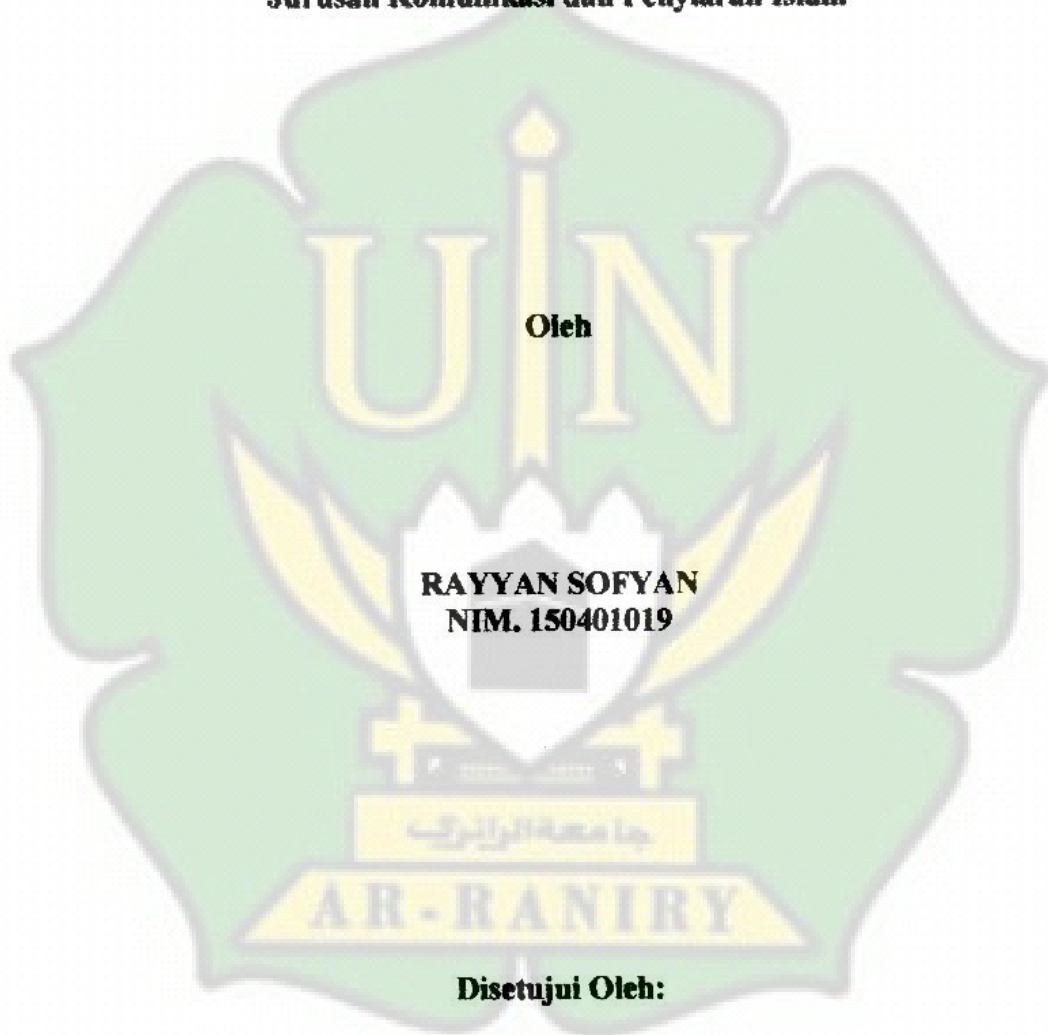
**Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam**



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
1441 H/2020 M**

**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh  
sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana S-1 dalam Ilmu Dakwah  
Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam**



**Pembimbing I,**

  
**Drs. Zainuddin T, M.Si.**  
**NIP. 197011042000031002**

**Pembimbing II,**

  
**Asmaunizar, S.Ag, M.Ag.**  
**NIP. 197409092007102001**

**SKRIPSI**

**Telah Dinilai oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus serta Disahkan sebagai  
Tugas Akhir untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana S-1 Ilmu Dakwah  
Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam**

**Diajukan Oleh**

**RAYYAN SOFYAN  
NIM. 150401019**

**Pada Hari/Tanggal**

**Senin, 24 Agustus 2020 M  
18 Zulhijjah 1441 H**

**di  
Darussalam-Banda Aceh**

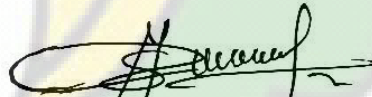
**Panitia Sidang Munaqasyah**

**Ketua,**



**Zainuddin T. M.Si  
NIP. 197011042000031002**

**Sekretaris,**



**Asmaunizar, M. Ag  
NIP. 197409092007102001**

**Anggota I,**



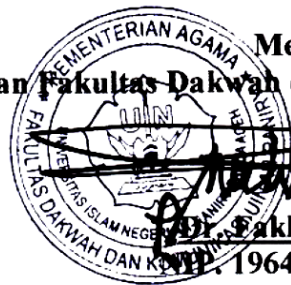
**Dr. Hendra Syahputra S.T., M.M  
NIP. 197610242009011005**

**Anggota II,**



**Syahril Furqany, M. I. Kom  
NIP. 198904282019031011**

**Mengetahui,  
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry**



**Dr. Fakhri S.Sos., MA  
NIP. 196411291998031001**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Rayyan Sofyan

NIM : 150401019

Jenjang : Strata Satu (S-1)

Jurusan/Prodi : Komunikasi dan Penyiaran Islam.

Menyatakan bahwa dalam Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

Banda Aceh, 5 Agustus 2020

Yang Menyatakan,



1000  
RUPIAH

46AHF55438/045

Rayyan Sofyan

Rayyan Sofyan  
NIM. 150401019

AR-RANIRY

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, yang telah melimpahkan taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat beriring salam penulis sampaikan ke pangkuan Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan ke alam yang penuh ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini.

Alhamdulillah dengan petunjuk dan hidayah-Nya, penulis telah selesai menyusun skripsi yang sangat sederhana ini untuk memenuhi dan melengkapi syarat-syarat guna mencapai gelar sarjana pada Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan Judul “ANALISIS *FRAMING* MODEL MURRAY EDELMAN PADA PEMBERITAAN PEMILIHAN PRESIDEN 2019 DI *SERAMBINNEWS.COM* DAN *REPUBLIKA.CO.ID*”.

Dengan penuh kesadaran dan klerendahan hati, penulisan skripsi ini tidak akan selesai bila tanpa bantuan serta dukungan dari berbagai pihak, baik bantuan moril maupun material. Sudah sepatutnya penulis mengucapkan terimakasih ke semua pihak yang telah memberikan bantuan serta dukungannya, sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Keluarga tercinta, terutama Ayahanda Sofyan dan Ibunda Maimunah yang telah mendidik, membesarkan serta memberikan dukungan dan motivasi, mencurahkan cinta dan kasih sayangnya serta lantunan doa

yang begitu kuat untuk penulis, sehingga skripsi ini selesai. Dan kepada adik serta keluarga besar yang sudah memberikan motivasi, dukungan, dan do'a kepada penulis.

2. Kepada Bapak Zainuddin T, M.Si, sebagai pembimbing I, penulis mengucapkan terima kasih telah meluangkan waktu dan memberikan arahan serta bimbingan kepada saya. Serta ucapan terimakasih kepada Ibu Asmaunizar, M. Ag, selaku pembimbing II yang telah membimbing, mencurahkan ide, memberi semangat, dan arahan dalam penulisan skripsi ini.

3. Kepada Bapak Drs. Syukri Syamaun, M.Ag. Selaku Penasihat Akademik (PA) yang selalu memberikan dukungan kepada penulis. Bapak Dr. Fakhri, S.Sos, MA selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Bapak Dr. Hendra Syahputra, ST., MM, selaku Ketua Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI), Ibu Anita, S.Ag., M.Hum selaku Sekretaris Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, serta seluruh dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan.

4. Teristimewa kepada teman-teman The gangs, Aceh Japan Art Community, Sakura House Family, yang selalu memberikan penulis motivasi dan dorongan untuk menyelesaikan skripsi ini dan juga terimakasih untuk teman-teman yang setia menemani saya dari awal hingga akhir proses pengerjaan skripsi ini, Bang Cut Muhammad Habibi, Risky Munazar, Riska Adawiyah, Noera, Nadya Ismuha, Ega Amalia,

Nyuk, Mariza Oktaviana, Eka Sri Mailya, yang telah membantu dan memberikan motivasi yang tiada henti untuk penulis sehingga menjadi sebuah karya ilmiah.

5. Kepada teman-teman Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam Angkatan 2015 yang telah banyak membantu penulis dari masa kuliah, penelitian, hingga selesainya skripsi ini. Penulis belum bisa memberikan apapun untuk membalas kebaikan dan ketulusan yang kalian berikan. Hanya untaian doa setelah sujud yang bisa penulis kirimkan semoga Allah membalas kebaikan kalian semua.

Akhir kata penulis memohon maaf atas segala kekhilafan yang pernah penulis lakukan. Penulis juga menyadari bahwa dalam penelitian dan penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan. Untuk itu, penulis mengharapkan masukan dan saran untuk perbaikan dimasa yang akan datang. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi penulis dan seluruh pembaca umumnya. Hanya kepada Allah penulis memohon Ridha-Nya. Amin ya Allah.

Banda Aceh, 15 Juli 2020  
Penulis,

Rayyan Sofyan  
NIM. 150401019

## ABSTRAK

Skripsi “**Analisis Framing Model Murray Edelman Pada pemberitaan pemilihan presiden 2019 di serambinews.com dengan republik.co.id**”. menelaah bagaimana media online Serambinews.com dan Republik.co.id membingkai pemberitaan pilpres 2019 sebelum dilaksanakannya kampanye pada edisi September 2018. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana media *Serambinews.com* dan *Republika.co.id* mengkonstruksi realitas dalam pemberitaan pemilihan presiden 2019 periode September 2018, dan Untuk mengetahui faktor yang membentuk perspektif wartawan ketika menyeleksi isu. Metodologi yang digunakan bersifat kualitatif dan verifikatif dengan teknik analisis *framing*. Hasil penelitian menunjukkan pemberitaan media Serambinews.com tampak mendukung pasangan calon presiden nomor urut 01 ada lima berita dan Berita yang tampak cenderung pada pihak pasangan calon presiden nomor urut 02 ada dua berita. Sedangkan selebihnya, ada tiga berita yang tidak cenderung ke pihak manapun. Sedangkan hasil dari analisis pemberitaan di media Republik.co.id bahwa pemberitaan *Republika.co.id* terkait pemilu presiden 2019 edisi September 2018 terdapat dua berita yang mengarah pada tim pemenangan Prabowo-Sandi, dua berita yang mengarah pada pihak KPU terkait berita jumlah data DPT yang dirilis, dan terdapat satu berita yang tidak mengandung unsur memihak kelompok manapun. Dari kedua media tersebut juga dapat disimpulkan bahwa faktor yang membentuk perspektif wartawan dalam menyeleksi isu pada media bersumber dari faktor bergabungnya sejumlah pemilik media ke salah satu kubu capres pada pilpres lalu, semakin menunjukkan adanya kecenderungan kuat media membuat agenda setting dan *framing* berita sampai sekarang ini semakin masif dan terstruktur. Rekomendasi dari peneliti untuk peneliti selanjutnya, agar penelitian mengenai analisis *framing* ini dapat menjadi acuan untuk penelitian-penelitian selanjutnya, agar menghasilkan penelitian yang lebih bagus dan berkembang.

**Kata Kunci :** *Analisis Framing, Model murray Edelman, pemilihan Presiden 2019*



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	iv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
<b>BAB II KAJIAN TEORITIS</b> .....	<b>6</b>
A. Pemahaman Framing .....	6
B. Media.....	9
1. Media Massa .....	9
2. Media online .....	10
3. Khalayak media .....	11
4. Kekuatan Media.....	12
C. Ciri-ciri Jurnalisme.....	12
1. Skeptis.....	12
2. Bertindak.....	13
3. Berubah.....	13
4. Seni dan Profesi .....	13
5. Peran Pers .....	14
D. Sembilan Prinsip Jurnallisme .....	15
1. Kebenaran .....	15
2. Loyalitas.....	16
3. Verifikasi .....	16
4. Independen.....	22
5. Kontrol Sosial dan Pro Masyarakat Tertindas .....	23
6. Forum Kritik untuk Publik.....	24
7. Menarik dan Relevan.....	25
8. Komprehensif dan Proporsional .....	26
9. Mengikuti Hati Nurani.....	27
E. Jurnalisme Islam.....	28
1. Tabayyun .....	28
2. Islam Mengajarkan Independensi .....	29
3. Aturan Lebih Dari Dua Narasumber.....	29
4. Larangan Pemberitaan dalam Islam.....	32
F. Konstruksi Realitas Politik dalam Media Massa.....	33

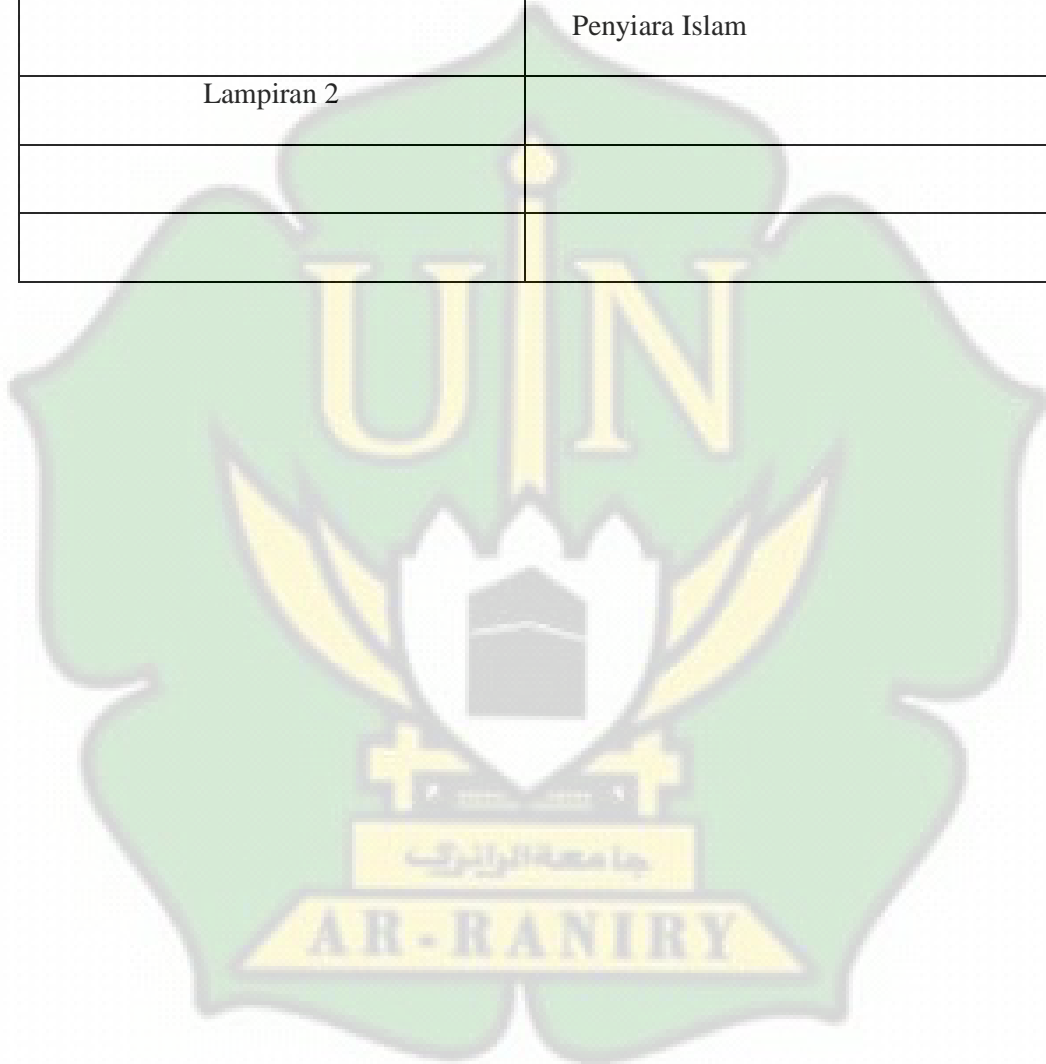
1. Karakteristik Liputan Politik .....	33
2. Sistem Operasi Media Massa dan Konstruksi Realitas Politik .....	34
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>35</b>
A. Metode Penelitian.....	35
B. Lokasi Penelitian .....	37
C. Batasan Masalah.....	37
D. Sumber Data .....	38
E. Teknik pengumpulan Data. ....	39
1. Teknik Dokumentasi.....	39
2. Teknik Observasi .....	39
F. Teknik Analisis Data.....	39
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>41</b>
A. Hasil Analisis <i>Framing</i> Media Serambi.....	41
B. Hasil Analisis <i>Framing</i> Media Republika.....	90
C. Hasil Analisis <i>Framing</i> Serambinews.com dan Republika.co.id .....	120
1. Tabel 5.1. Hasil Analisis <i>Framing</i> Serambinews.com .....	120
2. Tabel 5.2. Hasil Analisis <i>Framing</i> Republika.co.id .....	122
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>123</b>
A. Kesimpulan.....	123
B. Saran.....	124
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>125</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Pola Kategorisasi Konsep Muray Edelman.....	9
Tabel 4.1.	Pola Kategorisasi Serambi.....	49
Tabel 4.2.	Pola Kategorisasi Serambi.....	53
Tabel 4.3.	Pola Kategorisasi Serambi.....	57
Tabel 4.4.	Pola Kategorisasi Serambi.....	66
Tabel 4.5.	Pola Kategorisasi Serambi.....	71
Tabel 4.6.	Pola Kategorisasi Serambi.....	74
Tabel 4.7.	Pola Kategorisasi Serambi.....	79
Tabel 4.8.	Pola Kategorisasi Serambi.....	84
Tabel 4.9.	Pola Kategorisasi Serambi.....	87
Tabel 4.10.	Pola Kategorisasi Serambi.....	91
Tabel 4.11.	Pola Kategorisasi Republika.....	96
Tabel 4.12.	Pola Kategorisasi Republika.....	103
Tabel 4.13.	Pola Kategorisasi Republika.....	112
Tabel 4.14.	Pola Kategorisasi Republika.....	116
Tabel 4.15.	Pola Kategorisasi Republika.....	121
Tabel 5.1.	Hasil Analisis <i>Framing</i> Serambinews.com.....	122
Tabel 5.2.	Hasil Analisis <i>Framing</i> Republika.co.id .....	12

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: Surat Keputusan Petunjuk Skripsi Mahasiswa Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Prodi Komunikasi Dan Penyiaran Islam
Lampiran 2	



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Analisis adalah kegiatan seperti mengurai, memilah, atau membedakan sesuatu untuk dikumpulkan kembali menurut kriteria tertentu kemudian dicari kaitannya dan ditafsirkan maknanya. Framing itu sendiri berasal dari kata Frame yang berarti bingkai atau jendela. Dalam pembahasan ini, Frame berfungsi sebagai alat untuk menganalisa sebuah realitas yang dibingkai oleh media dan disajikan untuk menarik perhatian khalayak serta dikemas dalam bentuk berita. Artinya, fakta-fakta yang terdapat dalam berita itu dapat diseleksi dengan cara menambah dan mengurangi beberapa bagian yang dianggap perlu untuk menjadikan makna dari berita tersebut lebih menyentuh dan menarik pembaca.

Melihat bagaimana bingkai yang digunakan oleh media dalam menggiring opini khalayak, teknik analisis framing menjadi salah satu alternatif model analisis yang dapat mengungkapkan rahasia dibalik sebuah perbedaan bahkan pertentangan media dalam pengungkapan fakta. Melalui analisis framing akan dapat diketahui siapa mengendalikan siapa, siapa diuntungkan dan siapa yang dirugikan, siapa menindas dan siapa tertindas, dan seterusnya. Kesimpulan-kesimpulan seperti ini sangat mungkin diperoleh karena analisis framing merupakan suatu kreativitas yang memiliki kebebasan dalam menafsirkan realitas dengan menggunakan teori dan metodologi tertentu. Ada dua hal pokok dari analisis framing yaitu, pertama, bagaimana peristiwa dimaknai. Ini berhubungan

dengan bagian mana yang diliput dan bagian mana yang tidak diliput. Kedua, bagaimana fakta ditulis. Aspek ini berhubungan dengan pemakaian kata, kalimat, dan gambar yang digunakan untuk mendukung gagasan.

Murray Edelman mensejajarkan framing sebagai kategorisasi. Pemakaian perspektif tertentu dengan pemakaian kata-kata yang tertentu pula yang menandakan bagaimana fakta atau realitas dipahami. Kategorisasi dalam pandangan Edelman, merupakan abstraksi dan fungsi dari pikiran. Sehingga dapat membantu manusia memahami realitas yang beragam dan tidak beraturan tersebut menjadi realitas yang mempunyai makna. Tetapi, kategorisasi bisa berarti juga suatu penyederhanaan, realitas yang kompleks dan berdimensi banyak dipahami dan ditekankan pada satu sisi atau jadi tidak terliput.

Zaman sekarang ini yang mengikuti arus globalisasi membawa pengaruh yang sangat besar bagi sistem komunikasi Indonesia, hal ini ditandai dengan munculnya berbagai bentuk media massa. Selain media massa cetak dan media massa elektronik namun hadir media online yang menjadi gabungan dari jenis media massa yang telah ada sebelumnya. Dengan kecanggihan dan kemudahan yang ditawarkan media online membuat masyarakat kini lebih memilih media tersebut dari pada media cetak untuk keperluan informasinya. Itu karena, sajian informasi yang dihidangkan oleh media online lebih cepat dan bisa diakses dimanapun dan kapanpun. Sedangkan informasi peristiwa yang disajikan oleh media cetak, seperti koran, baru bisa dibaca minimal sehari setelah peristiwa berlangsung.

Pemberitaan mengenai pilpres (pemilihan presiden) tahun 2019 ini telah diberitakan sebelum pilpres terlaksana pada tanggal 17 April 2019 di berbagai media cetak maupun media online. Berbagai peristiwa yang terjadi sebelumnya banyak menuai kontroversi yang bermacam-macam. Media pada era globalisasi dan kemajuan teknologi sekarang ini memiliki peranan penting dalam kesuksesan dan keberhasilan suatu tujuan politik yang ditetapkan. Dari perkembangan situasi politik yang ada saat ini, persaingan yang ramai justru terjadi lewat jaringan media massa baik cetak, elektronik ataupun media internet.

Faktor lain yang menjadi alasan mengapa suatu media menggiring opini publik melalui berita yang disebarakan adalah tokoh yang sangat berpengaruh dibalik layar dalam sebuah media. Selama dia ada kaitan dengan dunia politik atau tergabung dalam timses salah satu kubu capres. Tokoh-tokoh yang berlomba-lomba untuk membangun publisitas lewat media yang ada ialah Joko Widodo dengan nomor urut capres 01 dan Prabowo Subianto dengan nomor urut capres 02.

Peneliti melakukan penelitian pada media Serambinews.com sebagai media lokal yang masyhur dikalangan masyarakat Aceh. Dan media Republika.co.id sebagai media nasional untuk mengetahui framing seperti apa yang digunakan oleh dua media tersebut. Dalam periode pemberitaan bulan Agustus. Penelitian berjudul analisis framing model Murray Edelman pada pemberitaan pemilihan umum 2019 di Serambinews.com dengan Republika.co.id.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana konstruksi realitas (framing) yang dibentuk media Serambinews.com dan Republika.co.id dalam pemberitaan pemilihan presiden 2019 periode September 2018?
2. Faktor apa yang membuat atau cara pandang yang digunakan oleh media dalam memberitakan isu pemilu presiden 2019?
3. Bagaimana penerapan model Murray Edelman terhadap analisis framing dalam media Serambinews.com dan Republika.co.id periode Agustus 2018?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana media Serambinews.com dan Republika.co.id mengkonstruksi realitas dalam pemberitaan pemilihan presiden 2019 periode September 2018.
2. Untuk mengetahui faktor yang membentuk perspektif wartawan ketika menyeleksi isu.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi, memperluas, dan memperkaya pengetahuan dalam bidang Ilmu Komunikasi. Sekaligus berguna bagi pengembangan Ilmu Komunikasi khususnya bidang Jurnalistik mengenai framing dalam pemberitaan. Memberikan informasi dan



referensi khususnya bagi para mahasiswa Ilmu Komunikasi yang mengadakan penelitian sejenis.

## 2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan dapat dijadikan acuan bagi para praktisi jurnalistik di redaksi media online Serambinews.com dan Republika.co.id untuk dapat melihat dan mengidentifikasi Frame berita pada setiap pemberitaan di media.



## BAB II KAJIAN TEORITIS

### A. Pemahaman Framing

*Framing/Frame* berarti bingkai. Dalam pembahasaan ini, *framing* merupakan bingkai yang berfungsi untuk melihat realitas media atau dunia dari sebuah peristiwa yang disajikan untuk menarik perhatian khalayak. Maknanya, peristiwa yang dikemas dalam wujud berita dapat diseleksi dengan cara menambah dan mengurangi beberapa bagian yang dianggap perlu untuk menjadikan makna dari peristiwa lebih menyentuh dan menarik dibaca khalayak. Artinya, *framing* adalah sudut pandang media dalam melihat kejadian / peristiwa.

Analisis *framing* merupakan versi terbaru dari pendekatan analisis wacana, khususnya untuk menganalisis teks media. Dikutip dari Sudibyo bahwa gagasan mengenai *framing*, pertama kali dilontarkan oleh Beterson tahun 1955. Mulanya, *Frame* dimaknai sebagai struktur konseptual atau perangkat kepercayaan yang mengorganisir pandangan politik, kebijakan, dan wacana serta yang menyediakan kategori-kategori standar untuk mengapresiasi realitas. Konsep ini kemudian dikembangkan lebih jauh oleh Goffman pada 1974, yang mengandaikan *Frame* sebagai kepingan-kepingan perilaku yang membimbing individu dalam membaca realitas.<sup>1</sup>

Mengapa peristiwa ini diberitakan sementara itu tidak? mengapa sisi ini diberitakan sisi itu luput dalam pemberitaan? Mengapa aspek ini ditonjolkan oleh media sementara aspek lain dihilangkan? Mengapa bagian ini dijelaskan rinci,

---

<sup>1</sup> Alex Sobur, *Analisis Teks Media: Suatu Pengantar Untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing*, Cet. 5 (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), Hal. 161- 162.

sedangkan yang lain dikaburkan? Semua pertanyaan itu mengarah kepada konsep yang disebut *framing* atau pembedaan.<sup>2</sup>

Beberapa model *framing* yang digunakan oleh peneliti analisis *framing* terhadap media. yaitu model William A. Gamson, Robert N. Entman, Murray Edelman, Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki. Masing-masing model tersebut hampir sama namun metode dan cara pandang dari setiap model berbeda.

William A. Gamson adalah salah satu ahli yang paling banyak menulis mengenai *framing*.<sup>3</sup> Pandangannya mengenai *framing* ini merupakan cara bercerita atau gugusan ide yang terorganisir sedemikian rupa dan menghadirkan konstruksi makna peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan objek suatu wacana. Cara bercerita itu terbentuk dalam sebuah kemasan. Kemasan itu semacam skema atau struktur pemahaman yang digunakan individu untuk mengkonstruksi makna pesan-pesan yang ia sampaikan, serta untuk menafsirkan makna pesan yang diterima.<sup>4</sup>

Robert N. Entman, pandangannya bahwa *framing* adalah proses seleksi dari berbagai aspek realitas sehingga bagian tertentu dari peristiwa itu lebih menonjol dibandingkan aspek lain. Ia juga menyertakan penempatan informasi-informasi dalam konteks yang khas sehingga sisi tertentu mendapatkan alokasi lebih besar daripada sisi yang lain.<sup>5</sup>

Zhongdang Pan dan Gerald Kosicki menurut pandangannya terhadap *framing*, ada dua konsepsi dari *framing* yang saling berkaitan. Pertama, dalam

---

<sup>2</sup> Eriyanto, *Analisis Framing: konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*, cet.3 (Yogyakarta: LKIS, 2005), Hal. 2.

<sup>3</sup> *Ibid*, hal. 217.

<sup>4</sup> *Ibid*. Hal. 67.

<sup>5</sup> *Ibid*. Hal. 67.

konsepsi psikologi. *Framing* dalam konsep ini lebih menekankan pada bagaimana seseorang memproses informasi dalam dirinya. *Framing* disini dilihat sebagai penempatan informasi dalam suatu konteks yang unik/khusus dan menempatkan elemem tertentu dari suatu isu dengan penempatan lebih menonjol dalam kognisi seseorang. Kedua, konsepsi sosiologis. Kalau pandangan psikologis lebih melihat pada proses internal seseorang, bagaimana individu secara kognitif menafsirkan suatu peristiwa dalam cara pandang tertentu, maka pandangan sosiologis lebih melihat pada bagaimana konstruksi sosial atas realitas. *Frame* disini dipahami sebagai proses bagaimana seseorang mengklasifikasikan, mengorganisasikan, dan menafsirkan pengalaman sosialnya untuk mengerti dirinya dan realitas di luar dirinya.<sup>6</sup>

Murray Edelman, gagasan Edelman mengenai *framing* adalah apa yang kita ketahui tentang realitas atau tentang dunia tergantung pada bagaimana kita membingkai dan mengkonstruksi/menafsirkan realitas. Realitas yang sama bisa jadi akan menghasilkan realitas yang berbeda ketika realitas tersebut di dibingkai dengan cara yang berbeda.<sup>7</sup>

Edelman mensejajarkan *framing* sebagai kategorisasi. Pemakaian perspektif tertentu dengan pemakaian kata-kata yang tertentu pula menandakan bagaimana fakta atau realitas dipahami. Kategori, membantu manusia memahami realitas yang beragam dan tidak beraturan tersebut menjadi realitas yang mempunyai makna.<sup>8</sup> Kategorisasi pada dasarnya dapat menjadi sebuah alat yang berfungsi untuk menyederhanakan realitas dan dunia yang kompleks menjadi

---

<sup>6</sup> *Ibid.* Hal .252 – 253.

<sup>7</sup> *Ibid.* Hal .155.

<sup>8</sup> *Ibid.* Hal .156.

sederhana dan mudah dipahami. Realitas dan dunia yang kompleks tersebut coba disederhanakan dengan kategori tertentu yang menolong khalayak untuk mengerti dan memahami dunia tersebut. Namun, dengan metode kategorisasi yang dilakukan tersebut bukan menghasilkan realitas yang sebenarnya melainkan lebih menunjukkan pada apa dan siapa yang diuntungkan dan apa atau siapa yang dirugikan.

Bahasa politik seringkali bias, karena kata dan bahasa yang dipakai adalah bahasa yang bukan menggambarkan realitas sebenarnya. Lewat klasifikasi itu, khalayak diajak untuk berpikir bagaimana realitas seharusnya dipahami dan dipelajari sehingga apa yang terlihat objektif oleh khalayak, sebetulnya hanya permainan atau refleksi ideologi semata.<sup>9</sup>

**Tabel 2.1. Pola Kategorisasi konsep Muray Edelman**

<b>ELEMEN</b>		
<b>FRAME</b>		
<b>PIHAK KITA</b>		
<b>PIHAK MEREKA</b>		

## **B. Media**

### **1. Media Massa**

Media massa adalah seperangkat alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan dari sumber kepada khalayak seperti melalui surat kabar, film, radio, Televisi. Dewasa ini, media tersebut juga berkembang

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hal. 165.

kecanggihannya dalam menyampaikan informasi kepada khalayak dengan cepat dan bisa diakses kapan dan dimana saja, yaitu media online yang dapat diakses menggunakan jaringan internet.

Terkadang pengertian media ini cenderung lebih dekat terhadap sifatnya yang massa karena terlihat dari berbagai teori yang muncul dalam komunikasi massa, namun semua definisi yang ada memiliki kecenderungan yang sama bahwa ketika disebutkan kata “media”, yang muncul bersamaan dengan itu adalah sarana disertai dengan teknologinya.<sup>10</sup>

## 2. Media online

Media online adalah bagian dari media massa yang berbasis telekomunikasi menggunakan jaringan internet melalui situs web, portal, radio online (*streaming*), TV online, berita online, mail online atau apapun itu yang menggunakan jaringan internet disebut dengan media online.

Internet adalah jaringan komputer yang terhubung secara internasional dan tersebar di seluruh dunia. Internet merupakan media komunikasi berbasis komputer teknologi informasi. Internet banyak dipilih oleh perusahaan untuk menjalin kemampuan dalam menjangkau khalayak.<sup>11</sup>

Karakteristik yang dimiliki media online ini dapat dipandang dari dua sisi yaitu positif dan negatif. seperti kecepatan informasi dari media online, khalayak dapat mengetahui informasi yang ada pada situs portal berita langsung disaat berita itu diterbitkan tanpa harus menunggu besok. Disisi yang lain, dengan

---

<sup>10</sup> Dr.Rully Nashrullah, M.Si, *Media Sosial (Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sositoteknologi)*, Bandung : Simbiosis Rekatama Media, 2017.

<sup>11</sup> Suryanto, *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Bandung: Pustaka Setia, 2015.

kecepatan informasi dari media online ini, berita yang diterbitkan tidak dijamin kebenarannya. Karena sifat cepatnya, berita tersebut kurang lengkap karena lebih mengutamakan aktualisasi.

Namun demikian, karakteristik informasi yang dapat di *update* juga dapat menutupi kekurangan dari sifat diatas. Artinya, jika ada kesalahan dalam pemberitaan tersebut, dapat langsung di edit atau melakukan pembaruan informasi terkait secara langsung. Tidak harus menunggu terbitan selanjutnya seperti dalam media cetak.

Bentuk konten yang ditawarkan media online ini juga beragam jenisnya, yaitu seperti teks, gambar, video, maupun audio. Khalayak dapat menikmati informasi yang ada dalam beberapa bentuk. Dapat membaca teks berita, serta dapat langsung melihat situasi sebuah peristiwa yang dikemas dalam bentuk video.

### **3. Khalayak media**

Khalayak media juga perlu di perhatikan, karena khalayak massa inilah yang menjadi sorotan utama media dalam menggiring opini dalam sebuah pemberitaan. Terkait dengan ini, disebutkan bahwa para analisis media telah mengembangkan beberapa model efek media. Model pertama yaitu *The Hypodermic Needle Model*, kemudian disusul oleh model *Two-Step Flow, Uses & Gratifications* dan *Reception Theory*. *The Hypodermic Needle Model*, dibuat pada tahun 1920-an. Teori inilah yang pertama kali mencoba menjelaskan bagaimana khalayak massa “*might react to mass media*”. Teori ini menunjukkan bahwa, sebagai penonton, kita dimanipulasi oleh pembuat teks media itu sendiri bahwa

perilaku kita dan pemikiran kita mungkin dengan mudahnya diubah oleh pembuat media. Asumsinya adalah khalayak itu pasif dan beragam jenisnya.<sup>12</sup>

#### **4. Kekuatan Media**

Media massa atau pers itu mempunyai kekuatan yang dahsyat. Sampai-sampai Napoleon Bonaparte mengatakan “Jika media dibiarkan saja, saya tidak akan bisa berkuasa lebih dari tiga bulan”. Ini membuktikan bahwa media punya kekuatan besar. berbagai bentuk pelarangan pemerintah, intimidasi, dan perusakan kantor, media membuktikan bahwa pers menakutkan bagi mereka yang mempunyai masalah dan takut kecurangannya terbongkar. Dengan kata lain, dampak media sangat ampuh.<sup>13</sup>

### **C. Ciri-ciri Jurnalisme**

#### **1. Skeptis**

Skeptis ini adalah sifat ke-ingintahuan mendalam. Sikap seperti inilah yang seharusnya dapat pada setiap pekerja jurnalistik dalam mencari kebenaran dari sebuah peristiwa. Artinya, wartawan yang bersikap seperti ini, tidak serta merta mempercayai informasi yang didapat sebelum ia mencari kebenaran secara langsung.

---

<sup>12</sup> Jurnal Studi Komunikasi Dan Media Media Massa, Khalayak.... Vol. 16 No. 1 (Januari-Juni 2012)

<sup>13</sup> Nurudin, *Hubungan Media (konsep dan aplikasi)*, Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2008.



*Tom friedman* dari *New York Times* mengatakan bahwa skeptis adalah sikap untuk selalu mempertanyakan segala sesuatu, meragukan apa yang diterima, dan mewaspadaai segala kepastian agar tidak mudah ditipu.<sup>14</sup>

## **2. Bertindak**

Bertindak atau *action* adalah corak kerja seorang wartawan.<sup>15</sup> Dengan cara wartawan terjun langsung ke lapangan untuk melihat dan mengamati peristiwa yang terjadi sebagai pengamat pertama adalah lebih baik, dibandingkan hanya duduk diruang redaksi. Seperti halnya peristiwa tidak terjadi di ruang redaksi, ia terjadi diluar.<sup>16</sup>

## **3. Berubah**

Berubah adalah salah satu elemen penting dalam jurnalisme. Wartawan menulis informasi/berita dengan tujuan melakukan perubahan dari apa yang sebelumnya diberitakan. Sebagaimana fungsi jurnalisme itu sendiri adalah sebagai sarana kritik bagi instansi-instansi atau lembaga-lembaga yang menimbulkan kecurangan didalam sistem kepengurusannya. Wartawan melihat dari sudut pandang jurnalistik. Dalam pengertian yang luas, jurnalisme itu mendorong terjadinya perubahan. Perubahan memang merupakan hukum utama jurnalisme.<sup>17</sup>

## **4. Seni dan Profesi**

Seni dan profesi bagian dari jurnalisme ini berarti, tidak hanya menulis menurut apa yang dilihat saja dari sebuah peristiwa, wartawan juga harus bisa

---

<sup>14</sup> Ishwara Luwi, *Seri Jurnalistik Kompas: catatan-catatan Jurnalisme Dasar: cet.1* (Jakarta: PT Kompas MediaNusantara, Juli 2005), Hal. 1.

<sup>15</sup> *Ibid*, Hal.3

<sup>16</sup> *Ibid*, Hal.3

<sup>17</sup> *Ibid*, Hal. 4

menggunakan seni pandangan dalam melihat aspek-aspek unik dari sebuah peristiwa tersebut. Jurnalisme bukanlah tentang menulis saja. Anda belajar tentang “apa sesungguhnya mencari itu dan apa sebenarnya bertanya mengenai hal-hal pelik dengan kegigihan.”<sup>18</sup>

## 5. Peran Pers

Pers memainkan berbagai peranan dalam masyarakat. Bernard C.Cohen dalam *advanced Newsgathering* karangan Bryce T. McIntyre menyebutkan bahwa beberapa peran yang umum dijalankan pers diantaranya sebagai pelapor (*informer*). Di sini pers bertindak sebagai mata dan telinga publik, melaporkan peristiwa-peristiwa yang diluar pengetahuan masyarakat dengan netral dan tanpa prasangka.<sup>19</sup>

Dari ciri-ciri Jurnalisme diatas adalah bertujuan untuk menghasilkan produk jurnalistik yaitu berita yang baik dan benar sesuai ketentuan hakikat dari sebuah berita itu sendiri.

Bagi Robert scheer dari Los Angeles Times, pertanyaan yang lebih penting adalah bukan apakah anda bisa netral tetapi bagaimana anda mengerjakan pekerjaan anda dengan cara yang adil dan jujur. Dalam hal ini, surat kabar Washington post mempunyai standar mengenai sikap adil. Yaitu :

- a. Berita itu tidak adil bila mengabaikan fakta yang penting. Jadi adil adalah lengkap.

---

<sup>18</sup> *Ibid, Hal. 7*

<sup>19</sup> Lih. Bryce T. McIntyre, *Advanced Newsgathering* (New York: Praeger Publishers, 1991) hal.8 dalam Ishwara Luwi, *Seri Jurnalistik Kompas: catatan-catatan Jurnalisme Dasar: cet.1* (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, Juli 2005), Hal. 7.

- b. Berita itu tidak adil bila dimasukkan informasi yang tidak relevan. Jadi adil adalah relevansi.
- c. Berita itu tidak adil bila secara sadar maupun tidak membimbing pembaca kearah yang salah atau menipu. Jadi adil adalah jujur.
- d. Berita itu tidak adil bila wartawan menyembunyikan prasangka atau emosinya dibalik kata-kata halus yang merendahkan. Jadi adil adalah keterusterangan.

#### **D. Sembilan Prinsip Jurnallisme**

##### **1. Kebenaran**

Keinginan agar informasi merupakan kebenaran adalah elementer. Berita adalah materi yang digunakan orang untuk mempelajari dan berpikir tentang dunia luar diri mereka. Maka kualitas terpenting berita adalah bisa digunakan dan diandalkan.<sup>20</sup>

“Kebenaran jurnalistik” ini adalah lebih dari sekedar akurasi. Ini adalah pekerjaan sortir yang berkembang antara cerita pertama dan interaksinya di tengah publik, pembuat berita, dan wartawan sepanjang waktu. Prinsip pertama jurnallisme ini pengejaran kebenaran tidak berat sebelah adalah yang paling membedakannya dari semua bentuk komunikasi lain.<sup>21</sup>

Dengan melakukan cara pengumpulan data dan verifikasi fakta terhadap suatu isu, maka itulah makna yang sebenarnya dari “kebenaran” yang dimaksud dalam dunia jurnalistik.

---

<sup>20</sup> Bill Kovach dan Tom Resenstiel, *Elemen-Elemen Jurnallisme...*, Hal. 39.

<sup>21</sup> *Ibid*, Hal. 44

## 2. Loyalitas

Prioritas komitmen kepada warga masyarakat ini adalah basis kepercayaan sebuah organisasi berita. Media harus dapat mengatakan dan menjamin kepada *audiences*-nya bahwa liputan itu tidak diarahkan demi kawan dan pemasang iklan. Kepercayaan inilah yang membangun *audiences* yang luas dan setia. Pada saatnya, sukses ekonomi akan menyusul kemudian.<sup>22</sup>

Tak dapat dipungkiri bahwa wartawan bekerja kepada media yang mempunyai kepentingan tersendiri, namun prioritas utama wartawan dalam bekerja adalah mengumpulkan informasi yang sebenar-benarnya untuk di ketahui publik, memenuhi rasa ingin tahu publik, dan melayani publik.

Dengan mementingkan kepentingan warga sebagai konsumen berita, wartawan kepercayaan menjadi unsur paling penting dalam membangun media tersebut.

## 3. Verifikasi

Disiplin verifikasi adalah hakikat jurnalistik yang membedakannya dari isu, gosip, rumor, propaganda, atau seni. Wartawan harus melakukan cek dan ricek, konfirmasi, memastikan kebenaran sebuah peristiwa.

Disiplin verifikasi berfokus untuk menceritakan apa yang sebenar-benarnya terjadi. Dalam kaitan dengan apa yang sering disebut sebagai “obyektivitas” dalam jurnalisme, maka yang obyektif sebenarnya bukanlah jurnalisnya, tetapi metode yang digunakannya dalam meliput berita.

---

<sup>22</sup> Ishwara Luwi, *Seri Jurnalistik Kompas: Catatan-Catatan Jurnalisme Dasar*: cet.1 (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, Juli 2005), Hal. 10.

Saat kami menyimak dan mempelajari masukan-masukan para wartawan, para warga, dan pihak lain yang punya pemikiran tentang berita, kami mulai melihat seperangkat konsep inti yang membentuk landasan disiplin verifikasi. Lima hal ini juga prinsip intelektual dari sebuah laporan ilmiah:

- a. Jangan pernah menambahi sesuatu yang tidak ada.
- b. Jangan pernah menipu *audiens*.
- c. Berlakulah setransparan mungkin tentang metode dan motivasi anda.
- d. Andalkan reportase anda sendiri.
- e. Bersikaplah rendah hati.<sup>23</sup>

Berita yang disampaikan kepada publik juga harus bersifat transparan dan berimbang. Berimbang yang dimaksud dalam jurnalisme adalah bukan sesuatu yang bisa dihitung secara matematis, seperti yang diketahui wartawan bahwa ada lebih dari dua pihak narasumber dalam satu masalah. Padahal membuat mereka berimbang kadang malah tidak menggambarkan realitas yang sebenarnya. Sikap tidak berat sebelahpun bukan diartikan bahwa wartawan mengatakan “Apakah berita saya terlihat tidak berat sebelah?” Tapi, tidak berat sebelah yang dimaksud lebih kepada berlaku adil terhadap fakta yang ada dan adil terhadap pemahaman masyarakat terhadap fakta-fakta tersebut. Bukan malah menggiring pemahaman masyarakat kepada fakta yang difahami si wartawan<sup>24</sup>.

Ada beberapa teknik verifikasi yang ditawarkan Bill Kofack dan Resenstiel. Teknik ini bersumber dari metode konkrit dari seluruh wartawan di dunia:

---

<sup>23</sup> Bill Kovach dan Tom Resenstiel, *Elemen-Elemen Jurnalisme...*, Hal. 95-96.

<sup>24</sup> *Ibid.* Hal. 94-95.

a. Penyuntingan yang Skeptis

Pendekatan ini melibatkan proses menimbang dan memutuskan, sebuah cerita, alhasil, baris demi baris harus dicermati, pernyataan demi pernyataan, menyunting pertanyaan dalam tulisan sebagaimana halnya fakta. Bagaimana kita tahu ini, mengapa pembaca harus mengetahui ini, apa asumsi di balik kalimat ini, jika tulisan ini menyebut bahwa sebuah peristiwa tertentu mungkin menimbulkan pertanyaan di benak orang, siapa yang menyebutkan hal ini? Seorang reporter? Seorang sumber? Seorang warga?<sup>25</sup>

Penyunting ini ditunjukkan kepada redaktur pelaksana. Berdasarkan beberapa pengalaman wartawan senior dari beberapa media terkemuka. Satu diantaranya Amanda Bennet, redaktur pelaksana *Oregonian*. Dia mengatakan, penyuntingan skeptis ini ditujukan untuk menyaring kesalahan yang tidak disengaja dari pernyataan dan penuturan si narasumber maupun kesilapan si wartawan saat menuliskan berita asumsi pribadi ikut serta dalamnya. Itu sebabnya, untuk menghilangkan kecenderungan tersebut, redaktur pelaksana seperti yang disampaikan Bennet, harus skeptis terhadap tulisan wartawan hingga proses penerbitan berita, atau lebih tepatnya redaktur juga harus melakukan disiplin verifikasi terhadap wartawannya.

Daftar pemeriksaan akurasi yang dihadirkan oleh redaktur eksekutif *San Jose Mercury News*, David Yarnold. Ada tujuh daftar pertanyaan yang harus dijawab saat memeriksa tulisan wartawan :<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> *Ibid.* Hal. 108.

<sup>26</sup> *Ibid.* Hal. 109.

- 1) Apakah paragraf pertama (*lead*) sudah cukup didukung oleh paragraf-paragraf sesudahnya ?
- 2) Adakah seseorang telah memeriksa ulang, menelepon, atau menghubungi semua sumber, alamat rumah atau kantor, alamat situs web yang tercantum dalam tulisan ? bagaimana nama dan gelar ?
- 3) Apakah materi latar belakang (*background*) diperlukan untuk memahami tulisan selengkapnya ?
- 4) Apakah semua pihak yang terlibat dalam tulisan sudah diidentifikasi dan apakah wakil-wakil dari berbagai pihak tersebut sudah dihubungi dan diberi kesempatan bicara ?
- 5) Apakah tulisan memihak atau membuat penghakiman yang tak kentara ?
- 6) Apakah ada sesuatu yang kurang ?
- 7) Apakah semua kutipan akurat dan sandangannya jelas, dan apakah kutipan-kutipan itu menangkap apa yang sesungguhnya dimaksudkan orang tersebut ?

Oleh Yarnold, daftar pemeriksaan itu di cetak dan ditempelkan dekat komputer wartawan. Terlihat sederhana, namun sangat membantu para wartawan untuk diteliti.<sup>27</sup>

#### b. Jangan Berasumsi

David protes, seorang profesor di *Medill School of Journalism di Northwestern University*, menggunakan berbagai kasus narapidana yang

---

<sup>27</sup> Bill Kovach dan Tom Resenstiel, *sembilan Elemen Jurnalisme...*, Hal. 110.

menunggu hukuman mati untuk mengajari murid-muridnya tentang pentingnya verifikasi terhadap apa yang diduga sebagai fakta. Diantara pelajaran tersebut. “Jangan mengandalkan ucapan pejabat atau laporan berita. Mendekatlah sebisa mungkin kepada sumber utama. Bertindaklah sistematis. Carilah bukti yang menguatkan.”<sup>28</sup>

#### c. Pensil Warna Tom French

French punya tes untuk memverifikasi setiap fakta yang ada dalam tulisannya. Sebelum ia menyerahkan karyanya, ia mengambil salinan tercetak dan meneliti tulisan itu baris demi baris dengan pensil warna, menorehkan tanda centang pada setiap fakta dan pernyataan di dalam tulisan untuk mengatakan pada dirinya sendiri bahwa ia harus memeriksa ulang untuk memastikan kebenarannya.<sup>29</sup>

#### d. Sumber Anonim

Sumber anonim itu sendiri adalah sumber yang tidak ingin identitas pribadinya di ungkap kepada publik. Anonim ini biasa kita temui dalam tulisan-tulisan karya sastra ataupun berita yang sering disebutkan sebagai “sumber terpercaya” untuk meyakinkan pembaca terhadap informasi yang diberikan oleh wartawan. Namun, dalam hal ini wartawan harus sangat berhati-hati dalam penggunaan sumber anonim tersebut karena dalam pembubuhan sumber anonim, tak semua narasumber bebas dijadikan anonim.

---

<sup>28</sup> Bill Kovach dan Tom Resenstiel, *sembilan Elemen Jurnalisme...*, Hal. 110.

<sup>29</sup> *Ibid.* Hal. 112.



Joe Leyveld, redaktur eksekutif *New York Times*, mensyaratkan reporter dan redaktur di *Times* untuk bertanya pada diri mereka sendiri dua hal sebelum menggunakan sumber anonim:<sup>30</sup>

- 1) Seberapa banyak pengetahuan langsung yang dimiliki sumber anonim terhadap suatu kejadian ?
- 2) Apa motif, jika ada, yang mungkin dipunyai sumber untuk menyesatkan kita, berpura-pura baik, atau menyembunyikan fakta penting, yang mungkin mengubah kesan kita terhadap informasi tersebut

Selain itu ada tujuh syarat yang dipaparkan oleh Kovach dan Rosenstiel dalam buku *Warp Speed* pada bab *The Rise of Anonymous Sourcing* mengenai syarat apa saja yang harus diperhatikan wartawan saat sumber informasi tersebut sebagai sumber anonim. Ketujuh syarat itu adalah:

- 1) Sumber itu berada pada lingkaran pertama. Artinya, dia adalah orang yang menyaksikan langsung peristiwa yang ingin kita laporkan, atau terlibat langsung dalam peristiwa tersebut. Bisa berupa pelaku, korban atau saksi mata.
- 2) Sumber itu terancam keselamatannya jika identitas diungkapkan pada berita yang kita tulis. Artinya, identitas itu akan mengancam keselamatan jiwanya dan keluarganya. Jika yang terancam hubungan sosial dan pekerjaannya tidak patut dipertanyakan lagi.

---

<sup>30</sup> *Ibid.* Hal. 113.

- 3) Penting menanyakan apa alasan si sumber menyampaikan informasi ini.
- 4) Kita harus lihat bagaimana integritas narasumber anonim ini.
- 5) Pembubuhan sumber anonim harus seizin atasan kita.
- 6) Gunakan dua sumber anonim untuk verifikasi informasi yang sama.
- 7) Dan yang terakhir adalah, buat perjanjian dengan sumber anonim bahwa jika informasi yang disampaikan ternyata menyesatkan wartawan maka keanonimannya dibatalkan.

Itulah ketujuh syarat narasumber dapat dijadikan anonim. Harsono juga menambahkan, biasanya orang yang ingin namanya tak disebut dalam penyampaianya sendiri biasa tidak tahu tujuh syarat di atas. Jadi, setelah menjelaskan syarat itu, biasanya mereka akan mengerti dan mau memberikan informasi dengan identitas lengkap.<sup>31</sup>

Itulah fungsi dari disiplin verifikasi agar informasi yang akan di publikasikan dapat diterima oleh publik tanpa menimbulkan kebingungan dari pembaca saat setelah dilakukannya proses cek dan ricek oleh wartawan.

#### **4. Independen**

Sikap independen yang harus ada pada setiap wartawan ini berlaku bahkan pada mereka yang bekerja di ranah opini, kritik, dan komentar. Independensi semangat dan pikiran inilah, dan bukannya netralitas yang harus diperhatikan sungguh-sungguh oleh wartawan.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Andreas Harsono, "Tujuh Kriteria Sumber Anonim", [www.andreasharsono.net](http://www.andreasharsono.net). 15 Februari, 2005. Diakses pada 5 September 2019.

<sup>32</sup> Bill Kovach dan Tom Resensiel, *sembilan Elemen Jurnalisme...*, Hal. 121.

Emosional adalah sikap yang harus dihindari oleh si wartawan dalam melakukan peliputan. Artinya harus ada jarak yang diciptakan wartawan dengan narasumber. Tidak terlalu dekat sehingga dapat membantu wartawan agar tidak mengurangi jiwa kritisnya dalam penyampaian berita.

#### **5. Kontrol Sosial dan Pro Masyarakat Tertindas**

Prinsip ini sering disalahpahami bahkan oleh wartawan, dengan mengartikan sebagai “susahkan orang yang senang.” Lebih lanjut, prinsip anjing penjaga jurnalisme (*watchdog*) ini tengah terancam dalam jurnalisme dewasa ini oleh penggunaannya yang berlebihan, dan oleh perang anjing penjaga palsu yang lebih ditunjukkan untuk menyajikan sensasi ketimbang pelayanan publik. Barangkali yang bahkan lebih serius lagi, peran anjing penjaga terancam oleh jenis baru konglomerasi perusahaan, yang secara efektif bisa merusak independensi yang dibutuhkan pers untuk menjalankan peran pemantau mereka.<sup>33</sup>

Sayangnya, pengertian pers hadir untuk “menyusahkan orang senang dan menyenangkan orang susah” membuat makna anjing penjaga disalah pahami sehingga memberikan citra liberal atau progresif. Konsep tersebut lebih dalam dan lebih bernuansa dari sekadar kata-kata menyusahkan atau menyenangkan. Seperti telah ditunjukkan sejarah kepada kita, peranan ini lebih tepat diartikan mengawasi sejumlah kecil kekuatan di dalam masyarakat atas nama orang banyak untuk mencegah terjadinya tirani.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> *Ibid.* Hal. 141.

<sup>34</sup> *Ibid.* Hal. 1443-144.

Prinsip anjing penjaga bermakna tak sekadar memantau pemerintahan, tapi juga meluas hingga pada semua lembaga yang kuat di masyarakat.<sup>35</sup> Tujuan peran anjing penjaga juga berkembang, ia tidak hanya menjadikan manajemen dan pelaksana kekuasaan transparan semata, tapi juga menjadikan akibat dari kekuasaan itu diketahui dan dipahami. Secara logis tersirat bahwa pers harus mengenali kapan lembaga kekuasaan bekerja secara efektif, dan kapan tidak.<sup>36</sup>

Dengan adanya elemen ini dalam bidang jurnalisme, masyarakat biasa dan sebagai warga yang berhak tahu bagaimana pemerintahannya bekerja, dapat memenuhi haknya serta dapat menyuarakan kepentingan-kepentingan masyarakat yang selama ini kurang di perhatikan nasibnya.

#### **6. Forum Kritik untuk Publik**

Segala bentuk laporan yang dilakukan oleh wartawan dapat menjadi forum bagi publik. Di sini, publik diingatkan mengenai masalah-masalah mereka. Laporan itu disampaikan wartawan untuk mendorong masyarakat memahami permasalahan dan mampu menilai serta mengambil sikap.<sup>37</sup>

Dewasa ini, media sosial juga sudah menjadi tempat atau wadah sumber informasi di kalangan masyarakat umum. Dimana informasi yang tersedia membuat pembaca harus memilah-milahnya sendiri. Semua informasi yang ada dapat di kritik atau di balas di kolom komentar yang tersedia. Sehingga menjadikannya tempat berdiskusi dan ber-opini. Namun, dengan kemudahan dan keterbukaan media saat ini, tidak membatasi para pengguna media sosial

---

<sup>35</sup> *Ibid.* Hal. 142.

<sup>36</sup> *Ibid.* Hal. 144.

<sup>37</sup> Bill Kovach dan Tom Resenstiel, *Sembilan Elemen Jurnalisme...*, Hal. 176.

berkomentar. Dimulai dengan sebagian orang yang pro atau kontra terhadap suatu isu yang dibahas sehingga memunculkan debat.

Namun kini ruang publik lebih banyak memunculkan debat publik dan menjadikannya jurnalisme semu dengan tujuan menghibur atau untuk provokasi semata. Munculnya jurnalisme semu disebabkan *talk show* tak mempunyai landasan fakta yang memadai. Lahirnya *talk show* seperti ini karena kata Kovach mendapatkan komentar-komentar lewat telepon dan disiarkan secara langsung biayanya jauh lebih murah dari pada melakukan reportase. Jurnalisme semu ini juga membahayakan demokrasi. Hadirnya bukan untuk mencerahkan, namun melahirkan perkelahian baru yang lebih sengit setelah debat usai.<sup>38</sup>

## 7. Menarik dan Relevan

Jurnalisme adalah bertutur dengan sebuah tujuan. Tujuannya adalah menyediakan informasi yang dibutuhkan orang dalam memahami dunia. Tantangan pertama adalah menemukan informasi yang dibutuhkan orang untuk menjalani hidup mereka. Kedua adalah, membuatnya bermakna, relevan, dan enak disimak.<sup>39</sup>

Aspek menarik dan relevan ini juga menjadi aspek yang penting dan harus diperhatikan oleh wartawan dalam menyampaikan informasi kepada pembaca. Membuat publik ingin untuk membacanya serta membawa kesan baik dan juga pemahaman yang baik pula kepada publik ketika membaca menjadi tujuan tersendiri bagi sebuah media yang ingin menaikkan rating pembaca. Namun

---

<sup>38</sup> Andreas Harsono, "Sembilan Elemen Jurnalistik", [www.andreasharsono.net](http://www.andreasharsono.net). 15 Februari, 2005. Diakses pada 5 September 2019.

<sup>39</sup> Bill Kovach dan Tom Resenstiel, *Sembilan Elemen Jurnalisme...*, Hal. 190.

dalam hal ini, wartawan yang melakukan reportase terhadap suatu isu juga tidak menyempitkan kepentingan publik dalam keakuratan fakta berita.

Dengan kata lain, tanggungjawab wartawan bukan sekadar menyediakan informasi, tapi menghadirkannya sedemikian rupa sehingga orang tertarik untuk menyimak. Kata Howard Rheingold, penulis dan mantan redaktur eksekutif majalah *online Hot Wired*. “Tantangan kami yang paling penting berkisar pada memilih apa yang akan membuat perhatian pembaca terjaga, banyak pembaca, yang bermacam jenisnya tetap terjaga”<sup>40</sup>

Wartawan bertugas membuat berita agar menarik perhatian dan relevan dengan kepentingan dan kebutuhan publik.

### **8. Komprehensif dan Proporsional**

Jurnalisme adalah kartografi modern. Ia menghasilkan sebuah peta bagi warga untuk mengarahkan persoalan masyarakat. Itulah manfaat dan alasan ekonomi kehadiran jurnalisme. Konsep kartografi ini membantu menjelaskan apa yang menjadi tanggung jawab liputan jurnalisme. Seperti halnya peta, nilai jurnalisme bergantung pada kelengkapan dan proporsionalitas.<sup>41</sup>

Mengutamakan jurnalisme sebagai pembuatan peta membantu kita melihat bahwa proporsi dan komprehensivitas adalah kunci akurasi. Hal ini tak hanya berlaku untuk sebuah berita. Sebuah halaman depan atau sebuah siaran berita yang lucu dan menarik tapi tak mengandung apapun yang signifikan adalah sebuah pemutar-balikkan. Pada saat yang sama, berita yang hanya berisi hal serius

---

<sup>40</sup> *Ibid.* Hal. 190.

<sup>41</sup> Bill Kovach dan Tom Resenstiel, *Sembilan Elemen Jurnalisme...*, Hal. 210-211.

dan penting, tanpa sesuatu yang ringan atau manusiawi, sama-sama tak seimbang.<sup>42</sup>

Intinya, pemberitaan yang dilakukan harus menyeluruh, meliputi semua unsur berita 5W+1H sehingga tidak menyisakan tanya dari pembaca. Jika ada sebuah isu yang menarik perhatian masyarakat saat itu, maka penjelasan harus merincikan alasan, sebab, pelaku, tempat, waktu dan cara.

### **9. Mengikuti Hati Nurani**

Wartawan diizinkan mendengarkan atau mengikuti hati nurani yang tidak bisa dibohongi atau takkan bohong. Wartawan punya pertimbangan pribadi tentang etika dan tanggung jawab sosial.

Setiap wartawan dari redaksi hingga dewan direksi harus punya rasa etika dan tanggung jawab personal sebuah panduan moral. Mereka punya tanggung jawab untuk menyuarakan sekuat-kuatnya nurani mereka dan membiarkan yang lain melakukan hal yang serupa.<sup>43</sup>

Keberanian dari seorang wartawan yang menentang pimpinan media tentang sebuah isu yang dinilai bertentangan dengan nuraninya ataupun dinilai tidak adil, harusnya dapat terjadi dalam rapat redaksi.<sup>44</sup> Seperti yang ditulis dalam resensinya, hal di atas tidaklah mudah karena ruang redaksi bukanlah tempat demokrasi dijalankan. Ruang redaksi malah terlihat seperti ruang kediktatoran. Bagaimanapun seseorang di puncak organisasi media memang harus bisa mengambil keputusan. Keputusan terkait menerbitkan atau tidak sebuah laporan,

---

<sup>42</sup> *Ibid.* Hal.211

<sup>43</sup> Bill Kovach dan Tom Resenstiel, *Sembilan Elemen Jurnalisme...* Hal. 234.

<sup>44</sup> Andreas Harsono, „Agama” Saya Adalah Jurnalisme..., Hal. 31.

membiarkan atau mencabut sebuah kutipan panas agar media yang bersangkutan bisa memenuhi *dateline*.

## E. Jurnalisme Islam

Istilah jurnalisme juga dikenal dalam islam sebagai profesi yang bertugas menyampaikan informasi. Dalam islam juga disebut "*Naba*" yaitu berita. Secara umum sebuah berita dapat diidentifikasi dari keterpenuhannya terhadap aspek informasi yang harus mencakup kriteria "5W+1H". oleh karena itu, agar tidak terjadinya pemberitaan palsu, pemberitaan yang menghakimi, tidak netral, atau berita yang menimbulkan kekacauan dalam masyarakat. Islam telah mengatur tehnik dan cara kerja jurnalistik yang baik menurut pandangan islam yang dijelaskan dalam Alquran dan hadits.

### 1. Tabayyun

*Tabayyun* artinya, menggali kebenaran atau mengkroscek ulang informasi yang diterima sebelum disampaikan kepada publik. Sehingga informasi yang tersebar dapat di pastikan keakuratannya, serta terverifikasi dengan benar.

Seperti yang di jelaskan dalam Qur'an surah Al-Hujarat ayat 6 : "*Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti. Agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan itu*",<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> QS. Al-Hujarat [49] ayat 6, lihat *Al-Quran dan terjemahan Special for Woman*, (Bandung: Yayasan Penafsiran Al-Quran Departemen Agama RI, 2007), Hal. 516.



Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa pentingnya memverifikasi atau mengkonfirmasi ulang kebenarannya terlebih dahulu informasi yang kita terima dari orang lain sebelum kita sampaikan lagi informasi tersebut kepada publik. Sehingga kita tidak membawa orang lain terkena masalah akibat berita bohong yang di sampaikan.

Dalam ilmu jurnalistik pula dianjurkan untuk mengkonfirmasi ulang kebenaran informasi tersebut dengan terjun langsung ke lapangan atau menghubungi narasumber terpercaya yang dapat memberikan kesaksian atas kebenarannya.

## **2. Islam Mengajarkan Independensi**

Keadilan dan tidak memihak kepada siapapun atas kepentingan pribadi juga dijelaskan dalam perpektif islam.

Seperti yang dijelaskan dalam QS. Al-Maidah ayat: 8.

*“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”<sup>46</sup>*

## **3. Aturan Lebih Dari Dua Narasumber**

Dalam elemen-elemen jurnalistik juga telah disinggung perihal narasumber. Bahwa, semakin beragam narasumber, maka semakin mendekati

---

<sup>46</sup> QS. Al-Maidah [5] ayat 8. Lihat *Al-Quran dan terjemahan Special for Woman*, (Bandung: Yayasan Penafsiran Al-Quran Departemen Agama RI, 2007), Hal. 108.

kebenaran. Jurnalisme islam pun memiliki aturan tegas mengenai narasumber atau saksi mata. Dan penentuannya pun berbeda tiap kejadian perkara. Dalam kasus perzinahan, saksinya empat orang laki-laki dan tak boleh ada satupun perempuan. Dalam Quran Surah An-Nur [24] ayat 4 dikatakan:

*“Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik[1029] (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, Maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. dan mereka Itulah orang-orang yang fasik.”<sup>47</sup>*

Tujuan lebih dari dua narasumber dalam dunia jurnalistik ialah agar informasi atau berita yang ditulis oleh wartawan lebih bervariasi dengan berbagai sudut pandang yang terjadi.

- a. Untuk kasus hudud dan qishash (kasus selain perzinahan, seperti kasus pencurian, minum khamar, dan lainnya), membutuhkan saksi atau narasumber dua orang laki-laki, atau satu orang saksi laki-laki dan dua perempuan. Quran Surah Al-Baqarah ayat 282 :

*“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah[179] tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan*

---

<sup>47</sup> Q.S. An-Nur [24] ayat 4. Lihat *Al-Quran dan terjemahan Special for Woman*, (Bandung: Yayasan Penafsiran Al-Quran Departemen Agama RI, 2007), Hal. 350.

*(apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit -menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.*<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> Q.S. Al-Baqarah [2] ayat 282. Lihat *Al-Quran dan terjemahan Special for Woman*, (Bandung: Yayasan Penafsiran Al-Quran Departemen Agama RI, 2007), Hal. 48.

- b. Pada kasus kelahiran, yang mengklaim bahwa seorang itu janda, keperawanan, atau aib mengenai cacat tubuh wanita yang tidak bisa dilihat oleh laki-laki yang bukan muhrim, cukup saksi perempuan saja.

Ada penekanan yang kuat dalam Islam jika itu menyangkut berita-berita kriminalitas dan privasi seseorang termasuk tuduhan berzina. Quran Surah An-Nur[24] ayat 19 menyebutkan:

*“Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar (berita) perbuatan yang Amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. dan Allah mengetahui, sedang, kamu tidak mengetahui.”<sup>49</sup>*

#### **4. Larangan Pemberitaan dalam Islam**

- a. Berita Bohong

Allah SWT menyebutkan dalam firmanNya Surah An-Nahl [16] ayat 105 : “Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan, hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka Itulah orang-orang pendusta.”<sup>50</sup>

Dalam agama mana pun tidak dibenarkan untuk melakukan kebohongan, karena tindakan tersebut justru merugikan banyak pihak. Seluruh perusahaan media di dunia tidak hanya mengejar kualitas semata (banyak berita yang dihasilkan) akan tetapi agar perusahaan tersebut bisa bertahan lama dan juga semakin dipercaya oleh masyarakat, tentu mereka

<sup>49</sup> QS. An-Nur [24] ayat 19. Lihat *Al-Quran dan terjemahan Special for Woman*, (Bandung: Yayasan Penafsira Al-Qur’an Departemen Agama RI, 2007), Hal. 351.

<sup>50</sup> Q.S. An-Nahl [16] ayat 105. Lihat *Al-Quran dan terjemahan Special for Woman*, (Bandung: Yayasan Penafsiran Al-Quran Departemen Agama RI, 2007), Hal. 279.

memberitakan berita yang aktual dan juga menyaring setiap informasi yang ingin mereka publis ke publik agar tidaknya informasi keliru (berita palsu/*hoax*).

#### b. Berita Pencemaran Nama Baik

Berita pencemaran nama baik termasuk kedalam tindakan ghibah dan tuduhan berzina. Allah SWT memberikan perumpamaan orang yang mengghibah atau mengunjing ibarat memakan bangkai saudaranya sendiri. Seperti yang digambarkan dalam Quran Surah Al-Hujarat [49] ayat 12:

*“Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.”<sup>51</sup>*

## F. Konstruksi Realitas Politik dalam Media Massa

### 1. Karakteristik Liputan Politik

Peristiwa politik selalu menarik perhatian media massa sebagai bahan liputan.<sup>52</sup> Hal ini terjadi karena dua faktor yang saling berkaitan. Pertama, sekarang ini politik berada di era mediasi yakni media massa. Sehingga hampir

<sup>51</sup> Q.S. Surah Al-Hujarat [49] ayat 12. Lihat *Al-Quran dan terjemahan Special for Woman*, (Bandung: Yayasan Penafsiran Al-Quran Departemen Agama RI, 2007), Hal. 517.

<sup>52</sup> Hamad Ibnu, *Konstruksi realitas Politik dalam Media Massa. Sebuah Study Critical Discourse Analysis terhadap Berita-berita Politik*; Pengantar: Prof. Dr. Harsono Suwardi, MA. Jakarta : Granit 2004.

mustahil kehidupan politik dipisahkan dengan media massa. Kedua, peristiwa politik dalam bentuk tingkah laku dan pernyataan para aktor politik lazimnya selalu mempunyai nilai berita sekalipun peristiwa politik itu bersifat rutin belaka. Misalnya, rapat partai atau pertemuan seorang tokoh politik dengan para pendukungnya.

Di satu sisi, liputan politik memiliki dimensi pembentukan opini publik, baik yang diharapkan oleh para politisi maupun oleh wartawan. Dalam kerangka pembentukan opini publik ini, media massa umumnya melakukan tiga kegiatan sekaligus. Pertama, menggunakan simbol-simbol politik (*language of politic*), kedua, melaksanakan strategi pengemasan pesan (*framing strategies*). Ketiga, melakukan fungsi agenda media (*agenda setting function*).<sup>53</sup>

## **2. Sistem Operasi Media Massa dan Konstruksi Realitas Politik**

Salah satu faktor yang memberi pengaruh signifikan terhadap proses pembuatan atau pengkonstruksian realitas politik hingga jenis opini yang terbentuk adalah sistem media massa dimana sebuah media menjalankan operasi jurnalistiknya.<sup>54</sup> Seperti apa konstruksi realitas politik hingga jenis opini yang dibentuk oleh sebuah media pertama-tama dipengaruhi oleh kehidupan sistem politik dimana media massa menjadi salah satu subsistemnya.

---

<sup>53</sup> *Ibid.* Hal. 2.

<sup>54</sup> *Ibid.* Hal. 7.

## BAB III METODOLOGI PENELITIAN

### A. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara yang dilakukan oleh seseorang dalam melihat dan mendalami suatu peristiwa sebagai bahan penyelidikan secara berhati-hati dan sempurna terhadap peristiwa tersebut, sehingga diperolehnya pemecahan yang tepat dan teruji.<sup>55</sup> Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yang bertujuan menjelaskan fenomena melalui pengumpulan data sedalam-dalamnya. Jika data yang terkumpul sudah dan dapat menjelaskan fenomena yang diteliti maka tidak perlu mencari sampling yang lebih banyak lagi. Dikarenakan penelitian kualitatif lebih menekankan pada kualitasnya, bukan kuantitasnya.<sup>56</sup> Dengan demikian, penelitian tersebut menggunakan pemahaman secara deskriptif.

Penelitian deskriptif bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomenanya yang diselidiki. Metode ini juga menyelidiki kedudukan (status) fenomena atau faktor dan melihat hubungan antara satu faktor dengan faktor yang lain sehingga ia juga dinamakan studi status (*Status study*).<sup>57</sup>

---

<sup>55</sup> Imam Suprayogo, *Metode Penelitian Agama*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2001), Hal.6.

<sup>56</sup> Rahmat Kriyantono, *Teknis Praktis Riset Komunikasi*, cet ke 6,(Jakarta: Kencana Prenada Media, 2012), Hal. 56.

<sup>57</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, cet.3 (Jakarta: Ghalia Indonesia,1985), Hal. 63-64.

Bogdan dan Taylor menjelaskan bahwa penelitian kualitatif merupakan metode dengan hasil penelitian berupa tulisan deskriptif dari orang atau perilaku yang dapat diteliti.<sup>58</sup> Dalam penelitian kualitatif, hal terpenting adalah penjelasan mengenai prosedur yang digunakan, seperti penjelasan menggunakan suatu pendekatan, data yang dianalisis, teknik pengumpulan data, dan keabsahan data sehingga hasil penelitiannya menjadi valid dan dapat dipertanggung-jawabkan.<sup>59</sup>

Berdasarkan masalah yang peneliti ajukan, maka peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik Analisis *Framing*. Tujuannya untuk mengetahui bagaimana wartawan melihat suatu isu dan menuliskannya dalam bentuk berita.<sup>60</sup>

Menurut Sudibyo, *framing* merupakan metode penyajian realitas di mana kebenaran tentang suatu kejadian tidak diingkari secara total, melainkan dibelokkan secara halus, dengan memberikan penonjoloan terhadap aspek-aspek tertentu, dengan menggunakan istilah-istilah yang punya konotasi tertentu, dan dengan bantuan foto, karikatur, dan alat ilustrasi lainnya.<sup>61</sup>

*Framing* menurut Sobur bahwa analisis *framing* digunakan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan wartawan ketika menyeleksi isu dan menulis berita. Cara pandang dan perspektif itu pada akhirnya menentukan fakta apa yang diambil, bagian mana yang ditonjolkan dan dihilangkan serta hendak dibawa kemana berita tersebut.

---

<sup>58</sup> Lexy L. Maelong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya : 2000), Hal. 3.

<sup>59</sup> Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003), Hal. 47.

<sup>60</sup> Rahmat Kriyantono, *Teknis Praktis Riset Komunikasi*, cet ke 6, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2012), Hal. 56.

<sup>61</sup> *Ibid.* Hal. 253.



Sesuai dengan permasalahan yang diteliti, fokus penelitian ini diarahkan pada bagaimana melihat sudut pandang atau framing media online Serambinews.com dan Republika.co.id sebagai portal berita online yang terpercaya dalam menyajikan isu berita pemilu 2019. Sedangkan ruang lingkup yang diteliti adalah pemberitaan- pemberitaan mengenai “Pemilu 2019” dalam masa sebelum pemilu yang dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019 dalam portal berita Serambinews.com dan Republika.co.id, yaitu periode pemberitaan bulan September 2018.

### **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan tempat perolehan data yang akan diteliti nantinya. Dalam karya ilmiah ini, lokasi penelitiannya adalah portal berita online yang ditujukan pada dua media lokal dan media nasional yang populer dikalangan masyarakat Aceh khususnya. Yaitu media Serambinews.com dan Republika.co.id.

### **C. Batasan Masalah**

Batasan masalah merupakan hal penting yang harus ditetapkan oleh peneliti. Dalam hal ini untuk meng-efektifitaskan penelitian yang ada, peneliti hanya meneliti pemberitaan mengenai pemilihan presiden 2019 di portal berita Serambinews.com dan Republika.co.id pada bulan September 2018. Sedangkan berita yang tidak ada hubungannya dengan pemilihan presiden 2019 pada bulan tersebut tidak diteliti.

#### D. Sumber Data

Sumber data adalah subyek dari mana sebuah data diperoleh.<sup>62</sup> Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua sumber data, yaitu:

1. Sumber data primer, adalah data yang diperoleh dari sumber data pertama atau tangan pertama dilapangan. Sumber data ini bisa responden atau subjek riset, dari hasil pengisian kuesioner, wawancara, observasi.<sup>63</sup> Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah portal berita online Serambinews.com dan Republika.co.id sebagai media lokal dan media Nasional yang menyajikan berita-berita seputar pemilihan presiden tahun 2019.
2. Sumber data Sekunder, adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber utama. Dapat dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.<sup>64</sup> Dalam penelitian ini yang menjadi data sekunder adalah dokumentasi dan observasi yang dilakukan dari media Serambinews.com dan Republika.co.id. Data sekunder ini bertujuan untuk membantu peneliti mendapatkan bukti atau bahan mengenai hal yang akan diteliti, sehingga peneliti dapat memecahkan masalah dengan cermat dan efektif terhadap permasalahan yang diteliti.

---

<sup>62</sup> Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Politik*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2013), Hal. 129.

<sup>63</sup> Rahmat Kriyantono, *Teknis Praksis Riset Komunikasi*, cet ke 6, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2012), Hal. 41-42.

<sup>64</sup> Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Rajawali, 1987), Hal. 94.

## **E. Teknik pengumpulan Data.**

Untuk mendapatkan kelengkapan informasi yang sesuai dengan fokus penelitian yang dilakukan, maka peneliti memilih teknik :

### **1. Teknik Dokumentasi**

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.<sup>65</sup> Dokumen yang ditunjukkan dalam hal ini adalah segala dokumen yang berhubungan dengan pemberitaan “Pemilu 2019” yang dimuat pada portal berita Serambinews.com dan Republika.co.id dalam masa sebelum pemilu dilaksanakan pada tanggal 17 april 2019.

### **2. Teknik Observasi**

Observasi atau pengamatan merupakan aktivitas pencatatan fenomena yang dilakukan secara sistematis. Pengamatan dapat dilakukan secara terlibat (partisipatif) ataupun non-partisipatif.<sup>66</sup>

## **F. Teknik Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan analisis *framing* model Murray Edelman. Ia mendefinisikan *framing* dalam dua dimensi. Seleksi pertama yaitu seleksi isu dan penekanan atau penonjolan aspek-aspek tertentu dari realitas. Seleksi isu ini berkaitan dengan pemilihan fakta terhadap apa yang akan ditampilkan melihat dari realitas yang beragam dan kompleks. Namun, tidak semua aspek atau bagian

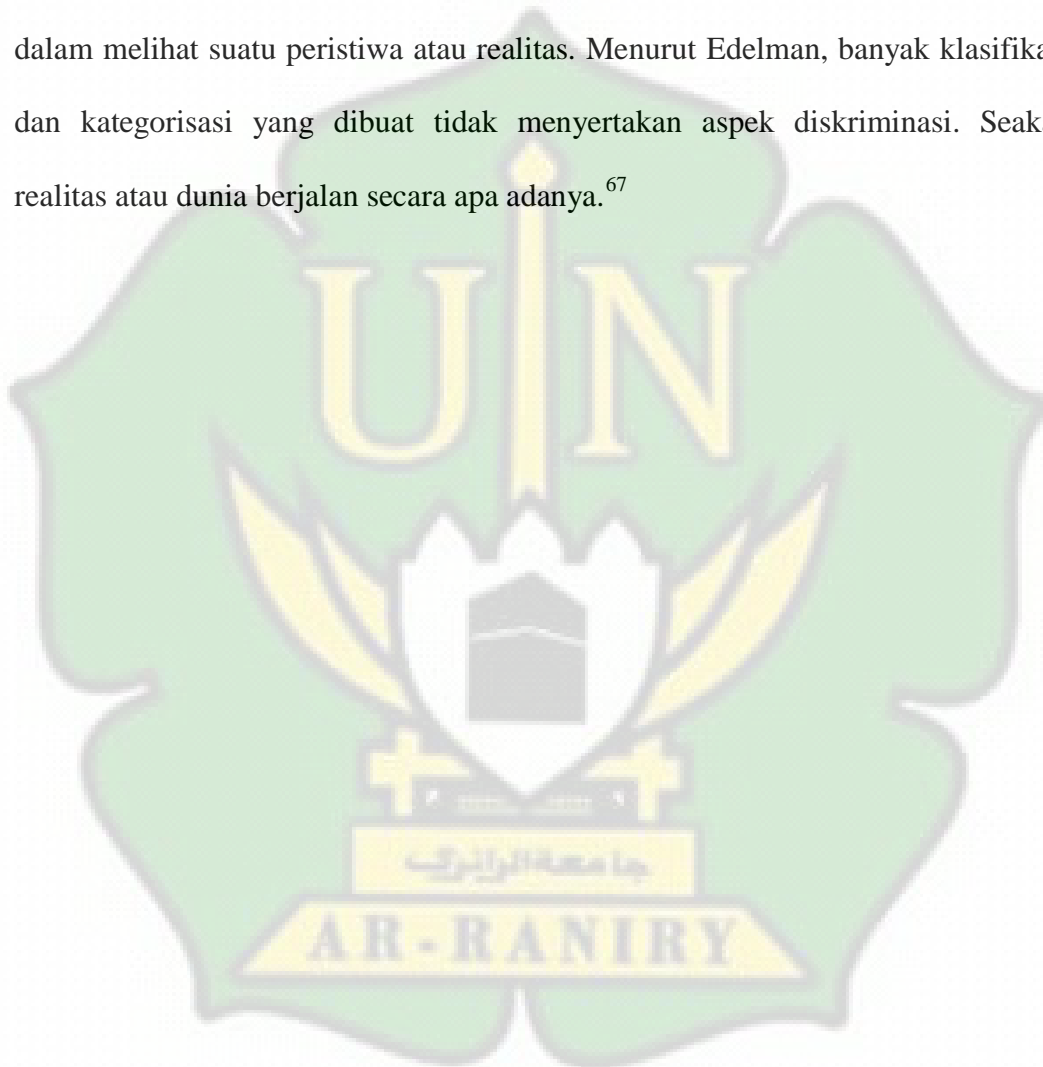
---

<sup>65</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, (Bandung : Alfabeta, 2009), cet. IX, Hal. 329.

<sup>66</sup> Idrus Muhammad, *Metode Penelitian Ilmu Sosial (Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif)*, Yogyakarta : Erlangga, 2009. Hal. 101.

dari isu ditampilkan, banyak aspek-aspek yang ditambah dan dikeluarkan tergantung pilihan wartawannya.

Klasifikasi dan kategorisasi berhubungan dengan bagaimana realitas dipahami dan dimengerti atau apa yang seharusnya ditekankan oleh khalayak dalam melihat suatu peristiwa atau realitas. Menurut Edelman, banyak klasifikasi dan kategorisasi yang dibuat tidak menyertakan aspek diskriminasi. Seakan realitas atau dunia berjalan secara apa adanya.<sup>67</sup>



---

<sup>67</sup> Eriyanto, *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*, cet.3 (Yogyakarta: LKIS, 2005), Hal. 164.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Analisis *Framing* Media Serambi**

##### **BERITA 1**

##### **Demokrat: Tim Jokowi Seperti Sales MLM PDIP: Demokrat Sebaiknya Introspeksi Diri**

“Elite-elite tim Pak Jokowi itu sama seperti sales multi level marketing, jadi memprospek, menarik-narik kader partai Demokrat,”

-- JANSEN SITINDAON, Ketua DPP Demokrat JAKARTA - Ketua DPP Partai Demokrat, Jansen Sitindaon, memberikan komentar terkait kadernya yang disebut banyak dibajak oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Hal ini diungkapkan Jansen Sitindaon saat menjadi Narasumber di acara Kabar Petang, *TV One*, Jumat (31/8). Mulanya, Jansen ditanya Terkait Hasto Kristiyanto selaku Sekjen PDIP yang menyebutkan jika ada kader Demokrat yang beralih dukungan hingga menjadi tim sukses dari Jokowi dan Maruf. Jansen pun menjawab apa yang dikatakan Hasto dengan mencatut kader Demokrat tersebut merupakan hal yang tidak pantas dilakukan dalam hubungan berpolitik. “Jadi secara hubungan etika kepartaian, apa yang dilakukan pak Hasto ini tidak tepat, tidak elok tidak etis, karena sikap Demokrat di Pilpres 2019 ini sudah jelas, kita Itu mendukung PrabowoSandi, dan mereka di sana pun tahu itu,” ujar Jansen Ketua DPP PD ini juga menambahkan, para elit-elit tim sukses Jokowi ini seperti sales Yang memberikan penawaranpenawaran. “Kalo istilah saya elit-elit tim Pak Jokowi itu sama seperti sales multi level marketing, jadi memprospek, menarik-narik, mengiming-imingi, menawar-nawari kader partai Demokrat, itu buktinya banyak,” tambahnya. Jansen pun mengatakan beberapa contoh bukti yang ia kemukakan tersebut. Satu “Sebenarnya adalah introspeksinya di Partai Demokrat sendiri di internalnya, kenapa kadernya kok bisa bersedia bergabung.”

-- **MASINTON PASARIBU**, Politikus PDIP di antaranya terkait penawaran pada mantan kader Demokrat, Tuan Guru Bajang (TGB) yang membelot dari Demokrat untuk menyatakan dukungan pada Jokowi. **Introspeksi diri** Sebelumnya pada acara yang sama, Masinton Pasaribu, kader dari PDIP juga angkat bicara terkait tuduhan Andi Arief yang mengatakan Jika PDIP telah membajak Kader Demokrat. Masinton membantah jika pihaknya ‘membajak’ kader Partai Demokrat sebagaimana yang disebutkan oleh Andi Arief. Dia mengatakan jika Alasan yang dikemukakan Andi Arief tidak mendasar. Menurutnya, pola kepemimpinan Jokowi yang merangkul semua pihak menjadi faktor utamanya. “Apakah ini dibajak? Tidak. Pola kepemimpinan yang dibangun oleh Pak Jokowi itu kepemimpinan yang merangkul. Sehingga kemudian orang nyaman dengan kepemimpinan Pak Jokowi,” kata Masinton. “Jadi kalau dikatakan PDI Perjuangan membajak Kader partai lain untuk masuk ke timnya Jokowi, itu sama sekali alasan yang tidak mendasar,” tegas dia. Bahkan, Masinton menyebut jika Partai Demokrat sebaiknya introspeksi diri. “Kenapa kok disebut membajak segala macam. Sebenarnya adalah introspeksinya di Partai Demokrat sendiri di internalnya, kenapa kadernya kok bisa bersedia bergabung,” ungkap dia. (TribunWow.com)

#### **FRAME SERAMBI: DEMOKRAT: TIM JOKOWI SEPERTI SALES MLM**

Harian serambi Indonesia memberitakan isu terkait tim kemenangan Jokowi yang dikritik oleh partai Demokrat seperti sales MLM (multi level marketing) di edisi 2 September 2018 pada rubrik politik halaman 5. Pemberitaan tersebut mengemukakan pendapat kedua belah pihak yaitu pihak Demokrat (Jansen Sitindaon) yang memberikan komentar terkait kadernya yang disebut banyak dibajak oleh kader partai PDIP dan juga belaian dari pihak PDIP (Masinton Pasaribu) menasehati agar pihak Demokrat mengintrospeksi diri dari internal partai, kenapa bisa kadernya bergabung. Berikut ini akan dibahas bagaimana kecenderungan pemberitaan *Serambi* dalam memberitakan isu tersebut.

**KATEGORISASI: DEMOKRAT – PDIP.** Dalam pandangan *Serambi*, ketua DPP Partai Demokrat Jansen sitindaon mengomentari Partai PDIP telah banyak membajak kader partai demokrat untuk beralih dukungan kepada Jokowi dan Ma'ruf. Namun hal itu tidak memastikan kebenaran dilakukannya pembajakan oleh PDIP terhadap kader partai Demokrat. Dalam hal ini wartawan menggunakan kata "*disebut*" dalam kalimat "*terkait kadernya yang disebut banyak dibajak oleh PDIP*". Kalimat tersebut jelas tampak penekanan yang diberikan bermakna tidak pasti. Seperti dalam kutipan teks berita berikut:

*"Ketua DPP Partai Demokrat, Jansen Sitindaon, memberikan komentar terkait kadernya yang disebut banyak dibajak oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)".*

Pemakaian kata "*sales MLM (multi level marketing)*" dalam tanggapan yang di berikan ketua DPP PD ini mengandung makna bahwa tim Jokowi menarik kadernya dengan cara memprospek, menarik-narik, mengiming-imingi, menawarkan kader partai Demokrat, sebagaimana makna dari MLM itu sendiri adalah strategi pemasaran berjenjang atau berantai, di mana tenaga penjual (*sales*) tidak hanya mendapatkan kompensasi atas penjualan yang mereka hasilkan, tetapi juga atas hasil penjualan *sales* lain yang mereka rekrut. Hal ini tampak pada kutipan teks berita berikut ini: "*Ketua DPP PD ini juga menambahkan, para elit-elit tim sukses Jokowi ini seperti sales yang memberikan penawaran-penawaran. "Kalo istilah saya elit-elit tim Pak Jokowi itu sama seperti sales multi level marketing, jadi memprospek, menarik-narik, mengiming-imingi, menawarkan kader partai Demokrat, itu buktinya banyak," tambahnya*"

karena keluarnya salah satu kader demokrat, Tuan Guru Bajang (TGB), menjadi alasan utama Partai Demokrat mengomentari PDIP membajak kadernya untuk beralih dukungan hingga menjadi tim sukses Jokowi-Ma'ruf yang sebenarnya tidak bisa menjadi titik acuan pembuktian bahwa kader PDIP-lah yang menjadi sebab akibat Tuan guru Bajang berpindah dukungan. Tampak jelas dalam kutipan berita berikut tidak menjelaskan bukti-bukti lain selain berpindahnya dukungan dari Tuan Guru Bajang :

*“ Jansen pun mengatakan beberapa contoh bukti yang ia kemukakan tersebut. Satu di antaranya terkait penawaran pada mantan kader Demokrat, Tuan Guru Bajang (TGB) yang membelot dari Demokrat untuk menyatakan dukungan pada Jokowi”.*

Serambi juga memaparkan jawaban-jawaban dari kader PDIP yang membantah terhadap komentar yang diberikan jansen sebagai ketua DPP PD. Bantahan dilontarkan oleh Masinton Pasaribu yang menolak tudingan Andi Arief terkait pembajakan kader partai demokrat yang tidak dapat di buktikan secara nyata oleh pihak demokrat. Hal ini tampak dalam kutipan teks berita berikut:

*” Sebelumnya pada acara yang sama, Masinton Pasaribu, kader dari PDIP juga angkat bicara terkait tudingan Andi Arief yang mengatakan Jika PDIP telah membajak Kader Demokrat. Masinton membantah jika pihaknya ‘membajak’ kader Partai Demokrat sebagaimana yang disebutkan oleh Andi Arief. Dia mengatakan jika Alasan yang dikemukakan Andi Arief tidak mendasar”.*



*Frame* Serambi semakin jelas dalam penggunaan kata dan kalimat yang mendukung gagasannya. Dengan menambahkan argumen Masinton yang membela bahwa karena pola kepemimpinan Jokowi yang dianggap dapat merangkul semua pihak sehingga semua orang merasa nyaman dengan kepemimpinan Jokowi ini menjadi faktor utama berpindahnya dukungan kader demokrat. Sehingga dengan argumen tersebut mengartikan kepemimpinan Prabowo tidak memberikan kenyamanan bagi tim suksesnya sehingga terjadilah perpindahan dukungan kepada Jokowi.

*“Menurutnya, pola kepemimpinan Jokowi yang merangkul semua pihak menjadi faktor utamanya. “Apakah ini dibajak? Tidak. Pola kepemimpinan yang dibangun oleh Pak Jokowi itu kepemimpinan yang merangkul. Sehingga kemudian orang nyaman dengan kepemimpinan Pak Jokowi,” kata Masinton.”*

Serambi juga memperkuat gagasannya dengan mengajukan sanggahan yang diberikan oleh Masinton Pasaribu bahwa Komentar ketua DPP PD Jansen Sitindaon dinilai tidak mendasar. Hal itu dilihat, dalam pemberitaan serambi ini tidak memperkokoh argumen demokrat yang tidak menyertakan bukti landasan apa sehingga demokrat menyebut pihak PDIP menarik-narik atau menawar-nawari dan mengiming-imingi kader demokrat untuk beralih dukungan kepada Jokowi dan Ma'ruf . Sikap introspeksi dari internal Demokrat juga menjadi sebuah keharusan yang dianjurkan oleh pihak PDIP .Sikap ini secara jelas tergambar dalam kutipan bagian akhir teks berita berikut.

*“Jadi kalau dikatakan PDI Perjuangan membajak kader partai lain untuk masuk ke timnya Jokowi, itu sama sekali alasan yang tidak mendasar,” tegas dia.*

Bahkan, Masinton menyebut jika Partai Demokrat sebaiknya introspeksi diri. “Kenapa kok disebut membajak segala macam. Sebenarnya adalah introspeksinya di Partai Demokrat sendiri di internalnya, kenapa kadernya kok bisa bersedia bergabung,” ungkap dia.”

Sisi itulah yang diperhatikan dan dilihat oleh Serambi. Pemberitaan diarahkan pada pembuktian benar tidaknya PDIP melakukan seperti apa yang dikomentari oleh Demokrat. Namun dalam pandangan *Serambi* Partai demokrat mengomentari PDIP sebagai tim sukses Jokowi seperti sales MLM (*multi level marketing*) yang tidak menghadirkan cukup bukti atas komentar yang lontarkan. Hanya alasan keluarnya Tuan Guru Bajang dari kader demokrat yang beralih dukungan-lah menjadi salah satu contoh bukti yang dikemukakan Jansen. *Serambi* bisa saja menilik berita dari sudut pandang apa alasan disebalik keluarnya Tuan Guru Bajang tersebut. Apakah benar ia keluar karena diiming-imingkan oleh timses Jokowi atau pun murni dari keyakinan diri sendiri untuk beralih dukungan kepada Jokowi dan Ma’ruf. Namun hal tersebut tidak tersedia dalam pemberitaan ini.

Sedangkan PDIP digambarkan dalam pandangan *serambi* mempunyai bantahan yang bisa diterima oleh khalayak karena alasan yang tidak mendasar dan memberikan kemungkinan-kemungkinan berpindahnya Tuan Guru Bajang karena kepemimpinan Jokowi yang merangkul dan memberikan kenyamanan bagi semua pihak.

**Tabel 4.1. Pola Kategorisasi Serambi**

<b>PIHAK KITA</b>	<b>PIHAK MEREKA</b>
PDIP (Timses Jokowi-Ma'ruf)	Demokrat ( Timses Prabowo-Sandi)
Kepemimpinan yang merangkul semua pihak	Kepemimpinan yang tidak nyaman



## **BERITA 2**

### Caleg NasDem Diminta Jadi Jubir Jokowi

**JAKARTA** - Ketua Badan Pemenang Pemilu Partai NasDem Effendi Choiri mengatakan, sebanyak 575 caleg DPR Partai NasDem Siap memenangkan pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin di Pilpres 2019. Para caleg diminta menjadi juru bicara Jokowi-Ma'ruf Amin. Artinya, ikut menyampaikan program atau capaian pemerintahan Jokowi. "Ini lah Pasangan nasional religius," ujar Effendi dalam acara Penutupan orientasi caleg Partai NasDem di Hotel Mercure Ancol, Jakarta, Senin (3/9). "Inilah pasangan tua muda, inilah pasangan ulama dan umat. Inilah pasangan yang relevan untuk konteks sejarah Indonesia, relevan untuk konteks sosial kultural Indonesia yang religius dan nasionalis," sambung dia. Sejak Sabtu (1/9), sebanyak 575 caleg Partai NasDem mengikuti pekan orientasi caleg. Menurut Effendi, semua caleg melahap berbagai materi untuk menambah modal maju sebagai caleg. Materi itu mencakup legislatif, materi soal moralitas, materi soal politik kebangsaan, hingga materi yang terkait dengan sendi-sendi kebangsaan. Nasdem menargetkan 100 kursi DPR periode 2019/2024. Pada Pemilu 2014, Partai Nasdem hanya memperoleh 36 kursi di DPR, atau 6,4 persen dari total kursi. Partai Nasdem adalah satu Dari tujuh partai politik yang mengusung pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin di Pilpres 2019. ([kompas.com](#))

### **FRAME SERAMBI: CALEG NASDEM DIMINTA JADI JUBIR JOKOWI**

Pada edisi 4 September 2019, Serambi memberitakan isu terkait calon anggota legislatif dari partai Nasdem diminta untuk menjadi jubir Jokowi. Artinya, mereka ikut menyampaikan program atau capaian pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. Dalam berita ini juga menginformasikan sejumlah anggota calon legislatif partai Nasdem mengikuti pekan orientasi yang diperuntukkan bagi calon anggota legislatif. Berikut ini akan dibahas bagaimana kecenderungan pemberitaan *serambi* dalam memberitakan isu tersebut.

**KATEGORISASI: kubu Jokowi – Kubu Prabowo.** Dalam pandangan *Serambi*, pernyataan ketua badan pemenangan pemilu partai NasDem bahwa, sejumlah 575 caleg DPR Partai NasDem Siap memenangkan pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin di Pilpres 2019. Dapat dilihat dalam pernyataan itu, Effendi jelas menyebut spesifikasi jumlah anggota caleg yang akan siap mendukung dan menyampaikan program atau capaian pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. Artinya, *Serambi* memulai lead berita ini dengan jelas menampilkan fokus utama yang ingin di angkat dan menggiring opini masyarakat dalam berita ini. Hal tersebut tampak dalam kutipan berita berikut:

*“Ketua Badan Pemenang Pemilu Partai NasDem Effendi Choiri mengatakan, sebanyak 575 caleg DPR Partai NasDem Siap memenangkan pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin di Pilpres 2019. Para caleg diminta menjadi juru bicara Jokowi-Ma'ruf Amin. Artinya, ikut menyampaikan program atau capaian pemerintahan Jokowi.”*

Penambahan kalimat langsung dari pernyataan Effendi Choiri ini juga tampak jelas bahwa bagaimana pandangan *serambi* memberitakan isu tersebut. Hal ini dapat dilihat dalam kutipan berita berikut:

*“Ini lah Pasangan nasional religius,” ujar Effendi dalam acara Penutupan orientasi caleg Partai NasDem di Hotel Mercure Ancol, Jakarta, Senin (3/9). “Inilah pasangan tua muda, inilah pasangan ulama dan umat. Inilah pasangan yang relevan untuk konteks sejarah Indonesia, relevan untuk konteks sosial kultural Indonesia yang religius dan nasionalis,” sambung dia.”*

Selain menginformasikan tentang sejumlah caleg partai NasDem yang siap menjadi jubiir pemenangan Jokowi. Serambi juga menginformasikan mengenai para caleg yang telah mengikuti pekan orientasi Caleg sejak sabtu 1 September lalu. Dengan begitu, citra para caleg partai NasDem ini naik dan dinilai berkualitas. Oleh karena itu, dalam hal ini dapat terlihat jelas penggiringan opini yang terdapat dalam berita ini. Hal tersebut tampak pada kutipan berita berikut ini:

*“Sejak Sabtu (1/9), sebanyak 575 caleg Partai NasDem mengikuti pekan orientasi caleg. Menurut Effendi, semua caleg melahap berbagai materi untuk menambah modal maju sebagai caleg. Materi itu mencakup legislatif, materi soal moralitas, materi soal politik kebangsaan, hingga materi yang terkait dengan sendi-sendi kebangsaan”*

Informasi mengenai partai NasDem yang menarget sejumlah kursi di DPR juga menjadi bagian dalam berita ini sebagai penutup berita. Dalam pandangan Serambi, 100 kursi yang ditargetkan oleh partai NasDem ini dengan maksud dan tujuan untuk dapat tercapai di pemilu kali ini. Karena serambi juga menyebutkan fakta lama terkait jumlah kursi yang diperoleh partai NasDem pada tahun 2014 silam. Hal ini terdapat pada kutipan berita berikut:

*“Nasdem menargetkan 100 kursi DPR periode 2019/2024. Pada Pemilu 2014, Partai Nasdem hanya memperoleh 36 kursi di DPR, atau 6,4 persen dari total kursi. Partai Nasdem adalah satu Dari tujuh partai politik yang mengusung pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin di Pilpres 2019.(kompas.com)”*

Sisi itulah yang diberitakan *serambi* mengenai isu tersebut. Menaikkan citra baik capres 01 melalui pemberitaan ini dengan pernyataan Effendi Choiri sebagai ketua pemenangan pemilu partai NasDem. Dan juga menggiring opini masyarakat kepada kualitas dan kemampuan para caleg partai NasDem ini dengan harapan dapat meningkatkan jumlah kursi yang di targetkan dari capaian pemilu sebelumnya.

**Tabel 4.2. Pola Kategorisasi Serambi**

<b>PIHAK KITA</b>	<b>PIHAK MEREKA</b>
Timses Jokowi-Ma'ruf (partai NasDem)	Timses Prabowo-Sandi (partai pendukung Prabowo – Sandi)
Pemimpin yang seharusnya dan kualitas caleg yang baik.	Pemimpin yang tidak seharusnya, dan kualitas caleg belum terbukti kemampuannya.

### **BERITA 3**

#### **Koalisi Prabowo-Sandi Tolak DPT Final Pemilu 2019**

**JAKARTA** – Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah merilis jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 185 juta lebih pemilih. Parpol koalisi Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menolak DPT tersebut. “Parpol koalisi Prabowo-Sandi Menolak rencana KPU yang akan menetapkan DPT pileg dan pilpres yang rencananya akan dilaksanakan pada Rabu 5 September,” kata Sekjen PKS Mustafa Kamal dalam Konferensi pers di restoran Batik Kuring, SCBD, Jaksel, Senin (3/9). Alasannya, dalam daftar pemilih sementara (DPS) yang sebelumnya dirilis KPU masih ditemukan sejumlah kesalahan. PKS, Gerindra, PAN, dan Partai Demokrat menyatakan menemukan setidaknya 25 juta data ganda dari 137 juta lebih pemilih yang ada di DPS. “Dari 137 jutaan Pemilih dalam DPS terdapat 25 jutaan pemilih ganda. Di beberapa dapil Ditemukan beberapa nama, bahkan satu nama bisa tergandakan 11 kali dalam satu TPS,” jelas Mustafa. Karena itu, dia berharap KPU tak terburuburu menetapkan DPT.

KPU Menginformasikan akan menggelar pleno terbuka DPT pada tanggal 4-6 September 2018. Mustafa meminta KPU terlebih dahulu menyerahkan rilis DPT final ke parpol koalisi untuk ditelusuri lebih lanjut. “Kami dengan ini meminta sebelum ditetapkan oleh KPU diserahkan dulu semua data DPS yang sudah diupdate,” sebutnya. “Bisa dibayangkan dari 137 juta itu ada yang tergandakan 25 juta. Apalagi kalau ada kenaikan ada apalagi. Nah, itu kita akan cermati bersamasama,” imbuh Mustafa. Dalam konferensi pers tadi malam juga hadir Sekjen Gerindra Ahmad Muzani, Sekjen PAN Eddy Soeparno, Sekjen Partai Demokrat Hinca Pandjaitan. Sebelumnya Keempat sekjen menggelar pertemuan tertutup di apartemen The Capital Residence, SCBD, Jaksel. Bakalcawapres Sandiaga Uno disebutkan hadir dalam rapat itu. Namun Sandiaga Meninggalkan lokasi terlebih dahulu.(dte)



**FRAME SERAMBI: Koalisi Prabowo – Sandi tolak DPT final Pemilu 2019**

Dalam isu ini diberitakan bahwa parpol koalisi Prabowo-Sandi menolak KPU untuk merilis jumlah daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 185 juta pemilih. Dengan sebab masih ditemukannya sejumlah kesalahan dalam daftar pemilih sementara (DPS) sebelumnya yang dirilis KPU. PKS, Gerindra, PAN, dan Partai Demokrat menyatakan menemukan setidaknya 25 juta data ganda dari 137 juta lebih pemilih yang ada di DPS. Karena itu, sekjen PKS Mustafa Kamal berharap KPU tidak terburu-buru menetapkan DPT dan juga meminta KPU terlebih dahulu menyerahkan rilis DPT final ke parpol koalisi untuk ditelusuri lebih lanjut. Berikut ini akan dibahas bagaimana kecenderungan pemberitaan *serambi* dalam memberitakan isu tersebut.

**KATEGORISASI: KPU – KOALISI PRABOWO.** Dalam pandangan *Serambi*, pemberitaan tersebut terkait tidak setujunya koalisi Prabowo – Sandi dengan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) yang dirilis KPU. Penolakan tersebut tentu berlandaskan alasan yang kuat serta wartawan juga menginformasikan dalam berita ini sejumlah kesalahan dalam meng-input data pemilih. Penggunaan kata “*setidaknya*” dalam kalimat “*menemukan setidaknya\_ 25 juta data ganda.....* “. Bermakna bahwa akan ada kemungkinan angka data ganda lebih besar dari pada yang disebutkan. Hal ini dapat dilihat dalam kutipan berita berikut:

*“Alasannya, dalam daftar pemilih sementara (DPS) yang sebelumnya dirilis KPU masih ditemukan sejumlah kesalahan. PKS, GERINDRA, dan*

*PARTAI DEMOKRAT menyatakan menemukan setidaknya 25 juta data ganda dari 137 juta lebih pemilih yang ada di DPS.*

Data ganda yang ditemukan dalam jumlah DPS ini ditemukan di beberapa dapil bahkan satu nama bisa tergandakan 11 kali dalam satu TPS. Hal tersebut termasuk pernyataan dari kutipan Mustafa sekjen PKS seperti berikut: *“Dari 137 jutaan pemilih dalam DPS terdapat 25 jutaan pemilih ganda di beberapa nama, bahkan satu nama bisa tergandakan 11 kali dalam satu TPS,” jelas Mustafa ”.* cuplikan tersebut juga bisa menjadi acuan kita melihat bagaimana kinerja KPU dalam mengumpulkan data pemilih tetap.

Serambi juga memaparkan bahwa, dengan kinerja KPU sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, pihak koalisi Prabowo yang dalam hal ini di wakikan oleh Mustafa Kamal sebagai sekjen PKS untuk bersuara. Dengan adanya kutipan berita mustafa meminta KPU terlebih dahulu menyerahkan rilis DPT final keparpol koalisi untuk ditelusuri lebih lanjut. Informasi tersebut jelas mencerminkan bahwa pihak koalisi Prabowo meragukan kinerja KPU. Hal ini tampak pada kutipan berita berikut.: *“Karena itu, dia berharap KPU tak terburu-buru menetapkan DPT. KPU menginformasikan akan menggelar pleno terbuka DPT pada tanggal 4-6 september 2018. Mustafa meminta KPU terlebih dahulu menyerahkan rilis DPT final ke parpol koalisi untuk ditelusuri lebih lanjut.”*

Untuk memperkuat argumennya, Serambi juga menambahkan kutipan langsung dari ucapan mustafa kamal terkait meminta rilis DPT final dari KPU ke parpol koalisi. Seperti dalam kutipan teks berita berikut: *“Kami dengan ini meminta sebelum ditetapkan oleh KPU diserahkan dulu semua data DPS yang*

*sudah diupdate,” sebutnya. “Bisa dibayangkan dari 137 juta itu ada yang tergangankan 25 juta. Apalagi kalau ada kenaikan ada apalagi. Nah, itu kita akan cermati bersama,” imbuh Mustafa.”*

Sisi itulah yang diberitakan serambi terhadap KPU dan Koalisi Prabowo. Bahwa dalam pemberitaan ini, secara keseluruhan dalam penggunaan kata, kalimat yang cenderung lebih menginformasikan kepada kinerja KPU yang kurang teliti dalam menghimpun data pemilih sementara dan tetap.

**Tabel 4.3. Pola Kategorisasi Serambi**

PIHAK KITA	PIHAK MEREKA
Koalisi Prabowo	KPU
Teliti	Tidak teliti

## **BERITA 4**

### **Kubu Prabowo-Sandiaga: Ada 25 Juta Identitas Ganda di DPS**

**JAKARTA** - Sekretaris jenderal partai politik pengusung pasangan bakal calon presiden Prabowo Subianto dan Calon wakil presiden Sandiaga Uno mengungkap Adanya identitas ganda pada Daftar Pemilih Sementara (DPS) untuk Pemilu 2019 mendatang. Sekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mustafa Kamal, mengatakan, pihaknya menemukan 25 juta identitas ganda Dari 137 juta pemilih yang terdaftar dalam DPS milik Komisi Pemilihan Umum (KPU). “Dari 137 juta pemilih terdapat 25 juta pemilih ganda di beberapa daerah. Bahkan di beberapa tempat ditemukan sampai 11 kali digandakan,” ujar Mustafa saat memberikan keterangan di kawasan Sudirman, Jakarta, Senin (3/9) malam. Mustafa pun meminta KPU memberikan klarifikasi dan memuktahirkan data pemilih sebelum penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Menurut dia, pada Rabu (5/ 9) KPU akan mengundang Seluruh perwakilan partai politik untuk menetapkan DPT pada Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2019. Selain itu ia juga meminta KPU menyerahkan data para pemilih yang belum diberikan kepada partai politik. Mustafa mengaku pihaknya baru menerima 137 juta data pemilih, Sementara data KPU menunjukkan jumlah pemilih telah mencapai 185 juta orang. “Sampai hari Senin ini data DPT yang telah ditetapkan ada 185 juta. Ada kenaikan dari data yang diserahkan ke kami sebelumnya. Kami minta itu dulu diserahkan, untuk kami olah dulu datanya,” kata Mustafa. “Bisa bayangkan dari 130 juta saja sudah ada 25 juta yang tergandakan,” ucapnya. Pada kesempatan yang sama, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani meminta KPU menunda waktu penetapan DPT sebelum seluruh data pemilih diperbarui. Setelah itu, ia juga berharap seluruh partai politik diberikan kesempatan untuk memverifikasi data pemilih tersebut. “Kami semua peserta pemilu yang mengusung calon presiden ingin agar Pilpres dan Pileg berlangsung dengan jujur, adil dan baik. Karena demokrasi adalah cara yang kita pilih,” ujar Muzani. Dalam konferensi pers tersebut hadir pula Sekjen Partai Amanat Nasional Eddy Soeparno dan Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan.

**KPU Membantah** Sementara itu, Komisioner KPU, Viryan Azis, membantah ada 25 juta identitas ganda pada Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilu 2019. Menurut Viryan, memang ada Potensi identitas ganda pada DPS Pemilu, tetapi jumlahnya Tidak sampai 25 juta. “Dengan jumlah diduga 25 juta (data pemilih ganda), kami meyakini tidak sebanyak itu karena proses pemutakhiran data pemilih dilakukan secara berjenjang dan melibatkan banyak orang,” kata Viryan. Menurut dia, temuan 25 juta data pemilih ganda oleh kubu bakal capres-cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno berasal dari analisis tiga elemen data, yaitu Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama, dan tanggal lahir. Seluruh data tersebut berasal dari soft file yang diserahkan KPU ke Partai Keadilan Sejahtera (PKS), sebagai salah Satupartai pengusung Prabowo-Sandi, pada saat rapat pleno penetapan DPS. Namun demikian, sesuai Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dan Permintaan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, data yang diberikan KPU ke partai politik tidak bisa seluruhnya disampaikan.

Empat digit angka terakhir dari 16 digit angka pada NIK dirahasiakan dan diganti dengan tanda bintang. Hal itu demi menjamin kerahasiaan data pemilih dan keamanan data pribadi. “Sangat mungkin analisis dilakukan dengan elemen NIK-nya tidak lengkap karena 4 angka terakhir diganti tanda bintang. Karena 4 angka terakhir hilang, maka sejumlah NIK memang bisa menjadi sama,” tutur Viryan. Oleh karenanya, Viryan membantah data yang dihimpun oleh KPU tidak akurat. “Bukan tidak akurat, mereka mengecek dengan NIK yang berjumlah 12 angka,” tegasnya. Meski demikian, KPU menghormati upaya partai politik menganalisis data pemilih. Viryan menyebut, temuan itu akan dijadikan masukan bagi KPU dalam menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT).([kompas.com](http://kompas.com))

### **FRAME SERAMBI: Kubu Prabowo–Sandiaga: Ada 25 juta data ganda di DPS**

Serambi menurunkan isu mengenai kubu Prabowo-Sandi menemukan 25 juta data ganda di DPS. Dalam pemberitaan ini mengemukakan pernyataan sekjen parpol PKS Mustafa Kamal yang mengungkap temuan data ganda pada daftar pemilih sementara (DPS) yang dirilis KPU. Dan juga memaparkan harapan-harapan yang diminta oleh pihak Prabowo-Sandi kepada KPU terhadap isu terkait. Mustafa kamal berharap KPU dapat memberikan klarifikasi dan memuthakhirkan data pemilih sementara sebelum penetapan daftar pemilih tetap (DPT). Serta meminta KPU menyerahkan data para pemilih yang belum diberikan kepada partai politik.

Tidak hanya mengemukakan hal tersebut. Namun, serambi juga memunculkan pendapat KPU yang disampaikan oleh komisioner KPU Viryan Aziz terkait komentar bantahan terhadap isu ditemukannya 25 juta data ganda di DPS. Dalam pemberitaan ini, Viryan Aziz memberikan beberapa alasan dan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi mengapa bisa ditemukannya sebanyak 25 juta data ganda sedangkan pihak KPU tidak membenarkannya data yang ditemukan sebanyak itu. Berikut ini akan dibahas bagaimana kecenderungan pemberitaan Serambi dalam memberitakan isu tersebut.:

**KATEGORISASI: Kubu Prabowo-Sandi – KPU.** Dalam pandangan serambi, peng-ungkapan kubu Prabowo-Sandi yang dilakukan oleh sekjen PKS tersebut dipilih sebagai headline pada berita ini. Artinya yang ingin diberitakan adalah terkait alasan penolakan terhadap data pemilih sementara yang dirilis KPU.

Penggunaan kata “*mengungkap*” dalam headline berita ini menandakan adanya temuan data yang baru saja dilakukan oleh pihak parpol pengusung pasangan calon Prabowo-Sandi. Hal ini juga menandakan bahwa kubu paslon 02 ini mengecek ulang kebenaran atas data jumlah daftar pemilih tetap sebelum ditetapkan oleh KPU. Hal ini tampak pada kutipan berita berikut:

*“JAKARTA - Sekretaris Jenderal partai politik pengusung pasangan calon presiden Prabowo Subianto dan calon wakil presiden Sandiaga Uno mengungkap adanya identitas ganda pada daftar pemilih sementara (DPS) untuk pemilu 2019 mendatang”*

Penemuan data ganda itu, dalam pandangan serambi juga mendukung argumennya dengan menambahkan kutipan langsung dari sekjen Partai Keadilan Sosial (PKS) Mustafa Kamal yang mengatakan pihaknya menemukan 25 juta identitas ganda dari 137 juta pemilih yang terdaftar dalam DPS milik Komisi Pemilihan Umum (KPU). Seperti dalam kutipan teks berita berikut:

*“Sekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mustafa Kamal, mengatakan, pihaknya menemukan 25 juta identitas ganda dari 137 juta pemilih yang terdaftar dalam DPS milik Komisi Pemilihan Umum (KPU). “Dari 137 juta pemilih terdapat 25 juta pemilih ganda di beberapa daerah. Bahkan di beberapa tempat ditemukan sampai 11 kali digandakan,” ujar Mustafa saat memberikan keterangan di kawasan Sudirman, Jakarta, Senin (3/9) malam.”*

Solusi yang dipaparkan oleh wartawan disini adalah permintaan Mustafa kepada KPU untuk memberikan klarifikasi dan memuktakhirkan data pemilih sebelum penetapan daftar pemilih tetap (DPT) yang dalam hal ini wartawan

mendapat informasi dari mustafa bahwa KPU akan mengundang seluruh perwakilan partai politik untuk menetapkan DPT. Seperti dalam kutipan berita berikut:

*“Mustafa pun meminta KPU memberikan klarifikasi dan memuktahirkan data pemilih sebelum penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Menurut dia, pada Rabu (5/9) KPU akan mengundang seluruh perwakilan partai Politik untuk menetapkan DPT pada Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2019.”*

Harapan dan tanggapan dari kubu paslon 02 ini juga masih dipaparkan dalam paragraf 4, 5 dan 6. Yang meminta KPU menyerahkan data para pemilih yang belum diberikan kepada partai politik. Dalam beberapa paragraf ini tampak jelas bahwa pemberitaan terhadap isu tersebut menempatkan posisi KPU sebagai lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum yang tidak teliti. Namun begitu, proses penemuan identitas ganda yang ditemui oleh kubu paslon 02 ini juga tidak dimunculkan. Bagaimana cara mereka memperoleh data ganda tersebut. Seperti kutipan berita berikut:

*“Selain itu ia juga meminta KPU menyerahkan data para pemilih yang belum diberikan kepada partai politik. Mustafa mengaku pihaknya baru menerima 137 juta data pemilih, Sementara data KPU menunjukkan jumlah pemilih telah mencapai 185 juta orang. “Sampai hari Senin ini data DPT yang telah ditetapkan ada 185 juta. Ada kenaikan dari data yang diserahkan ke kami sebelumnya. Kami minta itu dulu diserahkan, untuk kami olah dulu datanya,” kata Mustafa. “Bisa bayangkan dari 130 juta saja sudah ada 25 juta yang tergandakan,” ucapnya. Pada kesempatan yang sama, Sekjen Partai Gerindra*



*Ahmad Muzani meminta KPU menunda waktu penetapan DPT sebelum seluruh data pemilih diperbarui. Setelah itu, ia juga berharap seluruh partai politik diberikan kesempatan untuk memverifikasi data pemilih tersebut.”*

Ditambahnya pernyataan Ahmad Muzani sekjen partai Gerindra yang berharap pilpres dan pileg berlangsung dengan jujur, adil, dan baik sebagaimana jalan demokrasi yang kita pilih mendukung argument serambi terhadap hal itu. Seperti dalam kutipan teks berita berikut:

*“Kami semua peserta pemilu yang mengusung calon presiden ingin agar Pilpres dan Pileg berlangsung dengan jujur, adil dan baik. Karena demokrasi adalah cara yang kita pilih,” ujar Muzani. Dalam konferensi pers tersebut hadir pula Sekjan Partai Amanat Nasional Eddy Soeparno dan Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan”*

Selain itu, dalam berita ini wartawan juga menyampaikan bantahan dari pihak KPU terhadap isu ditemukannya 25 juta identitas ganda di DPS. Dalam bantahan tersebut yang disampaikan oleh komisioner KPU Viryan Aziz menolak atas jumlah angka identitas ganda yang ditemukan oleh partai pengusung capres dan cawapres Prabowo-Sandi. Karena proses pemutakhiran data pemilih dilakukan secara berjenjang yang artinya dilakukan secara berulang untuk memastikan tidak adanya kesalahan yang terjadi serta melibatkan banyak orang. Seperti dalam teks berita berikut ini:

*“Sementara itu, Komisioner KPU, Viryan Azis, membantah ada 25 juta identitas ganda pada Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilu 2019. Menurut Viryan, memang ada Potensi identitas ganda pada DPS Pemilu, tetapi jumlahnya*

*Tidak sampai 25 juta. “Dengan jumlah diduga 25 juta (data pemilih ganda), kami meyakini tidak sebanyak itu karena proses pemutakhiran data pemilih dilakukan secara berjenjang dan melibatkan banyak orang,” kata Viryan.”*

Penggunaan kata “*menurut dia*” dalam kalimat “*menurut dia, temuan 25 juta data pemilih ganda oleh kubu bakal capres cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno berasal dari analisis tiga elemen data, yaitu Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama, dan tanggal lahir.*”. Mengartikan pikiran/anggapan Viryan yang dinilai masih tidak dapat menjadi titik acuan yang kuat dalam memberikan alasan terkait ditemukannya data ganda tersebut oleh kubu Prabowo-Sandi. Alasannya tersebut karena data para pemilih yang sebelumnya diminta oleh salah satu parpol pengusung Prabowo-Sandi ini telah diserahkan oleh KPU. Namun demikian, data yang dikirim tidak sepenuhnya lengkap, dikarenakan peraturan KPU tentang penyusunan daftar pemilih yang tidak bisa disampaikan sepenuhnya atas permintaan Dirjen Dukcapil dengan alasan demi menjamin kerahasiaan data pemilih dan keamanan data pribadi. Seperti dalam kutipan teks berikut:

*“Menurut dia, temuan 25 juta data pemilih ganda oleh kubu bakal capres-cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno berasal dari analisis tiga elemen data, yaitu Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama, dan tanggal lahir. Seluruh data tersebut berasal dari soft file yang diserahkan KPU ke Partai Keadilan Sejahtera (PKS), sebagai salah Satupartai pengusung Prabowo-Sandi, pada saat rapat pleno penetapan DPS. Namun demikian, sesuai Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dan Permintaan Direktorat*

*Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, data yang diberikan KPU ke partai politik tidak bisa seluruhnya disampaikan. Empat digit angka terakhir dari 16 digit angka pada NIK dirahasiakan dan diganti dengan tanda bintang. Hal itu demi menjamin kerahasiaan data pemilih dan keamanan data pribadi. “Sangat mungkin analisis dilakukan dengan elemen NIK-nya tidak lengkap karena 4 angka terakhir diganti tanda bintang. Karena 4 angka terakhir hilang, maka sejumlah NIK memang bisa menjadi sama,” tutur Viryan.”*

Pembantahan data yang dihimpun oleh KPU kurang akurat juga dicantumkan dalam paragraf terakhir dari berita ini. KPU masih dengan pemikirannya yang bahwa tim Prabowo-Sandi mendapati identitas ganda berasal dari *soft file* yang diserahkan oleh KPU masih tidak bisa menjadi alasan kuat. Seperti dalam kutipan berita berikut:

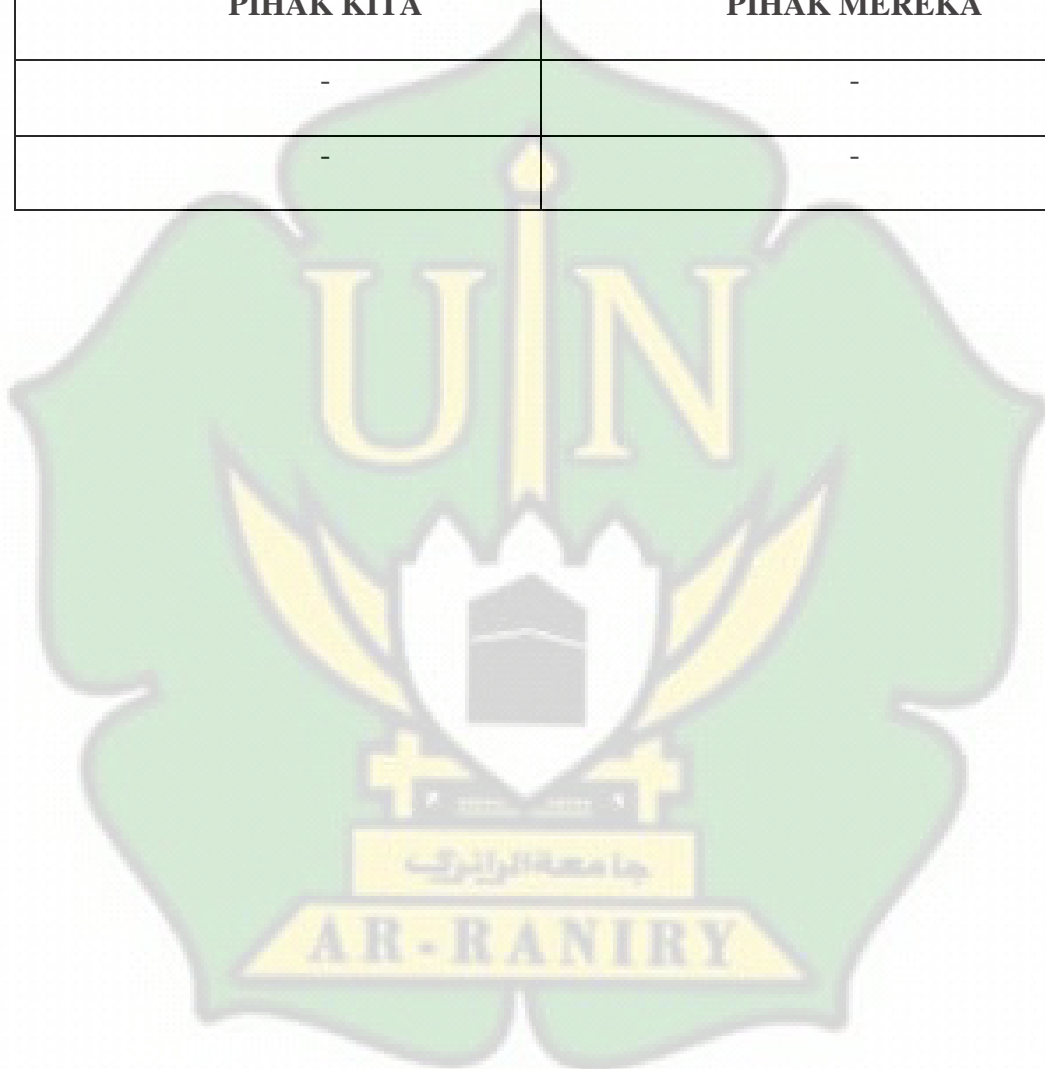
*“Oleh karenanya, Viryan membantah data yang dihimpun oleh KPU tidak akurat. “Bukan tidak akurat, mereka mengecek dengan NIK yang berjumlah 12 angka,” tegasnya. Meski demikian, KPU menghormati upaya partai politik menganalisis data pemilih. Viryan menyebut, temuan itu akan dijadikan masukan bagi KPU dalam menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT).”*

Dari analisis berikut dapat disimpulkan bahwa serambi memberitakan isu tersebut secara berimbang. Dapat dilihat dari penyampaian dan penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan, serta penyampaian informasi dari pihak Prabowo-Sandi dan pihak KPU yang tidak dapat mengetahui bagaimana proses penemuan identitas ganda yang dilakukan oleh ti Prabowo-Sandi. Dan juga tidak adanya titik

temu dalam informasi jumlah identitas ganda yang di temukan dari pihak KPU yang dalam hal ini dikomentari oleh Viryan Aziz sebagai komisioner.

**Tabel 4.4. Pola Kategorisasi Serambi**

PIHAK KITA	PIHAK MEREKA
-	-
-	-



## **BERITA 5**

### **Jokowi-Ma'ruf Unggul di FB, Prabowo-Sandi di IG dan Twitter**

**JAKARTA** - Hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA menunjukkan Elektabilitas pasangan calon presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin unggul di kalangan pengguna Facebook. Sementara pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno unggul Di kalangan pengguna Instagram dan Twitter. Hasil survei tersebut dipaparkan Peneliti Senior LSI Denny JA, Ardian Sopa dalam rilis survei di kantornya, Jakarta, Rabu (5/ 9). Survei dilakukan pada Tanggal 12-19 Agustus 2018, dengan melibatkan 1200 responden di 33 provinsi Indonesia. Dari survei itu, LSI menemukan responden yang menggunakan media sosial sebesar 28,5 persen. Sementara yang tidak menggunakan media sosial sebesar 71,5 persen. Dari 28,5 persen itu, pengguna media sosial yang menggunakan Facebook sebanyak 28 persen, Instagram sebesar 16,1 persen dan Twitter sebesar 6,4 persen.

Pada segmen pengguna Facebook, dari 28 persen responden pengguna Facebook, sebanyak 41,6 persen mendukung pasangan Jokowi-Ma'ruf. Sementara Yang mendukung PrabowoSandiaga sebesar 39,4 persen. "Jadi yang menggunakan Facebook lebih banyak pendukung Jokowi dibandingkan pendukung Prabowo," kata Ardian Sopa. Pada segmen pengguna Instagram, kata Ardian, Prabowo-Sandiaga sedikit lebih unggul dibanding Jokowi-Ma'ruf. Responden pengguna Instagram yang mendukung Prabowo-Sandiaga sebesar 42 persen. sementara yang mendukung Jokowi-Ma'ruf sebesar 40,9 persen. "Jadi, kalau Misalnya di IG (singkatan Instagram) ini banyak pendukung Prabowo-Sandi," kata dia. Sedangkan pada segmen pengguna Twitter, sebanyak 40 persen responden pengguna Twitter mendukung Prabowo-Sandiaga. Sementara itu, yang mendukung Jokowi-Ma'ruf sebesar 34,3 persen.

Berkaca pada tiga temuan itu, Ardian menilai media sosial menjadi elemen krusial yang harus diperhatikan kedua pasangan. Oleh karena itu, apabila pasangan calon tak menganggap serius dukungan di media sosial, akan berpengaruh pada

dukungan nyata di Pilpres 2019 nanti. “Angka pengguna medsos akan menjadi krusial jika tidak dikelola. Karena sumber informasi akan bergulir di sini. Kalau tidak mengarap segmen sosial media adalah hal bahaya. Sosial media (bisa) punya lebih suara,” katanya.(kompas.com)

### **FRAME SERAMBI: Jokowi-Ma’ruf unggul di FB, Prabowo-Sandi di IG dan Twitter**

Harian Serambi Indonesia di edisi 6 September 2018 menurunkan isu terkait keunggulan yang dicapai kedua pasangan calon capres dan cawapres ini melalui media sosial facebook, instagram dan twitter. Dalam pemberitaan ini, serambi memberitakan berdasarkan data dari hasil survei yang dilakukan oleh lingkaran survei indonesia (LSI). Persentase hasil survei yang dilakukan, dikalangan pengguna facebook (FB) diungguli oleh pasangan calon capres cawapres nomor urut 01 Jokowi-Ma’ruf di bandingkan dengan pasangan calon nomor urut 02 Prabowo-Sandi. Sedangkan di kalangan pengguna instagram dan twitter diungguli oleh pasangan calon Prabowo-Sandi. Karena itu, kedua kubu pasanga calon diharapkan untk tidak menyepelekan hasil survei di media sosial yang akan berpengaruh pada dukungan nyata di pilpres 2019. Berikut ini akan dibahas bagaimana kecenderungan pemberitaan serambi terhadap isu tersebut. :

**KATEGORISASI: Jokowi-Ma’ruf–Prabowo-Sandi.** Dalam pandangan serambi, penyampaian informasi dari lingkaran survei indonesia sebagaimana fakta yang ada. Hal itu tampak pada data-data yang disampaikan dalam berita ini, seperti adanya penyebutan “*peneliti senior*” yaitu Denny JA, Ardian Sopa yang menguatkan kebenaran atas informasi yang diterbitkan. Selain itu, penyebutan angka persentase atas pencapaian kedua pasangan calon juga disebutkan. Hal ini

bermakna bahwa wartawan menginformasikan sesuai fakta dan data yang ditemukan. Seperti kutipan teks berita berikut :

*“Hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA menunjukkan Elektabilitas pasangan calon presiden Joko Widodo-Ma’ruf Amin Unggul di kalangan pengguna Facebook. Sementara pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno unggul Di kalangan pengguna Instagram dan Twitter. Hasil survei tersebut dipaparkan Peneliti Senior LSI Denny JA, Ardian Sopa dalam rilis survei di kantornya, Jakarta, Rabu (5/9). Survei dilakukan pada Tanggal 12-19 Agustus 2018, dengan melibatkan 1200 responden di 33 provinsi Indonesia. Dari survei itu, LSI menemukan responden yang menggunakan media sosial sebesar 28,5 persen. Sementara yang tidak menggunakan media sosial sebesar 71,5 persen. Dari 28,5 persen itu, pengguna media sosial yang menggunakan Facebook sebanyak 28 persen, Instagram sebesar 16,1 persen dan Twitter sebesar 6,4 persen.”*

Dalam berita ini, walaupun ada penggunaan kata yang bermakna membandingkan, namun bukan berarti memihak dan menjatuhkan sebelah kubu. Penggunaan perbandingan disini adalah menunjukkan keunggulan dari masing-masing pasangan calon yang meraih dukungan di media sosial antara lain Facebook (FB), Instagram (IG), dan Twitter. Pada masing-masing media sosial tersebut, ada media yang dingguli oleh pasangan calon capres-cawapres Jokowi-Ma’ruf di media sosial Facebook sedangkan pasangan calon capres cawapres Prabowo-Sandi mengungguli dukungan di media Instagram dan Twitter. Seperti dalam kutipan teks berita berikut.:

*“Pada segmen pengguna Facebook, dari 28 persen responden pengguna Facebook, sebanyak 41,6 persen mendukung pasangan Jokowi-Ma’ruf. Sementara Yang mendukung PrabowoSandiaga sebesar 39,4 persen. “Jadi yang menggunakan Facebook lebih banyak pendukung Jokowi dibandingkan pendukung Prabowo,” kata Ardian Sopa. Pada segmen pengguna Instagram, kata Ardian, Prabowo-Sandiaga sedikit lebih unggul dibanding Jokowi-Ma’ruf. Responden pengguna Instagram yang mendukung Prabowo-Sandiaga sebesar 42 persen. Sementara yang mendukung Jokowi-Ma’ruf sebesar 40,9 persen. “Jadi, kalau Misalnya di IG (singkatan Instagram) ini banyak pendukung Prabowo-Sandi,” kata dia. Sedangkan pada segmen pengguna Twitter, sebanyak 40 persen responden pengguna Twitter mendukung Prabowo-Sandiaga. Sementara itu, yang mendukung Jokowi-Ma’ruf sebesar 34,3 persen. Berkaca pada tiga temuan itu, Ardian menilai media sosial menjadi elemen krusial yang harus diperhatikan kedua pasangan.”*

Penggunaan facebook, Instagram dan Twitter juga dapat kita klasifikasikan berdasarkan kalangan usia. Dizaman sekarang ini, penggunaan facebook cenderung digunakan oleh kalangan usia 30 keatas. Namun demikian, juga tidak menutup kemungkinan penggunaanya juga berasal dari usia muda. Sedangkan pengguna instagram dan Twitter banyak digandrungi oleh remaja dan kaum millenial untuk berinteraksi melalui media sosial. Oleh karena itu, kita dapat menyimpulkan bahwa, pasangan calon capres-cawapres Jokowi-Ma’ruf banyak diantara pendukungnya adalah orang yang kalangan usia 30 keatas. Sedangkan



pendukung pasangan calon capres-cawapres Prabowo-Sandi banyak pendukung dari kalangan millennial ataupun pemilih pemula.

Dalam pemberitaan ini juga wartawan menambahkan saran dari peneliti survei tersebut untuk tidak menganggap remeh hasil survei tersebut. Karena Ardian menilai pada zaman modern seperti sekarang ini media sosial menjadi elemen krusial yang harus diperhatikan oleh kedua pasangan calon. Hal tersebut tampak jelas dalam kutipan teks berita berikut: *“Oleh karena itu, apabila pasangan calon tak menganggap serius dukungan di media sosial, akan berpengaruh pada dukungan nyata di Pilpres 2019 nanti. “Angka pengguna medsos akan menjadi krusial jika tidak dikelola. Karena sumber informasi akan bergulir di sini. Kalau tidak mengarap segmen sosial media adalah hal bahaya. Sosial media (bisa) punya lebih suara,” katanya.”*

Dari analisis berikut dapat disimpulkan bahwa serambi memberitakan isu tersebut secara berimbang. Dapat dilihat dari penyampaian dan penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan.

**Tabel 4.5. Pola Kategorisasi Serambi**

<b>PIHAK KITA</b>	<b>PIHAK MEREKA</b>
-	-
-	-

## **BERITA 6**

### **Edy Rahmayadi belum Putuskan Dukung Jokowi atau Prabowo**

**JAKARTA** - Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi, belum Memutuskan apakah akan mendukung pasangan Joko WidodoMa'ruf Amin atau Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Pilpres 2019. Edy mengaku akan memilih pasangan yang berkomitmen membawa kemajuan bagi Sumatera Utara. "Siapa yang mau bisa memakmurkan Sumatera Utara, saya akan Dukung ke sana," kata Edy usai dilantik sebagai Gubernur Sumatera Utara oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Rabu (5/9). Pada Pilkada 2018 lalu, pasangan Edy-Musa Rajeksah diusung Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Amanat Nasional yang kini mengusung pasangan Prabowo-Sandiaga. Edy mengatakan, hal itu tidak lantas membuatnya otomatis mendukung Prabowo-Sandi. Pasalnya, Ada tiga parpol lain yang juga mengusungnya saat Pilkada, yakni Partai Golkar, Nasdem dan Hanura. Ketiga parpol ini mengusung pasangan Jokowi-Ma'ruf. Edy mengaku akan segera membangun komunikasi dengan kedua kubu untuk memastikan komitmen mereka dalam memajukan Sumatera Utara. "Nanti saya bicara dulu, harus pasti untuk kepentingan Sumatera Utara, bukan untuk kepentingan Edy," kata Ketua Umum PSSI ini. ([kompas.com](http://kompas.com))

### **FRAME SERAMBI: Edy Rahmadi belum putuskan dukung Prabowo atau Jokowi**

Serambi menurunkan isu mengenai Edy Rahmadi yang belum memutuskan untuk mendukung pasangan calon capres cawapres Jokowi-Ma'ruf ataupun pasangan calon capres cawapres Prabowo-Sandi. Dalam pemberitaan ini, Edy rahmadi sebagai gubernur Sumatera utara yang pernah diusung oleh partai Gerindra, partai keadilan sejahtera (PKS), dan Partai Amanat Nasional (PAN) pada pilkada 2018 lalu yang kini menjadi pengusung pasangan Prabowo-Sandi tidak menjadikan hal tersebut untuk menentukan pilihannya pada pilpres 2019.

Karena tidak hanya partai tersebut, ada tiga partai lain yang juga mengukung pasangan Edy-Musa Rajeksyah pada pilkada 2018 lalu. Yaitu, partai Golkar, Nasdem dan Hanura. Ketiga partai tersebut adalah partai yang mengukung pasangan calon Jokowi-Ma'ruf. Berikut ini akan dibahas bagaimana kecenderungan pemberitaan Serambi dalam memberitakan hal tersebut:

**KATEGORISASI: Dukung Jokowi–Dukung Prabowo.** Dalam pandangan Serambi, Edy Rahmadi akan memutuskan akan mendukung Jokowi atau Prabowo jika salah satu dari kedua pasangan calon tersebut mau dan mampu memakmurkan Sumatera Utara. Artinya, Edy Ramhadi mengharapkan salah satu pasngan calon yang mampu memberikan perhatian lebih dalam memakmurkan Sumatera Utara. Seperti dalam kutipan teks berita berikut: *“Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi, belum Memutuskan apakah akan mendukung pasangan Joko WidodoMa’ruf Amin atau Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Pilpres 2019. Edy mengaku akan memilih pasangan yang berkomitmen membawa kemajuan bagi Sumatera Utara. “Siapa yang mau bisa memakmurkan Sumatera Utara, saya akan Dukung ke sana,” kata Edy usai dilantik sebagai Gubernur Sumatera Utara oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Rabu (5/9). “*

pemberitaan ini mengarah kepada Edy Rahmadi yang belum memutuskan mendukung paslon 01 atau paslon 02 ini menggambarkan sosok Edy yang teguh dalam pendiriannya dan tidak terpengaruh oleh pihak manapun. Partai Gerindra, Partai Kesejahteraan Sosial (PKS), dan Partai Amanat Nasional (PAN) yang saat ini menjadi koalisi parpol pengukung pasangan calon Prabowo-Sandi juga pernah menjadi partai politik yang mengukung pasangan Edy-Musa Rajeksyah pada

pilkada 2018 lalu tidak menjadi alasan untuk tetap memilih pasangan calon capres cawapres Prabowo-Sandi yang diusung oleh partai tersebut. Artinya, ada kemungkinan edy untuk memilih pasangan calon Jokowi-Ma'ruf. Hal tersebut tampak jelas di gambarkan dalam kutipan berita berikut: *“Pada Pilkada 2018 lalu, pasangan Edy-Musa Rajeksa diusung Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Amanat Nasional yang kini mengusung pasangan Prabowo-Sandiaga. Edy mengatakan, hal itu tidak lantas membuatnya otomatis mendukung Prabowo-Sandi. Peralnya, Ada tiga parpol lain yang juga mengusungnya saat Pilkada, yakni Partai Golkar, Nasdem dan Hanura. Ketiga parpol ini mengusung pasangan Jokowi-Ma'ruf. Edy mengaku akan segera membangun komunikasi dengan kedua kubu untuk memastikan komitmen mereka dalam memajukan Sumatera Utara. “Nanti saya bicara dulu, harus pasti untuk kepentingan Sumatera Utara, bukan untuk kepentingan Edy,” kata Ketua Umum PSSI ini.”*

Sisi itulah yang diangkat serambi dalam berita ini. serambi hanya mengangkat isu Edy yang belum memastikan keputusannya untuk mendukung kedua pasangan calon capres cawapres. Dalam hal ini, tampak jelas dengan penggunaan kata dalam kalimat yang mencerminkan tidak ditemukannya kecenderungan media serambi berpihak kepada salah satu pasangan calon capres cawapres.

**Tabel 4.6. Pola Kategorisasi Serambi**

<b>PIHAK KITA</b>	<b>PIHAK MEREKA</b>
-	-
-	-

## **BERITA 7**

### **Politisi Gerindra Sebut Luhut Aktor Penting di Balik Jokowi**

**JAKARTA** - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Ferry Juliantono mengaku Sependapat dengan anggapan bahwa Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan Merupakan tangan kanan Presiden Joko Widodo. Luhut, kata dia, juga kerap menjadi 'bumper' dari berbagai macam kritik yang dialamatkan pada pemerintah atau Jokowi. Ia menilai Luhut merupakan sosok atau aktor penting di balik setiap kebijakan Presiden Jokowi. Menurut Ferry, Luhut sering melontarkan pernyataan yang berada di luar tugas pokok dan fungsinya sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman. Hal itu membuat banyak pihak juga menjuluki politisi senior Partai Golkar itu sebagai 'super minister'. "Sejak periode pemerintahan Presiden Jokowi, banyak langkah-langkah yang dilakukan Pak Luhut di luar ranah kementerian.

Jadi memang orang melihat bahwa super minister atau berperan penting atau aktor penting di balik kebijakan yang dikeluarkan oleh Pak Jokowi sebagai presiden," ujar Ferry dalam acara Satu Meja bertajuk 'Gerilya Sang Jenderal' di Kompas TV, Rabu (5/9) malam. "Menurut saya, enggak apa-apa sepanjang bisa mengarahkan Pak Jokowi yang notabene dalam posisi sebagai orang baru yang mendadak jadi presiden yang punya tanggung jawab luas. Jadi Pak Luhut berperan di situ," ucapnya. Ferry mencontohkan pernyataan Luhut yang dinilai cukup keras terkait kritik berbagai pihak soal kebijakan pemerintah terhadap reklamasi Teluk Jakarta. Ia juga mencontohkan sikap Luhut yang sangat membela Presiden Jokowi di tengah isu krisis ekonomi dan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat. Kendati demikian, Ferry mengkritik sikap pemerintah yang ia nilai terlalu menutupi lemahnya kondisi ekonomi Indonesia saat ini.

Seharusnya, pemerintah lebih jujur dan terbuka dalam menyampaikan kondisi ekonomi kepada masyarakat. "Pemerintah bisa lebih jujur menyampaikan kepada masyarakat tentang situasi yang terjadi sekarang. Situasi ekonomi sekarang. Tapi, pemerintah kesannya cenderung menutupi itu dan terlalu membuat citra

pemerintah itu bagus. Mungkin karena konteksnya mau pilpres. Jadi yang ini ditutupi, yang lain dibagusbagusin,” kata Ferry ([kompas.com](#))

### **FRAME SERAMBI: Politisi Gerindra sebut Luhut aktor penting dibalik Jokowi**

Pada edisi 7 September 2018 pada laman politik serambi mengangkat isu mengenai Luhut Binsar Panjaitan yang disebut sebagai tangan kanan Jokowi atau orang kepercayaannya. Dalam pemberitaan ini wartawan mengangkat anggapan ferry juliantono sebagai wakil ketua umum partai Gerindra yang mengakui Luhut sebagai orang kepercayaan Jokowi yang sering menjadi “Bumper” dari berbagai macam kritik yang di arahkan kepada Jokowi dan pemerintahnya. Dalam hal lain, Ferry juga mengkritik sikap pemerintah Jokowi yang dalam hal ini terkait sikap pemerintah terlalu meuntupi lemahnya kondisi ekonomi Indonesia. Berikut ini akan kita uraikan bagaimana kecenderungan media serambi terhadap pemberitaan ini :

**KATEGORISASI: POLITISI GERINDRA-LUHUT BINSAR PANJAITAN.** Dalam pandangan Serambi, pemberitaan ini diarahkan pada anggapan Ferry terhadap sikap luhut kepada Jokowi yang selalui menjadi aktor penting dalam setiap kebijakan Jokowi. Pemakaian istilah “*Bumper*” disini diarahkan kepada Luhut yang menggambarkan bahwa luhut sebagai orang terdepan Jokowi dalam menanggapi kritik yang dialamatkan kepada pemerintah atau Jokowi. Seperti dalam kutipan teks berita berikut: “*Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Ferry Juliantono mengaku Sependapat dengan anggapan bahwa Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan Merupakan*

*tangan kanan Presiden Joko Widodo. Luhut, kata dia, juga kerap menjadi 'bumper' dari berbagai macam kritik yang dialamatkan pada pemerintah atau Jokowi. Ia menilai Luhut merupakan nsosok atau aktor penting di balik setiap kebijakan Presiden Jokowi. "*

Penekanan juga dilakukan media serambi pada berita ini dengan memberi citra tertentu. Citra itu muncul lewat berbagai cara seperti: analogi, kisah sejarah, atau pemakaian peribahasa tertentu. Semuanya dipakai sebagai dasar pembenar, landasan berpikir untuk menekankan kepada publik bahwa gagasan yang disampaikan itu benar. Dalam teks berita ini, wartawan menggunakan analogi seperti penyebutan "*super minister*" kepada politisi senior partai Golkar tersebut yang sering dijuluki oleh banyak pihak. Wartawan menggambarkannya sebagai sindiran halus terhadap Luhut yang dinilai banyak melakukan langkah diluar ranah kementerian. Artinya, banyak pekerjaan atau kebijakan-kebijakan yang dilakukan sudah diluar tugasnya sebagai menteri koordinator bidang kemaritiman. Seperti dalam kutipan teks berita berikut: "*Menurut Ferry, Luhut sering melontarkan pernyataan yang berada di luar tugas pokok dan fungsinya sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman. Hal itu membuat banyak pihak juga menjuluki politisi senior Partai Golkar itu sebagai 'super minister'. "Sejak periode pemerintahan Presiden Jokowi, banyak langkah-langkah yang dilakukan Pak Luhut di luar ranah kementerian. Jadi memang orang melihat bahwa super minister atau berperan penting atau aktor penting di balik kebijakan yang dikeluarkan oleh Pak Jokowi sebagai presiden," ujar Ferry dalam acara Satu Meja bertajuk 'Gerilya Sang Jenderal' di Kompas TV, Rabu (5/9) malam.*

Serambi juga menambahkan ucapan Ferry yang beranggapan bahwa Jokowi yang menjabat sebagai presiden sekarang adalah orang baru yang masih belum paham akan tanggung jawabnya sebagai presiden. Hal ini tampak jelas dalam kutipan teks berita berikut:

*“Menurut saya, enggak apa-apa sepanjang bisa mengarahkan Pak Jokowi yang notabene dalam posisi sebagai orang baru yang mendadak jadi presiden yang punya tanggung jawab luas. Jadi Pak Luhut berperan di situ,” ucapnya.”*

Dalam berita ini, alasan dari anggapan ferry terhadap Luhut-pun di paparkan dengan beberapa contoh yang dinilai dapat menjadi dasar atas anggapan dan ucapan ferry yang menilai Luhut yang melakukan tugas di luar bidang kementerian sesuai posisinya. Seperti dalam kutipan teks berita berikut: *“Ferry mencontohkan pernyataan Luhut yang dinilai cukup keras terkait kritik berbagai pihak soal kebijakan pemerintah terhadap reklamasi Teluk Jakarta. Ia juga mencontohkan sikap Luhut yang sangat membela Presiden Jokowi di tengah isu krisis ekonomi dan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat.”*

Penekanan terhadap penafsiran Serambi ini secara jelas tergambar dari pemakaian kata-kata tertentu. Di barengi dengan kritikan Ferry terhadap pemerintah yang menutupi permasalahan ekonomi Indonesia yang sedang lemah dapat menggiring opini masyarakat kepada pemerintahan yang tidak jujur dan tidak lebih terbuka. Hal tersebut tampak jelas dalam kutipan teks berita berikut :



*“Kendati demikian, Ferry mengkritik sikap pemerintah yang ia nilai terlalu menutupi lemahnya kondisi ekonomi Indonesia saat ini. Seharusnya, pemerintah lebih jujur dan terbuka dalam menyampaikan kondisi ekonomi kepada masyarakat. “Pemerintah bisa lebih jujur menyampaikan kepada masyarakat tentang situasi yang terjadi sekarang. Situasi ekonomi sekarang. Tapi, pemerintah kesannya cenderung menutupi itu dan terlalu membuat citra pemerintah itu bagus. Mungkin karena konteksnya mau pilpres. Jadi yang ini ditutupi, yang lain dibagusbagusin,” kata Ferry.”*

Sisi itulah yang diperhatikan dan diberitakan oleh Serambi. Pemberitaan diarahkan pada peran Luhut Binsar Panjaitan sebagai aktor penting di balik Jokowi yang banyak melakukan hal diluar tugasnya sebagai menteri koordinator bidang kemaritiman. Selain itu berita ini juga diarahkan pada sistem informasi pemerintah yang tidak transparan terhadap isu terkait.

**Tabel 4.7. Pola Kategorisasi Serambi**

<b>PIHAK KITA</b>	<b>PIHAK MEREKA</b>
Ferry Juliantono (politisi Gerindra)	Luhut dan pemerintahan Jokowi
Bekerja sesuai posisi yang ditempati	Mengerjakan hal diluar tugas sebagai menteri dan pemerintah yang tidak transparan

## **BERITA 8**

### **Stafsus Jokowi: Jangan Buat Gerakan untuk Ganti Presiden**

**JAKARTA** - Staf Khusus Presiden Kelompok Kerja Papua Lenis Kagoya mengaku geram dengan orang-orang yang kerap menyalahkan dan mengkritik Presiden Joko Widodo. Terlebih lagi dengan gerakan yang meminta Jokowi diganti pada 2019. “Jokowi salah sedikit dijelekin terus, dihina terus, dikritik terus. Dulu waktu saya kuliah kalau jelekkan Presiden, satu kalimat saja kita dihukum. Sekarang bilang ganti presiden, kenapa enggak dihukum?” kata Lenis di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (7/9). “Biarkan pilpres berjalan tertib. Jangan kritik, jangan buat gerakan untuk ganti Presiden. Saya minta TNIPolri, jangan pakai istilah ganti Presiden. Ganti bahasa lain,” tambah dia. Lenis berharap kontestasi Pilpres 2019 yang mempertemukan Joko Widodo, Ma’ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno bisa berlangsung dengan damai dan sportif. Bukan dengan saling menjelekkan satu sama lain. “Jangan ganggu Jokowi. Saya bicara keras. Saya kepala suku, mewakili rakyat Papua, jangan kritik Jokowi. Stop semua bicara. Legislatif, eksekutif, partai. Kita buktikan di lapangan, 2019, pas pemilihan,” kata dia. Lenis juga meminta Presiden Jokowi tidak disalahkan atas pelanggaran HAM yang kerap terjadi di Papua. Sebab, menurut dia bukan tugas Jokowi untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM itu. Ia menilai pembubuhan di luar hukum yang masih kerap terjadi di tanah Papua merupakan tugas kepolisian, kejaksaan, pengadilan serta Komnas HAM. “Komnas HAM jangan sekali-kali kritik Jokowi. Ingat. Saya

amati terus akhir-akhir ini. Saya keras bicara,” kata dia dengan nada tinggi.(kompas.com)

**FRAME SERAMBI: Stafsus Jokowi: Jangan buat gerakan untuk ganti presiden.**

Serambi menurunkan isu tersebut pada edisi 8 September 2018 memberitakan mengenai gerakan ganti presiden yang kerap beredar dimedia sosial dengan tagar #2019ganti presiden, di tolak oleh Lenis Kagoya sebagai staf khusus presiden kelompok kerja Papua. Pemberitaan ini banyak penekanan yang diarahkan kepada kubu lawan untuk tidak lagi menyuarakan perihal ganti presiden. Dalam hal ini tampak pada beberapa kutipan langsung yang di cantumkan pada berita tersebut. Berikut ini akan dibahas bagaimana kecenderungan pemberitaan Serambi dalam memberitakan isu tersebut:

**KATEGORISASI: kubu Jokowi – kubu Prabowo.** Dalam pandangan Serambi, gerakan ganti presiden ini dinilai tidak seharusnya disebar karena dapat menjatuhkan citra kepemimpinan Jokowi. Penekanan dalam berita ini tampak pada penggunaan kata “geram” yang dapat mewakili opini pendukung Jokowi terhadap orang-orang yang berani mengkritik Jokowi, melalui pernyataan yang dilontarkan oleh Lenis Kagoya sebagai staf khusus presiden kelompok kerja Papua. Arti dari kata tersebut bermakna marah dengan gerakan ganti presiden yang terbentuk. Hal ini tampak pada teks berita berikut:

*“Staf Khusus Presiden Kelompok Kerja Papua Lenis Kagoya mengaku geram dengan orang-orang yang kerap menyalahkan dan mengkritik Presiden*

*Joko Widodo. Terlebih lagi Dengan gerakan yang meminta Jokowi diganti pada 2019.”*

Orang-orang yang kerap menyalahkan dan mengkritik presiden Jokowi dalam gerakan ganti presiden itu, dalam pandangan Serambi, seharusnya mendapatkan sanksi atau ganjaran atas kritikan yang dilontarkan terhadap Jokowi. Dalam kutipan langsung berita ini digambarkan bahwasanya, perbandingan kebijakan pada masa lalu dan masa sekarang. Penekanan tegas juga dapat dilihat pada kutipan langsung pernyataan, permintaan dan sikap tegas Lenis Kagoya yang digambarkan dalam berita tersebut. Hal tersebut tampak dalam kutipan teks berita berikut:

*“Jokowi salah sedikit dijelekin terus, dihina terus, dikritik terus. Dulu waktu saya kuliah kalau jelekkan Presiden, satu kalimat saja kita dihukum. Sekarang bilang ganti presiden, kenapa enggak dihukum?” kata Lenis di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (7/9). “Biarkan pilpres berjalan tertib. Jangan kritik, jangan Buat gerakan untuk ganti Presiden. Saya minta TNI Polri, jangan pakai istilah ganti Presiden. Ganti bahasa lain,” tambah dia.*

Pada paragraf ke-5 dari berita tersebut, wartawan juga menambahkan harapan Lenis Kagoya yang berharap pilpres 2019 berjalan damai dan sportif serta tidak saling menjelekkkan satu sama lain. Dalam hal ini, tampak penekanan yang diberikan pada penggunaan kalimat dalam paragraf tersebut yang bermakna bahwa tim pemenangan pasangan calon Prabowo-Sandi ini yang tergabung dalam gerakan ganti presiden adalah tim yang suka menjelekkkan tidak menghargai tim pemenangan pasangan calon lain (Jokowi-Ma'ruf). Untuk memperkuat

gagasannya, Serambi juga menambahkan pernyataan sikap tegas dari Lenis untuk tidak mengganggu dan menjatuhkan Jokowi dalam kutipan langsung pada berita berikut:

*“Lenis berharap kontestasi Pilpres 2019 yang mempertemukan Joko WidodoMa’ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno bisa berlangsung dengan damai dan sportif. Bukan dengan saling menjelekkkan satu sama lain. “Jangan ganggu Jokowi. Saya bicara keras. Saya kepala suku, mewakili rakyat Papua, Jangan kritik Jokowi. Stop semua bicara. Legislatif, eksekutif, partai. Kita buktikan di lapangan, 2019, pas pemilihan,” kata dia.*

Penekanan terhadap penafsiran Serambi ini secara jelas tergambar dari pemakaian kata-kata tertentu. Pembelaan terhadap Jokowi masih menjadi perbincangan pada bagian terakhir berita ini. Jokowi yang menjabat sebagai presiden tentu punya tanggung jawab dan menjamin atas kemerdekaan tiap-tiap penduduk serta wajib memastikan setiap warga negaranya hidup aman tentram dan abadi. Seperti kasus pelanggaran HAM yang kerap terjadi di Papua, Jokowi bukan lah orang yang seharusnya bertanggung jawab atas hal tersebut dan tidak boleh di salahkan. Begitulah posisi Jokowi yang digambarkan dalam berita ini. hal tersebut tampak dalam kutipan berita berikut:

*“Lenis juga meminta Presiden jokowi tidak disalahkan atas pelanggaran HAM yang kerap terjadi di Papua. Sebab, menurut dia bukan tugas Jokowi untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM itu. Ia menilai pembubuhan di luar hukum yang masih kerap terjadi di tanah Papua merupakan tugas kepolisian, kejaksaan, pengadilan serta Komnas HAM. “Komnas HAM jangan sekali-kali*

*kritik Jokowi. Ingat. Saya amati terus akhir-akhir ini. Saya keras bicara,” kata dia dengan nada tinggi.”*

Sisi itulah yang digambarkan dan diinformasikan oleh Serambi. Penolakan terhadap gerakan ganti presiden serta pembelaan pada Jokowi yang terus digambarkan dalam berita ini.

**Tabel 4.8. Pola Kategorisasi Serambi**

<b>PIHAK KITA</b>	<b>PIHAK MEREKA</b>
Kubu Jokowi	Kubu Prabowo
Tidak menjatuhkan citra Prabowo	Menjatuhkan citra Jokowi



## **BERITA 9**

### **Erick Thohir Ketua Tim Pemenangan Jokowi-Ma'ruf**

**JAKARTA** - Bos Mahaka Group, Erick Thohir, resmi menjabat Ketua Tim Pemenangan Pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin Dalam Pilpres 2019. Hal itu disampaikan Bakal calon presiden Joko Widodo dalam jumpa pers di posko kubu Jokowi-Ma'ruf di Jalan Cemara (Posko Cemara), Menteng, Jakarta, Jumat (7/9). “Ketua Tim Kampanye Nasional adalah Bapak Erick Thohir,” ujar Jokowi. Jokowi mengatakan, keputusan itu diambil setelah dirinya berkomunikasi dengan Ma'ruf, ketua umum dan sekjen parpol pengusung dan pendukung, relawan dan banyak tokoh. Ikut hadir para sekretaris jenderal partai pengusung dan pendukung Jokowi-Ma'ruf. Mereka kompak mengenakan kemeja putih. Selain itu, Jokowi juga mengumumkan Jusuf Kalla menjadi Ketua Dewan Pengarah Tim pemenangannya. Jokowi tak menjelaskan lebih lanjut soal alasannya menunjuk Kalla sebagai Ketua Tim Dewan Pengarah. “Saya rasa tak perlu lagi dijelaskan, semua sudah sama-sama tahu,” ucapnya singkat. (**kompas.com**)

### **FRAME SERAMBI: Erick Thohir ketua tim pemenangan Jokowi-Ma'ruf**

Pada edisi yang sama Harian Serambi juga menurunkan isu terkait sosok Erick Thohir yang resmi menjabat sebagai ketua pemenangan Jokowi-Ma'ruf. Dalam pemberitaan ini wartawan memaparkan satu kutipan langsung yang diutarakan oleh Jokowi perihal Erick Thohir menjadi ketua pemenangan tim-nya. Berikut akan dibahas bagaimana kecenderungan /tendensi pemberitaan Serambi dalam memberitakan isu tersebut:

**KATEGORISASI: tim Jokowi-Ma'ruf – tim Prabowo-Sandi.** Dalam pandangan serambi, pemberitaan ini hanya mengacu kepada sosok Erick thohir yang resmi menjabat sebagai ketua pemenangan pasangan Calon Jokowi-Ma'ruf

di pilpres 2019. Dalam pemberitaan ini, wartawan memperkenalkan Erick Thohir ini sebagai Bos Mahaka Group, yang merupakan perusahaan media *multiplatform* yang membuat, menjual, mengumpulkan dan mendistribusikan konten-konten komunitas melalui semua *platform* yang dibutuhkan konsumen. Unit-unit usaha yang termasuk dalam Mahaka Grup adalah surat kabar, majalah, penerbit buku, stasiun televisi, stasiun radio, serta media digital. Artinya, pengenalan yang dikemas sedemikian rupa oleh pihak Serambi ini bertujuan untuk menarik dan mempengaruhi opini publik dalam menyatakan dukungan terhadap Jokowi dan Ma'ruf. Hal ini tampak dalam kutipan teks berita berikut:

*“Bos Mahaka Group, Erick Thohir, resmi menjabat Ketua Tim Pemenangan Pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin Dalam Pilpres 2019. Hal itu disampaikan Bakal calon presiden Joko Widodo dalam jumpa pers di posko kubu Jokowi-Ma'ruf di Jalan Cemara (Posko Cemara), Menteng, Jakarta, Jumat (7/9). “Ketua Tim Kampanye Nasional adalah Bapak Erick Thohir,” ujar Jokowi. Jokowi mengatakan, keputusan itu diambil setelah dirinya berkomunikasi dengan Ma'ruf, ketua umum dan sekjen parpol pengusung dan pendukung, relawan dan banyak tokoh. Ikut hadir para sekretaris jenderal partai pengusung dan pendukung Jokowi-Ma'ruf. Mereka kompak mengenakan kemeja putih.”*

Dalam berita ini juga dinformasikan bahwa Jusuf Kalla menjadi ketua dewan pengarah tim pemenangannya, namun, Jokowi tidak menjelaskan alasan mengapa terpilihnya Jusuf Kalla karna dianggap para pembaca sudah tahu alasan ditunjuknya Jusuf Kalla sebagai ketua dewan pengarah tim pemenangan Jokowi. Hal tersebut tampak dalam kutipan berita berikut:



*“Selain itu, Jokowi juga mengumumkan Jusuf Kalla menjadi Ketua Dewan Pengarah tim pemenangnya. Jokowi tak menjelaskan lebih lanjut soal alasannya menunjuk Kalla sebagai Ketua Tim Dewan Pengarah. “Saya rasa tak perlu lagi dijelaskan, semua sudah sama-sama tahu,” ucapnya singkat.*

**Tabel 4.9. Pola Kategorisasi Serambi**

PIHAK KITA	PIHAK MEREKA
Tim pemenangan Jokowi-Ma'ruf	Tim pemenangan Prabowo-Sandi
Punya sosok yang berpengaruh dalam menyatakan dukungan terhadap timnya.	Tidak punya sosok berpengaruh besar terhadap pernyataan dukungan di timnya

## BERITA 10

### Pospera Aceh Siap Menangkan Jokowi

**BANDA ACEH** – Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) Aceh menyatakan siap mendukung dan memenangkan Joko Widodo (Jokowi) sebagai Presiden RI untuk periode kedua (2019-2024). Sikap politik Pospera itu diputuskan dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda) di Hotel Regina, Banda Aceh, yang berakhir Sabtu (8/9). “Salah satu keputusan rakerda bahwa segenap kader Pospera Aceh siap untuk memenangkan mendukung dan memenangkan Ir Joko Widodo sebagai Presiden RI periode 2019-2024,” kata Ketua DPD Pospera Aceh, Tarmizi, kepada *Serambi*, Sabtu (8/9). Sikap Pospera Aceh ini disepakati secara bulat oleh seluruh kader, sebab Pospera sendiri dibentuk memang bertujuan untuk menyukseskan program-program Jokowi. Meski demikian, Tarmizi mengakui jika pergeseran dukungan memang sempat terjadi, terutama sejak aksi bela Islam 212. “Karena itu kita lakukan penataan ulang organisasi,” imbuhnya. Pihaknya berkeyakinan Jokowi bisa menang di Aceh, meski saat ini tingkat elektabilitasnya masih rendah. Kondisi ini terjadi karena gencarnya serangan hoax melalui media sosial. “Posisi elektabilitas rendah itu pada kondisi dimana kami belum bekerja. Kalau tim sudah bekerja, kondisi bisa berbalik. Kita akan bantah semua hoax itu dengan data-data yang kami miliki,” pungkasnya. “Kita melihat peluang menang Jokowi-Ma'ruf di Aceh masih ada. Kita targetkan bisa menang,” tambah pria yang akrab disapa Wak Tar ini. Keputusan lain yang juga disepakati dalam rakerda adalah menetapkan nama-nama calon legislatif kader Pospera yang akan didukung secara organisasional. Selanjutnya, Pospera Aceh akan membentuk struktur tim kampanye untuk kemenangan Pilpres dan Pileg. “Kita juga akan melakukan pembenahan struktur organisasi ditingkat DPC dan segera dilaksanakan deklarasi dan pelantikan pengurus masing-masing DPC dalam tenggang waktu Oktober hingga November 2018,” sebut Tarmizi. (yos)

**FRAME SERAMBI: Pospera Aceh siap menangkan Jokowi**

Harian Serambi menurunkan isu terkait dukungan dari Pospera Aceh yang siap mendukung dan memenangkan Jokowi sebagai presiden RI 2019-2024. Pada pemberitaan ini, Serambi menginformasikan keputusan-keputusan yang telah disepakati dalam rapat kerja daerah (RAKERDA) yang dilaksanakan di hotel Regina Banda Aceh. Berikut ini akan dibahas bagaimana kecenderungan/Tendensi pemberitaan Serambi dalam memberitakan isu tersebut.

**KATEGORISASI: Pospera Aceh – Tim pemenangan Prabowo.** Dalam pandangan serambi, pernyataan sikap dari Pospera yang mendukung dan memenangkan Jokowi dalam pilpres 2019 sebagai lead dalam berita ini. Penyampaian tersebut dinilai wajar dalam memulai teks berita sesuai strukturnya. Penggunaan “*salah satu keputusan .....*” dalam Pernyataan ketua DPD Pospera Aceh yang dicantumkan dibagian awal berita memberi makna tegas dan jelas bahwa keputusan yang disepakati tidak hanya mendukung memenangkan Jokowi sebagai presiden, namun juga ada beberapa keputusan lain yang disepakati masih dalam ranah kemenangan Jokowi. Hal tersebut tampak pada kutipan teks berita berikut: “*Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) Aceh menyatakan siap mendukung dan memenangkan Joko Widodo (Jokowi) sebagai Presiden RI untuk periode kedua (2019-2024). Sikap politik Pospera itu diputuskan dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda) di Hotel Regina, Banda Aceh, yang berakhir Sabtu (8/9).*”  
“*Salah satu keputusan rakerda bahwa segenap kader Pospera Aceh siap untuk memenangkan mendukung dan memenangkan Ir Joko Widodo sebagai Presiden*

*RI periode 2019-2024,*” kata Ketua DPD Pospera Aceh, Tarmizi, kepada Serambi, Sabtu (8/9).

Keputusan Rakerda Pospera Aceh itu, dalam pandangan serambi, jelas terlihat dukungan yang diberikan melalui cara penyampaian berita tersebut. Alasan terbentuknya Pospera juga disebutkan yaitu tujuan utama dari pospera itu sendiri adalah untuk menyukseskan program-program Jokowi. Dalam hal ini dinilai, wartawan menginformasikan hal tersebut sehingga menimbulkan kesan bahwa Tim pemenangan Jokowi mempunyai banyak pihak mendukung dalam pilpres 2019. Arah pemberitaan digiring juga makin mengukuhkan kekuatan tim Jokowi. Hal tersebut dapat dilihat dari teks berita berikut:

*“Sikap Pospera Aceh ini disepakati secara bulat oleh seluruh kader, sebab Pospera sendiri dibentuk memang bertujuan untuk menyukseskan program-program Jokowi. Meski demikian, Tarmizi mengakui Jika pergeseran dukungan memang sempat terjadi, terutama sejak aksi bela Islam 212. “Karena itu kita lakukan penataan ulang organisasi,” imbuhnya.*

Serambi juga memperkuat gagasannya dengan memaparkan keyakinan kemenangan Jokowi dalam pilpres yang beralasan gencarnya serangan berita *hoax* yang ditujukan kepada tim Jokowi. Tidak hanya itu, serambi memosisikan tingkat elektabilitas dukungan terhadap Jokowi sebagai acuan kerja dalam membantah berita *hoax* yang beredar. Hal tersebut dapat dinilai, bantahan serta argumen yang diberikan terus melindungi tim pemenangan Jokowi. Hal tersebut tampak pada kutipan teks berita berikut:

*“Pihaknya berkeyakinan Jokowi bisa menang di Aceh, meski saat ini tingkat elektabilitasnya masih rendah. Kondisi ini terjadi karena gencarnya serangan hoax melalui media sosial. Posisi elektabilitas rendah itu pada kondisi dimana kami belum bekerja. Kalau tim sudah bekerja, kondisi bisa berbalik. Kita akan bantah semua hoax itu dengan data-data yang kami miliki,”* pungkasnya.

**Tabel 4.10. Pola Kategorisasi Serambi**

<b>PIHAK KITA</b>	<b>PIHAK MEREKA</b>
Pospera	Tim pemenangan Prabowo-Sandi
Menyukseskan program-program Jokowi	Tidak berpeluang menang.

## **B. Hasil Analisis *Framing* Media Republika**

### **BERITA 1**

#### **Kubu Prabowo-Sandi Tolak Daftar Pemilih Tetap Pemilu 2019**

Selasa 04 Sep 2018 00:51 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koalisi partai pendukung pasangan calon Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menegaskan menolak jumlah daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 185 juta lebih pemilih yang telah dirilis oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal itu disampaikan setelah setelah empat sekjen partai pengusung melakukan pertemuan. Sekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mustafa Kamal mengungkapkan, alasan penolakan DPT Pemilu 2019 itu karena pemilih sementara (DPS) masih ada sejumlah kesalahan. Setidaknya ada 25 juta data ganda dari 137 juta lebih pemilih yang ada di DPS.

*"Kami menolak DPT pileg dan pilpres. Karena di beberapa dapil ditemukan beberapa nama, bahkan satu nama bisa tergandakan 11 kali dalam satu TPS,"* keluh Mustafa, saat ditemui di kawasan SCBD, Jakarta Selatan, Senin (3/9). Dalam rapat itu juga hadir Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani, Sekjen PAN Eddy Soeparno, dan Sekjen Partai Demokrat Hinca Pandjaitan. Mustafa meminta agar KPU tidak terburu-buru menetapkan DPT.

KPU, menurut mereka, seharusnya terlebih dahulu menyerahkan rilis DPT final ke partai koalisi untuk ditelusuri lebih lanjut. Apalagi, di beberapa dapil ditemukan beberapa nama, bahkan satu nama bisa tergandakan 11 kali dalam satu TPS.

*"Jadi sebelum ditetapkan oleh KPU, kami ingin itu diserahkan dulu semua data DPS yang sudah di-update. Nantinya kita akan cermati secara bersama-sama,"* ungkap Mustafa. Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Viryan, mengungkapkan ada 187 juta pemilih yang telah masuk DPT Pemilu 2019. Jumlah itu merupakan rekapitulasi daftar pemilih dalam dan luar negeri.

"Total jumlah DPT sekitar 187 juta. Sebanyak lebih dari 185 juta pemilih berada di dalam negeri. Sementara sekitar dua juta pemilih berada di luar negeri," jelas Viryan kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (28/8). Dia menjelaskan, sebanyak dua juta pemilih di luar negeri merupakan hasil penetapan dari perwakilan pemerintah Indonesia yang berada di 130 negara. Sementara itu, lebih 185 juta pemilih yang berada di dalam negeri merupakan hasil rekapitulasi dari 34 provinsi. *"Seluruh kabupaten/kota hari ini telah menyelesaikan DPT. Dan hari ini juga diumumkan DPT diseluruh kantor kelurahan desa dengan menempel print out datanya,"* ujar Viryan.

#### **FRAME REPUBLIKA: Kubu Prabowo-Sandi Tolak Daftar Pemilih Tetap Pemilu 2019**

Dalam isu ini diberitakan bahwa parpol koalisi Prabowo-Sandi menolak KPU untuk merilis jumlah daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 185 juta pemilih. Dengan sebab masih ditemukannya sejumlah kesalahan dalam daftar pemilih sementara (DPS) sebelumnya yang dirilis KPU. PKS, Gerindra, PAN, dan Partai Demokrat menyatakan menemukan setidaknya 25 juta data ganda dari 137 juta lebih pemilih yang ada di DPS. Karena itu, sekjen PKS Mustafa Kamal berharap KPU tidak terburu-buru menetapkan DPT dan juga meminta KPU terlebih dahulu menyerahkan rilis DPT final ke parpol koalisi untuk ditelusuri lebih lanjut. Berikut ini akan dibahas bagaimana kecenderungan pemberitaan *Republika* dalam memberitakan isu tersebut.

**KATEGORISASI: Koalisi Prabowo – KPU.** Dalam pandangan *Republika*, penegasan yang di lontarkan dari pihak koalisi partai pendukung pasangan calon Prabowo-Sandi menjadi lead dalam berita ini. Artinya, hal yang ingin ditampilkan dan untuk diberitakan adalah penolakan dari koalisi pendukung Prabowo-Sandi terhadap jumlah DPT (Daftar Pemilih Tetap) yang dirilis KPU.

Alasan penolakannya juga diungkapkan oleh Sekjen partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mustafa Kamal. Namun dalam hal ini, tidak tampak sumber informasi yang jelas terkait jumlah data pemilih sementara yang terdapat beberapa kesalahan. Artinya, alasan koalisi Prabowo yang menolak hasil DPT yang akan dirilis KPU masih dinilai tidak berlandasan. Hal tersebut tampak dalam kutipan berita berikut:

*“Koalisi partai pendukung pasangan calon Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menegaskan menolak jumlah daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 185 juta lebih pemilih yang telah dirilis oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal itu disampaikan setelah setelah empat sekjen partai pengusung melakukan pertemuan. Sekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mustafa Kamal mengungkapkan, alasan penolakan DPT Pemilu 2019 itu karena pemilih sementara (DPS) masih ada sejumlah kesalahan. Setidaknya ada 25 juta data ganda dari 137 juta lebih pemilih yang ada di DPS.”*

Pandangan Republika terhadap isu ini, juga menampilkan saran terhadap KPU untuk terlebih dahulu menyerahkan rilis DPT final ke partai koalisi untuk ditelusuri lebih lanjut. Hal tersebut dapat dilihat di kutipan berita berikut: *“Dalam rapat itu juga hadir Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani, Sekjen PAN Eddy Soeparno, dan Sekjen Partai Demokrat Hinca Pandjaitan. Mustafa meminta agar KPU tidak terburu-buru menetapkan DPT. KPU, menurut mereka, seharusnya terlebih dahulu menyerahkan rilis DPT final ke partai koalisi untuk ditelusuri lebih lanjut. Apalagi, di beberapa dapil ditemukan beberapa nama, bahkan satu nama bisa tergandakan 11 kali dalam satu TPS. “Jadi sebelum ditetapkan oleh*



*KPU, kami ingin itu diserahkan dulu semua data DPS yang sudah di-update. Nantinya kita akan cermati secara bersama-sama,"* ungkap Mustafa.

Ungkapan Viryan Aziz juga di informasikan terkait jumlah data pemilih yang masuk DPT pemilu 2019, bahwa dari 185 juta pemilih tersebut adalah hasil dari rekapitulasi jumlah pemilih dalam dan luar negeri. Ia juga menambahkan, dua juta pemilih berasal dari luar negeri yang berasal dari 130 negara. Hal tersebut tampak dalam kutipan berita berikut:

*Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Viryan, mengungkapkan ada 187 juta pemilih yang telah masuk DPT Pemilu 2019. Jumlah itu merupakan rekapitulasi daftar pemilih dalam dan luar negeri. "Total jumlah DPT sekitar 187 juta. Sebanyak lebih dari 185 juta pemilih berada di dalam negeri. Sementara sekitar dua juta pemilih berada di luar negeri," jelas Viryan kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (28/8). Dia menjelaskan, sebanyak dua juta pemilih di luar negeri merupakan hasil penetapan dari perwakilan pemerintah Indonesia yang berada di 130 negara. Sementara itu, lebih 185 juta pemilih yang berada di dalam negeri merupakan hasil rekapitulasi dari 34 provinsi."*

Sisi itulah yang diangkat informasinya oleh *Republika* di edisi 4 September 2018. Dalam isu ini, melihat kecenderungan yang terjadi dalam berita ini, *Republika* menggiring opini publik kepada KPU yang menerima kritik dan saran dari kubu koalisi Prabowo-Sandi terkait data jumlah DPT yang dirilisnya belum akurat.

**Tabel 4.11. Pola Kategorisasi Republika**

<b>Pihak Kita</b>	<b>Pihak Mereka</b>
KPU	Koalisi Prabowo-Sandi
Belum bisa menerima alasan koalisi Prabowo terkait jumlah DPS	Tidak ada sumber jumlah DPS terdapat kesalahan.



## **BERITA 2**

### **Disoal Kubu Prabowo, KPU Tetapkan Daftar Pemilih Pemilu 2019**

Rabu 05 Sep 2018 11:33 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan total jumlah daftar pemilih tetap (DPT) dalam negeri pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPT Tingkat Nasional Pemilu 2019 di Kantor Pusat KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (5/9). Total jumlah DPT yang ditetapkan sebanyak 185.732.093 pemilih.

Lebih detail, jumlah pemilih perempuan sebanyak 92.929.422 pemilih dan laki-laki sebanyak 92.802.671. Adapun, jumlah tempat pemungutan suara (TPS) dari 514 kota/kabupaten seluruh Indonesia mencapai 805.075 TPS. Ketua KPU Arief Budiman mengatakan, rangkaian kegiatan penghitungan DPT berlangsung secara terbuka dan melalui proses yang panjang. Ia mengatakan, KPU telah melakukan pemutakhiran data beserta perbaikan sistem KPU agar jumlah DPT yang diperoleh valid. Pihaknya juga sudah melakukan rapat koordinasi bersama segenap lembaga negara.

*"Jadi penetapan hari ini tidak terjadi secara tiba-tiba karena telah melalui proses yang panjang dan terbuka,"* kata Arief, Rabu (5/9) pagi. KPU, kata Arief segera menyampaikan kepada KPU di masing-masing provinsi untuk menjelaskan proses penetapan DPT. Namun, penetapan DPT belum selesai. KPU meyakini masih ada warga negara yang sudah berhak menjadi pemilih tapi belum terdaftar sebagai DPT.

Selanjutnya, masih KPU akan menetapkan DPT Tambahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masyarakat pun diminta untuk tetap cermat terhadap berbagai data yang diumumkan KPU. "Kita berharap ada peran aktif dari masyarakat apakah namanya masuk dalam DPT atau tidak. Jika ada beberapa catatan silakan langsung terbuka kepada kita," ujarnya. Komisioner KPU, Viryan Azis mengatakan, seluruh masalah terkait DPT bisa diselesaikan secara terstruktur dan sistematis. Ia mengungkapkan, seringkali masalah DPT bersumber dari beberapa persoalan teknis.

Sebagai contoh, masalah jumlah DPT sebagian besar terletak pada pemilih baru yang masih menjadi mahasiswa atau menempuh pendidikan di pesantren dimana biasanya mereka tidak dapat pulang ke kampung halaman. Khususnya untuk mengurus kepemilikan KTP elektronik. *"KTP elektronik adalah syarat untuk bisa menjadi pemilih karena ini amanah undang-undang,"* katanya. Sebelumnya, koalisi partai pendukung pasangan calon Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menegaskan menolak jumlah daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 185 juta lebih pemilih yang telah dirilis oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal itu disampaikan setelah setelah empat sekjen partai pengusung melakukan pertemuan. Sekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mustafa Kamal mengungkapkan, alasan penolakan DPT Pemilu 2019 itu karena pemilih sementara (DPS) masih ada sejumlah kesalahan. Setidaknya ada 25 juta data ganda dari 137 juta lebih pemilih yang ada di DPS. *"Kami menolak DPT pileg dan pilpres. Karena di beberapa dapil ditemukan beberapa nama, bahkan satu nama bisa terdandan 11 kali dalam satu TPS,"* keluh Mustafa, saat ditemui di kawasan SCBD, Jakarta Selatan, Senin (3/9).

#### **FRAME REPUBLIKA: DISOAL KUBU PRABOWO, KPU TETAPKAN DAFTAR PEMILIH PEMILU 2019.**

Pada tanggal 5 September 2018 Republika menurunkan isu mengenai daftar pemilih tetap (DPT) yang ditetapkan oleh KPU ditolak oleh kubu Prabowo-Sandi. Hal tersebut dikarenakan, pemilih sementara (DPS) masih ada sejumlah kesalahan. Hal itu disampaikan oleh Mustafa kamal Sekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) setelah menggelar pertemuan bersama koalisi partai pendukung Prabowo-Sandi. Dalam berita ini juga Republika mencantumkan jawaban dari pihak KPU bahwa, kegiatan penghitungan DPT berlangsung secara terbuka dan melalui proses yang panjang dan sudah melakukan rapat koordinasi bersama segenap lembaga negara. Dalam hal ini, republika juga mencantumkan beberapa

alasan tidak validnya data yang masuk. Seperti masih ada warga negara yang sudah berhak menjadi pemilih tapi belum terdaftar sebagai DPT, pemilih baru yang masih menjadi mahasiswa atau menempuh pendidikan di pesantren dimana biasanya mereka tidak dapat pulang ke kampung halaman. Namun dalam berita ini juga menampilkan solusi yang diberikan oleh KPU, bahwa KPU masih akan menetapkan DPT Tambahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masyarakat pun diminta untuk tetap cermat terhadap berbagai data yang diumumkan KPU. Berikut ini akan dibahas bagaimana kecenderungan pemberitaan Republika dalam memberitakan isu tersebut:

**KATEGORISASI: KOALISI PRABOWO – KPU.** Dalam pandangan Republika, pemberitaan isu ini diawali dengan menginformasikan data jumlah pemilih terlebih dahulu. Pada awal berita menginformasikan Total jumlah DPT yang ditetapkan sebanyak 185.732.093 pemilih. Pemilih perempuan sebanyak 92.929.422 pemilih dan laki-laki sebanyak 92.802.671. Hal tersebut adalah unsur fakta yang terkandung dalam berita ini. Selain itu, republika juga menambahkan pernyataan ketua KPU Arief Budiman yang menginformasikan bahwa rangkaian kegiatan penghitungan DPT berlangsung secara terbuka dan melalui proses yang panjang. Ia mengatakan, KPU telah melakukan pemutakhiran data beserta perbaikan sistem KPU agar jumlah DPT yang diperoleh valid. Pihaknya juga sudah melakukan rapat koordinasi bersama segenap lembaga negara. Hal tersebut tampak dalam kutipan berita berikut:

*“Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan total jumlah daftar pemilih tetap (DPT) dalam negeri pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPT Tingkat Nasional Pemilu 2019 di Kantor Pusat KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (5/9). Total jumlah DPT yang ditetapkan sebanyak 185.732.093 pemilih. Lebih detail, jumlah pemilih perempuan sebanyak 92.929.422 pemilih dan laki-laki sebanyak 92.802.671. Adapun, jumlah tempat pemungutan suara (TPS) dari 514 kota/kabupaten seluruh Indonesia mencapai 805.075 TPS. Ketua KPU Arief Budiman mengatakan, rangkaian kegiatan penghitungan DPT berlangsung secara terbuka dan melalui proses yang panjang. Ia mengatakan, KPU telah melakukan pemutakhiran data beserta perbaikan sistem KPU agar jumlah DPT yang diperoleh valid. Pihaknya juga sudah melakukan rapat koordinasi bersama segenap lembaga negara.”*

Kalimat langsung Arief Budiman yang dicantumkan Republika jelas mengarah kepada dukungannya terhadap KPU. Hal itu tampak pada penggunaan kata dalam kalimat yang terus meng-informasikan hal yang menyangkut proses penetapan DPT pemilu. Dalam hal ini, Arief menginformasikan bahwa KPU akan segera menyampaikan kepada KPU di masing-masing provinsi untuk menjelaskan proses penetapan DPT. Dan diinformasikan juga bahwa penetapan DPT belum selesai. KPU meyakini masih ada warga negara yang sudah berhak menjadi pemilih tapi belum terdaftar sebagai DPT. Hal tersebut tampak pada kutipan berita berikut:

*"Jadi penetapan hari ini tidak terjadi secara tiba-tiba karena telah melalui proses yang panjang dan terbuka," kata Arief, Rabu (5/9) pagi. KPU,*

*kata Arief segera menyampaikan kepada KPU di masing-masing provinsi untuk menjelaskan proses penetapan DPT. Namun, penetapan DPT belum selesai. KPU meyakini masih ada warga negara yang sudah berhak menjadi pemilih tapi belum terdaftar sebagai DPT.”*

Solusi yang diinformasikan dalam berita ini adalah masih tentang KPU yang masih akan menetapkan DPT tambahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Serta mengajak masyarakat juga ikut turut cermat terhadap data yang diinformasikan oleh KPU. Dalam hal ini, Republika juga menambahkan pernyataan dari Viryan Aziz komisioner KPU yang mengatakan “seluruh masalah terkait DPT bisa diselesaikan secara terstruktur dan sistematis. Ia mengungkapkan, seringkali masalah DPT bersumber dari beberapa persoalan teknis.”. Dari hal tersebut tampak jelas yang diinformasikan dalam berita ini adalah bagaimana KPU menyikapi hal yang ditolak oleh koalisi pasangan pilpres Prabowo-Sandi. Hal ini dapat dilihat dalam kutipan berita berikut:

*“Selanjutnya, masih KPU akan menetapkan DPT Tambahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masyarakat pun diminta untuk tetap cermat terhadap berbagai data yang diumumkan KPU.”Kita berharap ada peran aktif dari masyarakat apakah namanya masuk dalam DPT atau tidak. Jika ada beberapa catatan silakan langsung terbuka kepada kita,” ujarinya. Komisioner KPU, Viryan Azis mengatakan, seluruh masalah terkait DPT bisa diselesaikan secara terstruktur dan sistematis. Ia mengungkapkan, seringkali masalah DPT bersumber dari beberapa persoalan teknis.”*

Dalam paragraf berita berikutnya, Republika juga menambahkan contoh-contoh sebab akibat dari tidak akuratnya data yang dihimpun oleh KPU. Dalam hal ini dicontohkan masalah jumlah DPT sebagian besar terletak pada pemilih baru yang masih menjadi mahasiswa atau menempuh pendidikan di pesantren dimana biasanya mereka tidak dapat pulang ke kampung halaman. Hal tersebut juga berpengaruh dengan pengurusan KTP elektronik. Penyampaian contoh yang diberitakan Republika ini juga tampak sebagai belaun terhadap KPU. Sikap ini secara jelas tergambar dalam kutipan berita berikut:

*“Sebagai contoh, masalah jumlah DPT sebagian besar terletak pada pemilih baru yang masih menjadi mahasiswa atau menempuh pendidikan di pesantren dimana biasanya mereka tidak dapat pulang ke kampung halaman. Khususnya untuk mengurus kepemilikan KTP elektronik. “KTP elektronik adalah syarat untuk bisa menjadi pemilih karena ini amanah undang-undang,” katanya.*

Setelah membahas bagaimana sikap dan solusi dari KPU mengenai jumlah data DPT, informasi terkait alasan koalisi Prabowo-Sandi menolak hasil DPT yang ditetapkan KPU juga mulai diberitakan pada akhir dari berita ini. Penegasan yang dilontarkan oleh koalisi Prabowo-Sandi terkait menolaknya hasil DPT yang dirilis KPU serta pengungkapan yang dilakukan Sekjen Partai Keadilan Sejahtera (Mustafa Kamal) yaitu alasan penolakan DPT Pemilu 2019 itu karena pemilih sementara (DPS) masih ada sejumlah kesalahan. Setidaknya ada 25 juta data ganda dari 137 juta lebih pemilih yang ada di DPS. Dalam hal ini dapat dilihat Republika memberitakan pihak Koalisi Prabowo-Sandi hanya sepintas menginformasikan alasan menolaknya DPT yang di rilis KPU.



Sisi itulah yang diberitakan Republika terhadap isu tersebut. Dalam berita ini, dapat dilihat, intensitas informasi yang diberitakan tentang KPU lebih dominan dibandingkan informasi mengenai alasan penolakan yang dilontarkan dari pihak koalisi Prabowo-Sandi.

**Tabel 4.12. Pola Kategorisasi Republika**

<b>Pihak Kita</b>	<b>Pihak Mereka</b>
KPU	Koalisi Prabowo-Sandi
KPU telah melakukan pemutakhiran data beserta perbaikan sistem KPU agar jumlah DPT yang diperoleh valid	Alasan koalisi Prabowo-Sandi masih dianggap tidak berlandasan.

### **BERITA 3**

#### **Prabowo Imbau Masyarakat Kampanyekan Pemilu Sejuk**

Jumat 21 Sep 2018 22:21 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut dua, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menyerukan kepada masyarakat Indonesia untuk melaksanakan pemilu presiden dengan sejuk, damai dan semangat kekeluargaan. Prabowo juga mengajak warga untuk mencari pemimpin terbaik bagi bangsa dan bukan mencari kesalahan dan kekurangan masing-masing.

*"Saya berharap semua pihak selalu bersikap tenang, bersikap tidak emosional, menahan diri dan mari kita menyongsong proses demokrasi dengan baik dan tenang,"* kata Prabowo Subianto dalam pidato sambutannya usai mengambil nomor urut di kantor KPU, Jumat (21/9) di Jakarta Pusat.

Dalam kesempatan itu, Prabowo berterima kasih kepada KPU dan komisioner, Bawaslu hingga DKPP atas semua penyelenggaraan untuk mempersiapkan dan melaksanakan pemilu 2019. Pernyataan itu, dia ungkapkan atas nama pribadi, cawapres, partai serta relawan yang mendukung dirinya. Prabowo meminta masyarakat untuk merasakan bahwa kita semua satu keluarga besar NKRI. Sebabnya, dia mengatakan, seluruh masyarakat harus menyikapi semua persoalan bangsa sebagai persoalan keluarga besar.

*"Kita berharap semua pihak melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya demi masa depan bangsa dan cucu kita,"* tutup pidatonya.

Dalam kesempatan yang sama, Sandiaga Uno mengatakan, jika peserta pemilu saat ini merupakan elite politik yang teduh dan damai. Ini, dia mengatakan, terlihat dari cara penyelesaian nomor urut yang menurutnya dapat menimbulkan komplikasi.

Dia mengatakan, potensi komplikasi nomor urut itu pada akhirnya dapat diselesaikan oleh kedua pasangan calon dengan menambahkan angka '0' di depan nomor urut tersedia. Dia mengatakan, hal itu menunjukkan jika kedua kubu berkontestasi merupakan sahabat yang menginginkan pemilu yang menjunjung tinggi keberagaman, keteduhan dan kesejukan.

*"Sehingga percepatan pembangunan dengan membangun ekonomi khususnya lapangan kerja dan biaya hidup bisa kita lakukan,"* kata Sandiaga. Proses pengundian nomor urut diawali dengan penentuan urutan pengambilan nomor urut terlebih dahulu. Masing-masing calon wakil presiden secara bersamaan mengambil satu bola berisi angka yang telah disediakan dalam kotak transparan dan penentuan urutan pengambilan nomor urut dimulai dari angka yang terkecil.

Selanjutnya, calon presiden yang mendapatkan giliran pertama, mengambil undian dari tempat yang disediakan. Hal yang sama dilakukan calon presiden yang mendapat giliran berikutnya. Kemudian kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden tersebut membuka nomor urut yang telah diambil secara bersamaan.

Pelaksanaan pengundian ini menempatkan pasangan Jokowi-Ma'ruf dengan nomor Urut 01 dan Prabowo-Sandiaga dengan nomor urut 02. Penetapan nomor urut ini dituangkan dalam Keputusan KPU RI Nomor 1142/PL.02,2-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.

Usai pengundian nomor, kedua pasangan segera meninggalkan kantor KPU. Dengan tangan mengepal seraya mengacungkan jari telunjuk dan tengah menyimbolkan angka 2, Prabowo keluar dari kompleks gedung KPU sambil tersenyum dan mengomentari secara singkat hasil pengundian nomor urut.

*"Ya nomor 2 lambang kemenangan,"* katanya. Langkah Prabowo diikuti oleh Ketua Kogasma Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Sama dengan Prabowo, politisi partai Demokrat ini meninggalkan Kantor KPU hanya dengan mengatakan 'sukses' bagi koalisi atau pasangan calon.

*"Nomor 2 ini baik, nanti biar pak Prabowo-Sandi yang jelaskan. Yang jelas kami akan terus berikan support bisa sukses dalam pilpres ini dan tentunya membawa kebaikan dalam bangsa ini,"* kata AHY. Begitu juga dengan Lulung Lunggana yang mengikuti setelahnya. Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman bersyukur bahwa proses pengambilan nomor urut berjalan dengan lancar. Dia tidak mempermasalahkan nomor urut yang didapatkan pasangan calon.

*"Kedua nomor, dua atau satu sama saja yang penting bagaimana setelah mendapatkan nomor tim bisa bekerja maksimal," katanya.*

**FRAME REPUBLIKA: PRABOWO IMBAU MASYARAKAT  
KAMPANYEKAN PEMILU DAMAI**

Berita yang dirilis Republika pada tanggal 21 september 2018 adalah himbauan dari Prabowo kepada masyarakat untuk mengkampanyekan pemilu sejuk. Dalam pemberitaan ini, Republika juga lebih mengedepankan seruan tersebut dengan pernyataan-pernyataan dari Prabowo sendiri sebagai salah satu pasangan calon di pilpres kali ini. Serta suasana pengambilan nomor urut di KPU yang berlangsung secara harmonis juga menjadi poin dari berita ini.

**KATEGORISASI: KUBU PRABOWO – KUBU JOKOWI.** Dalam pandangan Republika, seruan dan himbauan Prabowo mengajak masyarakat untuk menciptakan pemilu sejuk dan damai serta semangat kekeluargaan. Selain itu, dalam paragraf pertama berita ini Prabowo mengajak masyarakat mencari pemimpin terbaik bagi bangsa. Artinya, warga diminta cermat memilih pemimpin terbaik diantara dua pasangan calon dalam pilpres kali ini. Namun demikian, kata dan kalimat yang digunakan tidak menimbulkan makna atau sikap menjatuhkan atau memperburuk timses lainnya. Hal tersebut tampak dalam kutipan berita berikut:

*"Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut dua, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menyerukan kepada masyarakat Indonesia untuk melaksanakan pemilu presiden dengan sejuk, damai dan semangat*

*kekeluargaan. Prabowo juga mengajak warga untuk mencari pemimpin terbaik bagi bangsa dan bukan mencari kesalahan dan kekurangan masing-masing.”*

Kesan damai yang ditonjolkan dalam berita ini juga didukung oleh pernyataan kutipan langsung yang di cantumkan yaitu harapan Prabowo agar warga mengambil sikap tenang dan tidak emosional dalam menghadapi pesta demokrasi serta ucapan terimakasih kepada KPU juga disampaikan Prabowo mewakili cawapres, partai, dan relawan pendukungnya dalam sambutan pidatonya. Hal ini sangat jelas terlihat dari kutipan teks berita berikut:

*"Saya berharap semua pihak selalu bersikap tenang, bersikap tidak emosional, menahan diri dan mari kita menyongsong proses demokrasi dengan baik dan tenang," kata Prabowo Subianto dalam pidato sambutannya usai mengambil nomor urut di kantor KPU, Jumat (21/9) di Jakarta Pusat. Dalam kesempatan itu, Prabowo berterima kasih kepada KPU dan komisioner, Bawaslu hingga DKPP atas semua penyelenggaraan untuk mempersiapkan dan melaksanakan pemilu 2019. Pernyataan itu, dia ungkapkan atas nama pribadi, cawapres, partai serta relawan yang mendukung dirinya.”*

Sikap netral yang tampak pada berita ini juga terdapat pada kutipan berita paragraf lain. Republika menambahkan permintaan Prabowo kepada masyarakat untuk merasakan sebagai keluarga besar NKRI . Dalam hal ini, penyampaian berita republika ini dapat meningkatkan sikap nasionalisme setiap warga negara Indonesia sehingga dapat mewujudkan pemilu damai. Hal tersebut tampak pada kutipan berita berikut:

*“Prabowo meminta masyarakat untuk merasakan bahwa kita semua satu keluarga besar NKRI. Sebabnya, dia mengatakan, seluruh masyarakat harus menyikapi semua persoalan bangsa sebagai persoalan keluarga besar. “Kita berharap semua pihak melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya demi masa depan bangsa dan cucu kita,” tutup pidatonya.*

Republika juga memperkuat gagasannya dengan menambahkan pernyataan Sandiaga Uno bahwasanya dia menilai peserta pemilu saat ini adalah elite politik yang teduh dan damai. Penggunaan kata *“teduh dan damai”* ini bermakna tentram, tidak ada perang, atau tidak ada kerusuhan didalamnya. Hal tersebut disampaikan sandiaga uno karna menilai dari penyelesaian nomor urut yang menurutnya dapat menimbulkan komplikasi. Hal ini terlihat pada kutipan berita berikut:

*“Dalam kesempatan yang sama, Sandiaga Uno mengatakan, jika peserta pemilu saat ini merupakan elite politik yang teduh dan damai. Ini, dia mengatakan, terlihat dari cara penyelesaian nomor urut yang menurutnya dapat menimbulkan komplikasi. Dia mengatakan, potensi komplikasi nomor urut itu pada akhirnya dapat diselesaikan oleh kedua pasangan calon dengan menambahkan angka '0' di depan nomor urut tersedia. Dia mengatakan, hal itu menunjukkan jika kedua kubu berkontestasi merupakan sahabat yang menginginkan pemilu yang menjunjung tinggi keberagaman, keteduhan dan kesejukan.”*

Hal lain yang diinformasikan dalam pemberitaan ini ialah suasana pengambilan nomor urut di kantor KPU yang berlangsung damai. Pengambilan

nomor urut ini diawali dengan penentuan urutan pengambilan nomor urut terlebih dahulu. Dengan begitu, tidak ada pihak yang merasa didahului. Hal tersebut tampak dalam kutipan berita berikut:

*“Proses pengundian nomor urut diawali dengan penentuan urutan pengambilan nomor urut terlebih dahulu. Masing-masing calon wakil presiden secara bersamaan mengambil satu bola berisi angka yang telah disediakan dalam kotak transparan dan penentuan urutan pengambilan nomor urut dimulai dari angka yang terkecil. Selanjutnya, calon presiden yang mendapatkan giliran pertama, mengambil undian dari tempat yang disediakan. Hal yang sama dilakukan calon presiden yang mendapat giliran berikutnya. Kemudian kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden tersebut membuka nomor urut yang telah diambil secara bersamaan.”*

Hasil pengundian yang diberitakan republika menerakan hasil resmi yang dituangkan dalam keputusan KPU RI. Hal tersebut terdapat pada kutipan berita berikut:

*“Pelaksanaan pengundian ini menempatkan pasangan Jokowi-Ma'ruf dengan nomor Urut 01 dan Prabowo-Sandiaga dengan nomor urut 02. Penetapan nomor urut ini dituangkan dalam Keputusan KPU RI Nomor 1142/PL.02,2-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.”*

Pendeskripsian situasi setelah pengambilan nomor urut yang digambarkan Republika mengangkat tingkah laku Prabowo yang mengepal tangannya seraya mengacungkan jari telunjuk dan jari tengah simbol angka dua. Yang bermakna

pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo – Sandiaga mendapat nomor urut 02. Dalam paragraf berita ini, Republika juga menambahkan kalimat langsung yang dilontarkan oleh Prabowo yaitu: *"Ya nomor 2 lambang kemenangan,"* katanya. dapat dinilai, Republika mulai mengunggulkan pasangan calon presiden nomor urut dua. Hal tersebut tampak pada kutipan teks berita berikut:

*"Usai pengundian nomor, kedua pasangan segera meninggalkan kantor KPU. Dengan tangan mengepal seraya mengacungkan jari telunjuk dan tengah menyimbolkan angka 2, Prabowo keluar dari kompleks gedung KPU sambil tersenyum dan mengomentari secara singkat hasil pengundian nomor urut."*

Tidak hanya itu, Republika juga kembali tampak terlihat *men-support* tim pasangan calon Prabowo-Sandi dengan menambahkan informasi mengenai Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang turut mengomentari hasil pengambilan nomor urut di kantor KPU. Hal tersebut tampak pada kutipan berita berikut:

*Langkah Prabowo diikuti oleh Ketua Kogasma Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Sama dengan Prabowo, politisi partai Demokrat ini meninggalkan Kantor KPU hanya dengan mengatakan 'sukses' bagi koalisi atau pasangan calon. "Nomor 2 ini baik, nanti biar pak Prabowo-Sandi yang jelaskan. Yang jelas kami akan terus berikan support bisa sukses dalam pilpres ini dan tentunya membawa kebaikan dalam bangsa ini," kata AHY.*

Sebagai penutup berita ini, republika memberikan sebuah solusi dari pandangan Lulung Lunggana dan Shohibul Iman yang bersyukur bahwa proses pengambilan nomor urut tidak terjadi keributan dan komplikasi serta



semacamnya. Penggunaan kalimat langsung yang diterakan dalam akhir dari berita ini menjadi sebuah solusi dan apresiasi untuk kedua pasangan calon presiden demi menjalankan kampanye dan pemilu damai. Hal ini sangat jelas tercermin dari kutipan teks beita berikut:

*“Begitu juga dengan Lulung Lunggana yang mengikuti setelahnya. Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman bersyukur bahwa proses pengambilan nomor urut berjalan dengan lancar. Dia tidak mempermasalahkan nomor urut yang didapatkan pasangan calon. “Kedua nomor, dua atau satu sama saja yang penting bagaimana setelah mendapatkan nomor tim bisa bekerja maksimal,” katanya.*

Sisi itulah yang beritakan dalam sudut pandang Republika terhadap isu kampanye dan pemilu damai yang ingin diciptakan oleh kedua pasangan calon. Pemberitaan ini mengarah kepada pasangan calon nomor urut dua yakni Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno yang menghimbau masyarakat agar turut berpartisipasi dalam menciptakan kampanye dan pemilu damai. Dalam pandangan republika, dari sudut pandang yang diinformasikan dapat dinilai tidak menjelekkkan atau menjatuhkan salah satu pasangan calon, namun, jika anda menyadari, secara tidak langsung, Republika berusaha menggiring opini masyarakat terhadap dukungannya kepada pasangan calon nomor urut dua.

**Tabel 4.13. Pola Kategorisasi Republika**

<b>Pihak Kita</b>	<b>Pihak Mereka</b>
Prabowo-Sandi	Jokowi-Ma'ruf
Nomor urut dua lambang kemenangan	Nomor urut satu bukan lambang kemenangan



## **BERITA 4**

### **Koalisi Jokowi-Ma'ruf: Pemilu Damai Ditentukan Pemimpin**

Ahad 23 Sep 2018 06:02 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Hasto Kristiyanto, menilai pemimpin memiliki peran penting dalam menciptakan pemilu damai. Peran tersebut untuk mengarahkan narasi damai hingga di jajaran bawah atau akar rumput.

Karena itu, ia mengingatkan tim pasangan calon baik Jokowi-Ma'ruf maupun Prabowo Subianto-Sandiaga Uno untuk menjaga komitmen dan semangat mewujudkan pemilu yang sejuk dan damai. Ini juga sesuai dengan komitmen yang diungkapkan kedua pasangan calon saat mengambil nomor urut di Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jumat (21/9).

*"Kalau kami itu satunya kata dan perbuatan. Kalau kami punya komitmen untuk berkampanye dengan mengedepankan sebagaimana apa yang Pak Jokowi katakan tadi malam, track record menyampaikan gagasan, menyampaikan kinerja yang terbaik,"* kata Hasto di Menteng, Sabtu (22/9).

Sekjen PDIP itu memastikan akan mendisiplinkan seluruh tim kampanye nasional Koalisi Indonesia Kerja (KIK) jika tidak sejalan dengan komitmen tersebut. Hasto menegaskan bahwa arahan Jokowi-Ma'ruf kepada TKN KIK adalah tidak boleh mengkampanyekan hal-hal negatif kepada pasangan Prabowo-Sandiaga.

*"Kami akan memberikan sanksi bagi mereka yang tidak mentaati hal tersebut karena mandat yang kami terima untuk menjaga disiplin dari seluruh tim kampanye agar semua menyuarakan hal yang positif,"* kata Hasto.

Masa kampanye akan dimulai pada Ahad (23/9) hari ini selama tujuh bulan ke depan hingga 13 April mendatang. Hari pertama kampanye juga akan ditandai oleh kampanye damai antara peserta pemilu, penyelenggara pemilu, pemerintah, dan stakeholder lainnya di Monas, Ahad (23/9).

### **FRAME REPUBLIKA: Koalisi Jokowi-Ma'ruf: Pemilu Damai Ditentukan Pemimpin**

Portal berita Republika menurunkan isu terkait seruan pemilu damai yang harus dijalankan oleh pemimpin sebagai aktor penting dalam menciptakan pemilu damai ini. Dalam pemberitaan Republika ini, seruan pemilu damai disampaikan oleh koalisi Jokowi-Ma'ruf, berita ini banyak menyampaikan hal-hal yang membela terlaksananya pemilu damai dengan menjadikan sosok pemimpin sebagai aktor penting dalam menciptakan pemilu damai. Tanpa harus menjelekkkan satu sama lain, berita ini menegaskan untuk melakukan kampanye secara sehat serta menjaga komitmen dan semangatnya dri masing-masing pasangan calon. Berikut ini akan dibahas bagaimana kecenderungan pemberitaan Republika dalam memberitakan isu tersebut:

#### **KATEGORISASI: koalisi Jokowi-Ma'ruf – koalisi Prabowo-Sandi.**

Dalam pandangan Republika, penilaian Hasto Kristiyanto sebagai sekretaris tim kampanye nasional Jokowi Ma'ruf bahwa pemimpin memiliki peran penting dalam menciptakan pemilu damai menjadi headline dalam berita ini. Ia menilai, pemimpin dapat menjalani peran tersebut untuk mengarahkan narasi damai hingga di jajaran bawah kepemimpinannya. Selain itu, Hasto juga mengingatkan masing-masing tim pasangan calon untuk berkomitmen dan bersemangat menciptakan pemilu damai seperti yang telah diungkapkan kedua pasangan calon saat mengambil nomor urut di KPU. Hal tersebut tampak pada kutipan teks berita berikut:

*“Sekretaris Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Hasto Kristiyanto, menilai pemimpin memiliki peran penting dalam menciptakan pemilu*

*damai. Peran tersebut untuk mengarahkan narasi damai hingga di jajaran bawah atau akar rumput. Karena itu, ia mengingatkan tim pasangan calon baik Jokowi-Ma'ruf maupun Prabowo Subianto-Sandiaga Uno untuk menjaga komitmen dan semangat mewujudkan pemilu yang sejuk dan damai. Ini juga sesuai dengan komitmen yang diungkapkan kedua pasangan calon saat mengambil nomor urut di Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jumat (21/9)."*

Republika juga mengajukan pernyataan Hasto mengenai komitmen yang dipegang oleh timnya sebagai koalisi Jokowi-Ma'ruf bahwasanya, mereka mengedepankan apa yang dikatakan oleh Jokowi untuk menciptakan pemilu damai. Dalam pemberitaan ini republika juga menginformasikan bahwa tim pemenang Jokowi juga tidak boleh mengkampanyekan hal-hal negatif terhadap Prabowo-Sandi. Hal tersebut tampak dalam kutipan berita berikut:

*"Kalau kami itu satunya kata dan perbuatan. Kalau kami punya komitmen untuk berkampanye dengan mengedepankan sebagaimana apa yang Pak Jokowi katakan tadi malam, track record menyampaikan gagasan, menyampaikan kinerja yang terbaik," kata Hasto di Menteng, Sabtu (22/9). Sekjen PDIP itu memastikan akan mendisiplinkan seluruh tim kampanye nasional Koalisi Indonesia Kerja (KIK) jika tidak sejalan dengan komitmen tersebut. Hasto menegaskan bahwa arahan Jokowi-Ma'ruf kepada TKN KIK adalah tidak boleh mengkampanyekan hal-hal negatif kepada pasangan Prabowo-Sandiaga."*

Pernyataan Hasto lainnya digambarkan tegas dalam menyikapi hal-hal yang tidak sesuai atau tidak diharapkan terjadi dalam menciptakan kampanye dan pemilu damai. Hal tersebut dapat dilihat dari kutipan berita berikut:

*"Kami akan memberikan sanksi bagi mereka yang tidak mentaati hal tersebut karena mandat yang kami terima untuk menjaga disiplin dari seluruh tim kampanye agar semua menyuarakan hal yang positif," kata Hasto. Masa kampanye akan dimulai pada Ahad (23/9) hari ini selama tujuh bulan ke depan hingga 13 April mendatang. Hari pertama kampanye juga akan ditandai oleh kampanye damai antara peserta pemilu, penyelenggara pemilu, pemerintah, dan stakeholder lainnya di Monas, Ahad (23/9).*

Sisi itulah yang diberitakan dan diperhatikan oleh Republika. Pemberitaan diarahkan pada penyampaian seruan kampanye dan pemilu damai. Seruan tersebut dianggap pantas diberitakan. Menciptakan pemilu damai dan mengkampanyekan masing-masing pasangan calon tanpa cacian dan hujatan negatif patut di realisasikan oleh seluruh masyarakat dalam memenangkan pasangan calon pilihan mereka. Sisi pemberitaan yang digambarkan oleh Republika dalam isu ini, menggambarkan koalisi Jokowi-Ma'ruf sangat berpegang pada komitmen dan semangat dalam menciptakan pemilu damai. Tidak ada sisi menjatuhkan pasangan calon Prabowo-Sandi dalam pemberitaan ini.

**Tabel 4.14. Pola Kategorisasi Republika**

Pihak Kita	Pihak Mereka
-	-
-	-

## BERITA 5

### Sandiaga Ingin KPU Kurangi Pawai Selama Pemilu 2019

Senin 24 Sep 2018 08:23 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Calon Wakil Presiden (Cawapres) Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan insiden *walk-out* yang dilakukan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) patut menjadi pelajaran bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menyelenggarakan Pemilu 2019. Salah satunya dengan meminimalisasi pawai-pawai yang dilakukan oleh pendukung masing-masing pasangan calon (paslon).

*"Menurut saya acara-acara yang bernuansa pamer, pawai seperti itu, mestinya sih kita harus evaluasi ulang. Saya mengajak KPU juga mengevaluasi ulang acara-acara seremonial yang seperti itu,"* kata Sandiaga, Ahad (23/9).

Sandiaga mengaku sudah melihat dampak dari banyaknya pawai-pawai yang dilakukan selama masa kampanye. Ia menceritakan, saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2017, banyak terjadi saling ejek. Selama pawai, petugas keamanan bahkan perlu membuat pagar betis untuk memisahkan kedua kubu pendukung paslon. Baginya, hal itu justru negatif. Saling ejek dan berbagai gesekan yang terjadi justru mengaburkan isu-isu substansial yang seharusnya digali dari masing-masing paslon selama masa kampanye.

*"Saya ingat banget waktu Pilkada. Sampai harus dipisahin sama pagar betis, pendukung satu paslon sama Anies-Sandi gitu. Sayang gitu lho energi mestinya bisa lebih positif, dihambur-hamburkan untuk hal-hal yang sangat tidak substansial dan cenderung negatif,"* ujar dia.

Menurut Sandiaga, ajang pawai selama masa kampanye cenderung hanya menjadi ajang unjuk kekuatan dari masing-masing relawan. Hal ini sangat riskan menimbulkan gesekan dan perpecahan. Sandiaga mengaku sempat mendiskusikan hal ini dengan Calon Presiden (Capres) Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Keduanya sepakat pawai-pawai tersebut seharusnya diminimalisasi.

"*Satu, pemborosan anggaran. Kita sama-sama sepakat. Nomor dua, ya begini. Kejadian yang seperti tadi itu salah satu yang dikhawatirkan oleh Pak Presiden. Kita sebenarnya sepakat,*" ujar dia.

### **FRAME REPUBLIKA: Sandiaga Ingin KPU Kurangi Pawai Selama Pemilu 2019**

Edisi 24 September 2018 *republika* menurunkan isu terkait Sandiaga ingin KPU kurangi pawai selama pemilu 2019. Pemberitaan ini menginformasikan hal-hal negatif beserta dampak yang terjadi jika pawai yang dilakukan oleh masing-masing tim pasangan calon pada pemilu 2019 dengan menambahkan contoh kasus yang telah terjadi akibat *walk-out* yang dilakukan oleh SBY dalam deklarasi kampanye damai. Berikut ini akan dibahas bagaimana kecenderungan pemberitaan *Republika* dalam memberitakan isu tersebut:

**KATEGORISASI: Sandiaga – KPU .** Dalam pandangan *Republika*, Sandiaga uno mengomentari KPU terkait pawai-pawai yang dilakukan untuk dikurangi dan dinilai tidak bermanfaat. Dalam hal ini, wartawan menambahkan Contoh kasus yang dipaparkan oleh Sandiaga menjadi pendukung. Terkait *walk-out* atau deklarasi kampanye damai yang dilakukan oleh ketua umum partai demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dinilai gagal. Hal tersebut terjadi, karena terdapat sejumlah massa yang meneriaki 'Jokowi Satu Kali Lagi' saat rombongan SBY iring-iringan melintas memasuki jalan merdeka barat pada saat itu yang seharusnya belum dimulai masa kampanye tim masing-masing pasangan calon. Pandangan *republika* atas insiden ini, dapat dijadikan pelajaran bagi KPU dalam menyelenggarakan pemilu 2019. Hal tersebut tampak pada kutipan teks berita berikut:



*“Calon Wakil Presiden (Cawapres) Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan insiden walk-out yang dilakukan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) patut menjadi pelajaran bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menyelenggarakan Pemilu 2019. Salah satunya dengan meminimalisasi pawai-pawai yang dilakukan oleh pendukung masing-masing pasangan calon (paslon).”*

Republika juga memperkuat gagasannya dengan mengajukan argumen Sandi yang menilai buruk pawai-pawai yang dilakukan selama masa kampanye. Tidak hanya itu, dalam paragraf dua dalam berita ini juga dicantumkan contoh kasus saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2017, banyak terjadi saling ejek. Hal tersebut tampak dalam kutipan teks berita berikut:

*“Menurut saya acara-acara yang bernuansa pamer, pawai seperti itu, mestinya sih kita harus evaluasi ulang. Saya mengajak KPU juga mengevaluasi ulang acara-acara seremonial yang seperti itu,” kata Sandiaga, Ahad (23/9). Sandiaga mengaku sudah melihat dampak dari banyaknya pawai-pawai yang dilakukan selama masa kampanye. Ia menceritakan, saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2017, banyak terjadi saling ejek. Selama pawai, petugas keamanan bahkan perlu membuat pagar betis untuk memisahkan kedua kubu pendukung paslon. Baginya, hal itu justru negatif. Saling ejek dan berbagai gesekan yang terjadi justru mengaburkan isu-isu substansial yang seharusnya digali dari masing-masing paslon selama masa kampanye.”*

Kutipan langsung argumen Sandi juga masih di cantumkan dalam paragraf tiga berita ini. Penambahan argumen tersebut tampak jelas bahwa pihak republika

dalam hal ini ikut mendukung pemikiran Sandi terkait pawai-pawai yang dilakukan pada masa pemilu. Menginformasikan tentang banyak hal-hal negatif dan tidak bermanfaat dengan pelaksanaan pawai tersebut. Wartawan dalam hal ini juga menjelaskan secara tidak langsung bahwa ada cara yang lebih efektif dan kondusif dalam pelaksanaan kampanye selain dengan cara dilakukan pawai. Hal tersebut tampak pada kutipan teks berita berikut:

*"Saya ingat banget waktu Pilkada. Sampai harus dipisahin sama pagar betis, pendukung satu paslon sama Anies-Sandi gitu. Sayang gitu lho energi mestinya bisa lebih positif, dihambur-hamburkan untuk hal-hal yang sangat tidak substansial dan cenderung negatif," ujar dia. Menurut Sandiaga, ajang pawai selama masa kampanye cenderung hanya menjadi ajang unjuk kekuatan dari masing-masing relawan. Hal ini sangat riskan menimbulkan gesekan dan perpecahan."*

Masih terkait hal negatif dari pelaksanaan pawai tersebut, wartawan menutup informasi ini dengan pengakuan Sandi yang telah berdiskusi langsung dengan Presiden Jokowi dan Prabowo Subianto bahwasanya mereka sepakat atas apa yang dinilai negatif dalam pelaksanaan pawai-pawai tersebut. Akhir berita yang di sampaikan ini seakan mengajak para khalayak berpikir serta mengkaji ulang terhadap pawai-pawai yang dilakukan selama ini. hal tersebut tampak dalam kutipan teks berita berikut:

*"Sandiaga mengaku sempat mendiskusikan hal ini dengan Calon Presiden (Capres) Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Keduanya sepakat pawai-pawai tersebut seharusnya diminimalisasi. "Satu, pemborosan anggaran. Kita sama-*

*sama sepakat. Nomor dua, ya begini. Kejadian yang seperti tadi itu salah satu yang dikhawatirkan oleh Pak Presiden. Kita sebenarnya sepakat,"* ujar dia.

Sisi itulah yang diinformasikan oleh Republika dalam berita ini. Pemberitaan diarahkan kepada penilaian positif tidaknya dalam pelaksanaan kampanye dengan cara melakukan pawai-pawai setiap tim pasangan calon. Berita ini juga menggambarkan Sandiaga Uno dan tim pemenangannya tampak peduli dengan sikap damai yang harus diciptakan oleh pendukung masing-masing. Berita ini memberikan referensi awal untuk para khalayak yang mengkaji ulang terhadap apa yang terjadi selama kampanye.

**Tabel 4.15. Pola Kategorisasi Republika**

<b>PIHAK KITA</b>	<b>PIHAK MEREKA</b>
Sandiaga Uno	KPU
Peduli terhadap nilai efektifitas pelaksanaan pemilu	Kurang memperdulikan hal yang dinilai tidak efektif

### C. Hasil Analisis *Framing* Serambinews.com dan Republika.co.id

1. Tabel 5.1. Hasil Analisis *Framing* Serambinews.com

No. Berita	Frame	Pihak kita	Pihak mereka
Berita 1	<b>DEMOKRAT – PDIP</b>	PDIP (Timses Jokowi-Ma'ruf)	Demokrat ( Timses Prabowo-Sandi)
		Kepemimpinan yang merangkul semua pihak	Kepemimpinan yang tidak nyaman
Berita 2	<b>kubu Jokowi – Kubu Prabowo</b>	Timses Jokowi-Ma'ruf (partai NasDem)	Timses Prabowo-Sandi (partai pendukung Prabowo – Sandi)
		Pemimpin yang seharusnya dan kualitas caleg yang baik.	Pemimpin yang tidak seharusnya, dan kualitas caleg belum terbukti kemampuannya.
Berita 3	<b>KPU – KOALISI PRABOWO</b>	Koalisi Prabowo	KPU
		Teliti	Tidak teliti
Berita 4	<b>Kubu Prabowo-Sandi – KPU.</b>	-	-
		-	-
Berita 5	<b>Jokowi-Ma'ruf – Prabowo-Sandi</b>	-	-
		-	-
Berita 6	<b>Dukung Jokowi – Dukung Prabowo</b>	-	-
		-	-
Berita 7	<b>POLITISI GERINDRA – LUHUT BINSAR PANJAITAN</b>	Ferry Juliantono (politisi Gerindra)	Luhut dan pemerintahan Jokowi
		Bekerja sesuai posisi yang ditempati	Mengerjakan hal diluar tugas sebagai menteri dan pemerintah yang

			tidak transparan
Berita 8	<b>kubu Jokowi – kubu Prabowo</b>	Kubu Jokowi	Kubu Prabowo
		tidak menjatuhkan citra Prabowo	Menjatuhkan citra Jokowi
Berita 9	<b>tim Jokowi-Ma'ruf – tim Prabowo-Sandi.</b>	Tim pemenangan Jokowi-Ma'ruf	Tim pemenangan Prabowo-Sandi
		Punya sosok yang berpengaruh dalam menyatakan dukungan terhadap timnya.	Tidak punya sosok berpengaruh besar terhadap pernyataan dukungan di timnya
Berita 10	<b>Pospera Aceh – Tim pemenangan Prabowo</b>	pospera	Tim pemenangan Prabowo-Sandi
		Menyukseskan program-program Jokowi	Tidak berpeluang menang.

Dari hasil analisis 10 berita diatas, dapat dilihat dari intensitas pemberitaan yang tampak mendukung pasangan calon presiden nomor urut 01 ada lima berita dan Berita yang tampak cenderung pada pihak pasangan calon presiden nomor urut 02 ada dua berita. Sedangkan selebihnya, ada tiga berita yang tidak cenderung ke pihak manapun.

Dari 38 jumlah seluruh berita yang terbit pada edisi September 2018, *Serambinews.com* kerap memberitakan isu pilpres yang tampak memihak pada pasangan calon nomor urut 01 yaitu Jokowi-Ma'ruf. Oleh karena itu, peneliti memilih sampel 10 berita saja secara berurutan dari periode tanggal 2 – 9 September 2018 untuk dianalisis.

**2. Tabel 5.2. Hasil Analisis *Framing* *Republika.co.id***

No. Berita	Elemen	Pihak kita	Pihak mereka
Berita 1	Koalisi Prabowo – KPU.	KPU	Koalisi Prabowo-Sandi
		Belum bisa menerima alasan koalisi Prabowo terkait jumlah DPS	Tidak ada sumber jumlah DPS terdapat kesalahan.
Berita 2	KOALISI PRABOWO – KPU.	KPU	Koalisi Prabowo-Sandi
		KPU telah melakukan pemutakhiran data beserta perbaikan sistem KPU agar jumlah DPT yang diperoleh valid	Alasan koalisi Prabowo-Sandi masih dianggap tidak berlandasan.
Berita 3	KUBU PRABOWO – KUBU JOKOWI.	Prabowo-Sandi	Jokowi-Ma'ruf
		Nomor urut dua lambang kemenangan	Nomor urut satu bukan lambang kemenangan
Berita 4	koalisi Jokowi-Ma'ruf – koalisi Prabowo-Sandi.	-	-
		-	-
Berita 5	Sandiaga – KPU	Sandiaga Uno	KPU
		Peduli terhadap nilai efektifitas pelaksanaan pemilu	Kurang memperdulikan hal yang dinilai tidak efektif

Dari hasil analisis diatas, dapat disimpulkan bahwa pemberitaan *Republika.co.id* terkait pemilu presiden 2019 edisi September 2018 terdapat dua berita yang mengarah pada tim pemenangan Prabowo-Sandi, dua berita yang mengarah pada pihak KPU terkait berita jumlah data DPT yang dirilis, dan terdapat satu berita yang tidak mengandung unsur memihak kelompok manapun.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Hasil analisis *framing* terhadap media online *Serambinews.com* dan *Republika.co.id* mengenai pemberitaan – pemberitaan pemilihan umum presiden dan wakil presiden pada masa sebelum kampanye edisi September 2018. Dimana analisis ini bertujuan untuk melihat bagaimana kecenderungan dua media tersebut dalam memberitakan pemberitaan-pemberitaan mengenai pilpres 2019.

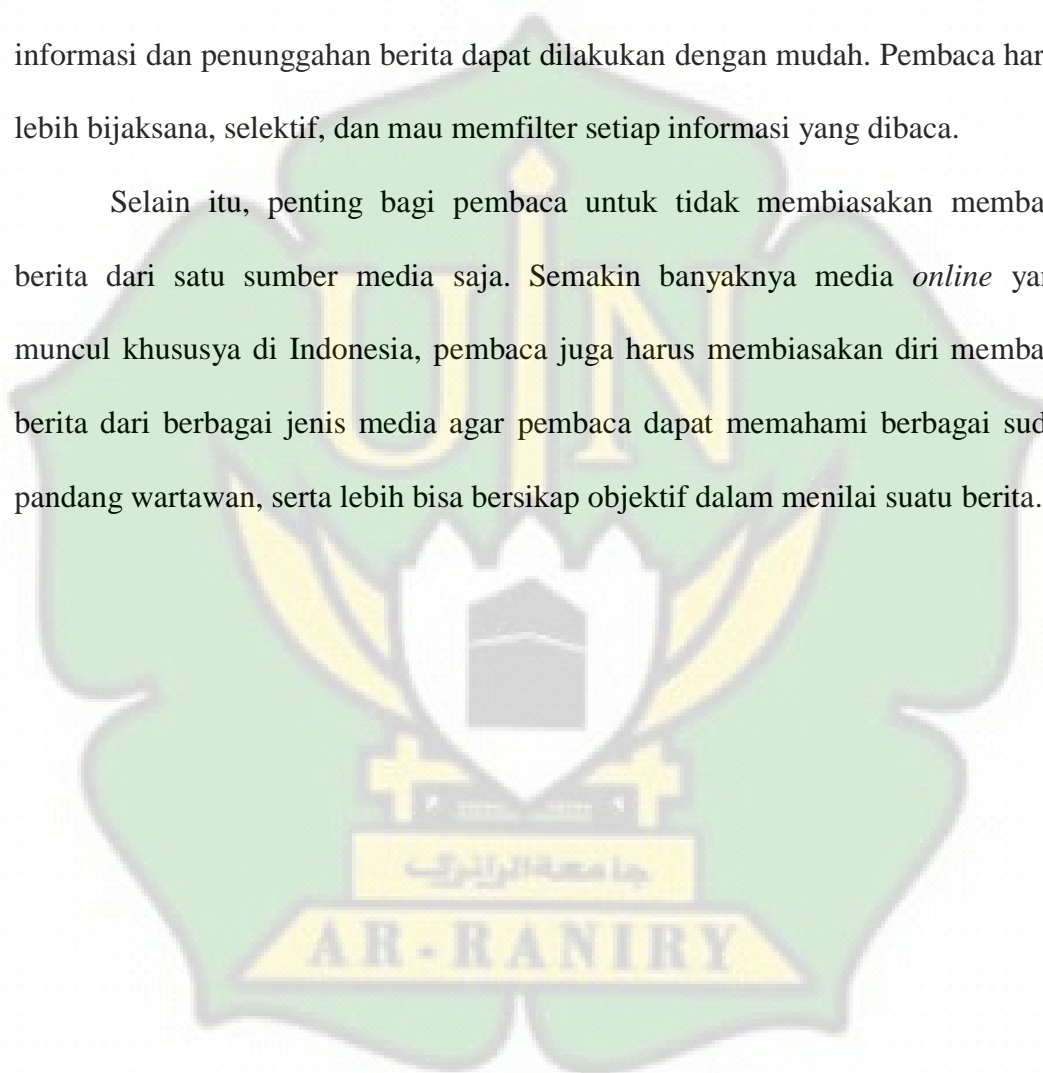
Dalam hal ini, saya sebagai peneliti menyimpulkan dari hasil penelitian saya bahwa:

1. Perspektif wartawan dalam menyeleksi isu pada media bersumber dari faktor bergabungnya sejumlah pemilik media ke salah satu kubu capres pada pilpres lalu, semakin menunjukkan adanya kecenderungan kuat media membuat agenda setting dan *framing* berita sampai sekarang ini semakin masif dan terstruktur.
2. Penerapan teori Murray Edelman dalam Analisis *framing* di media *serambinews.com* dan *Republika.co.id* sangat efektif untuk mengetahui kecenderungan yang ditonjolkan pada media tersebut. Apa yang ditonjolkan dan apa yang dihilangkan oleh wartawan serta apa yang ditekankan oleh wartawan dalam penulisan artikel berita dari unsur kategorisasi.

## B. Saran

Dalam menuliskan berita, wartawan dipengaruhi oleh berbagai hal, termasuk pemahamannya terhadap suatu masalah. Oleh karena itu, pembaca harus pintar dalam menyerap informasi, terutama di media *online* yang penyebaran informasi dan penunggahan berita dapat dilakukan dengan mudah. Pembaca harus lebih bijaksana, selektif, dan mau memfilter setiap informasi yang dibaca.

Selain itu, penting bagi pembaca untuk tidak membiasakan membaca berita dari satu sumber media saja. Semakin banyaknya media *online* yang muncul khususnya di Indonesia, pembaca juga harus membiasakan diri membaca berita dari berbagai jenis media agar pembaca dapat memahami berbagai sudut pandang wartawan, serta lebih bisa bersikap objektif dalam menilai suatu berita.





## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Arikunto, S. (2010). *Metode Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Burhan, B. (2003). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Eriyanto, (2005). *Analisis Framing: konstruksi, Ideologi, dan Politik Media, cet.3*. Yogyakarta: LKIS.
- Hamad, I. (2004). *Konstruksi realitas politik dalam media massa: Sebuah studi critical discourse analysis terhadap berita-berita politik. Yayasan Obor Indonesia*.
- Ishwara, L. (2005). *Catatan-catatan jurnalisme dasar (Vol. 1)*. Penerbit Buku Kompas.
- Kovach, B., & Rosenstiel, T. (2004). *Elemen-Elemen Jurnalisme*. Jakarta: ISAI.
- Kriyantono, R. (2012). *Teknik praktis riset komunikasi Cetak ke-6*. Jakarta: Kencana Prenada.
- McIntyre, B. T. (1991). *Advanced newsgathering*. Praeger Publishers.
- Moleong, L. J. (2007). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Muhammad, I. (2009). *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Yogyakarta: Penerbit Erlangga.
- Mulyana, D. D. (2002). *ANALISIS FRAMING Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*. Lkis Pelangi Aksara.
- Nasrullah, R. (2015). *Media sosial: Perspektif komunikasi, budaya, dan sosioteknologi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2016, 2017.
- Nazir, Moh. (1985) *Metode Penelitian, cet.3*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nurudin. (2008). *Hubungan Media (konsep dan aplikasi)*, Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Sobur, A. (2001). *Analisis teks media: suatu pengantar untuk analisis wacana, analisis semiotik dan analisis framing*. Remaja Rosdakarya.
- Suryanto, D., & Si, M. (2015). *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Bandung: Pustaka Setia.
- Suprayogo, Imam.(2001). *Metode Penelitian Agama*. Bandung : Remaja Rosdakarya.

Suryabrata, S. (2003). *Metode Penelitian*. Jakarta: Rajawali press

Sugiyono, M. P. P., & Kuantitatif, P. (2009). *Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. Cet. VII.

## **JURNAL**

Anggoro, A. D. (2016). Media, Politik dan Kekuasaan (Analisis Framing Model Robert N. Entman tentang pemberitaan hasil pemilihan Presiden, 9 Juli 2014 di TV One dan Metro TV). *ARISTO*, 2(2), 25-52. *JURNAL STUDI KOMUNIKASI DAN MEDIA MEDIA MASSA, KHALAYAK....* Vol. 16 No. 1 (Januari – Juni 2012)

Imran, H. A. (2012). Media massa, Khalayak Media, The Audience Theory, Efek Isi Media Dan Fenomena Diskursif. *Jurnal Studi Komunikasi dan Media*, 16(1), 47-60.

## **WEB**

[www.andreasharsono.net](http://www.andreasharsono.net).

<https://aceh.tribunnews.com/>

<https://republika.co.id/>



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH  
Nomor: B.2040/Un.08/FDK/KP.00.4/08/2020**

**Tentang  
Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020**

**DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan Skripsi pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, maka dipandang perlu menunjuk Pembimbing Skripsi.  
b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai Pembimbing Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009, tentang Dosen;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;  
8. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;  
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang organisasi dan tata kerja UIN Ar-Raniry;  
10. Keputusan Menteri Agama No. 89 Tahun 1963, tentang Penetapan Pendirian IAIN Ar-Raniry;  
11. Keputusan Menteri Agama No. 153 Tahun 1968, tentang Penetapan Pendirian Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry;  
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 21 tahun 2015 tentang Statuta UIN Ar-Raniry;  
13. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur PPs dalam lingkungan UIN Ar-Raniry  
14. DIPA UIN Ar-Raniry Nomor: 025.04.2.423925/2020, Tanggal 12 November 2019

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.  
**Pertama** : Menunjuk Sdr. 1) Zainuddin T, M. Si..... (Sebagai PEMBIMBING UTAMA)  
2) Asmaunizar, M. Ag..... (Sebagai PEMBIMBING KEDUA)

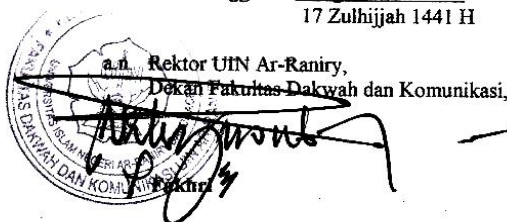
Untuk membimbing KRU Skripsi:

Nama : Rayyan Sofyan  
NIM/Prodi : 150401019/Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI)  
Judul : *Analisis Framming Model Murray Edelman pada Pemberitaan Pemilihan Presiden 2019 di Serambinew.com dengan Republika.co.id*

- Kedua** : Kepada Pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;  
**Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada dana DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2020;  
**Keempat** : Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Surat Keputusan ini.  
**Kutipan** : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada Tanggal : 7 Agustus 2020 M  
17 Zulhijjah 1441 H

a.n. Rektor UIN Ar-Raniry,  
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi,



- Tembusan:**  
1. Rektor UIN Ar-Raniry.  
2. Kabag. Keuangan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry.  
3. Pembimbing Skripsi.